

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN 2019

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Tangerang untuk Tahun Anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kota Tangerang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, handal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.





Walikota Tangerang

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan syukur Alhamdulillahi Robbil 'Alamiin, kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat, Inayah dan Hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2018 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Pemerintah Kota Tangerang memuat informasi kinerja Pemerintah Kota Tangerang dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat gambaran tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kota Tangerang pada tahun 2018.

Analisis dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif menjadikan Laporan Kinerja Tahun 2018 ini sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pembangunan agar lebih relevan, efektif, efisien, berdampak dan berkelanjutan.

Pelaksanaan pembangunan di Kota Tangerang kurun waktu 2018, merupakan tahun terakhir periode RPJMD 2014-2018, dalam rangka mewujudkan visi Kota Tangerang “TERWUJUDNYA KOTA TANGERANG YANG MAJU, MANDIRI, DINAMIS, DAN SEJAHTERA, DENGAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAKUL KARIMAH”. Pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Tangerang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, dan aparat pemerintah daerah.

Akhir kata, disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Kota Tangerang Tahun 2018.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	I-1
I.1 Latar Belakang.....	I-1
I.2 Kondisi Kota Tangerang.....	I-4
I.3 Kedudukan, Kewenangan Dan Tugas Pokok Serta Struktur Organisasi.....	I-17
I.4 Sistematika LKIP 2018.....	I-22
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	II-1
II.1 Rencana Strategis	II-1
II.2 VISI	II-1
II.3 MISI.....	II-3
II.4 Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kota Tangerang	II-5
II.5 Sasaran Dan Indikator Sasaran RPJMD	II-7
II.6 Indikator Kinerja Utama	II-10
II.7 Perjanjian Kinerja Kota Tangerang Tahun 2018.....	II-14
II.8 Rencana Anggaran Tahun 2018	II-16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018.....	III-1
III.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	III-2
III.2 Capaian Indikator Makro.....	III-3
III.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Tangerang Tahun 2018.....	III-10
III.4 Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	III-12
III.4.1 SASARAN 1.....	III-14
III.4.2 SASARAN 2.....	III-20

III.4.3	SASARAN 3.....	III-28
III.4.4	SASARAN 4.....	III-31
III.4.5	SASARAN 5.....	III-40
III.4.6	SASARAN 6.....	III-47
III.4.7	SASARAN 7.....	III-50
III.4.8	SASARAN 8.....	III-55
III.4.9	SASARAN 9.....	III-59
III.4.10	SASARAN 10.....	III-63
III.4.11	SASARAN 11.....	III-65
III.4.12	SASARAN 12.....	III-70
III.4.13	SASARAN 13.....	III-76
III.4.14	SASARAN 14.....	III-80
III.4.15	SASARAN 15.....	III-85
III.5	Realisasi Anggaran	III-98
III.6	Prestasi dan Penghargaan	III-103
BAB	IV. PENUTUP	IV-1

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

BAB I

Tabel 1.1.	PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014-2018.....	I-5
Tabel 1.2.	PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014-2018	I-6
Tabel 1.3.	Strukitur Perekonomian Kota Tangerang Berdasarkan Kelompok Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (Persen)	I-7
Tabel 1.4.	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2014 – 2018	I-7
Tabel 1.5.	PDRB Kota Tangerang Tahun 2014 – 2018	I-9
Tabel 1.6.	Perkembangan Inflasi Tahunan Tingkat Kota Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Periode 2014-2018	I-9
Tabel 1.7.	Komposisi Belanja Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)	I-10
Tabel 1.8.	Jumlah Penduduk, Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Tangerang Tahun 2018.....	I-11
Tabel 1.9.	Penduduk menurut Kelompok Usia dan Rasio Ketergantungan di Kota Tangerang.....	I-12
Tabel 1.10.	Perkembangan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tangerang.....	I-12
Tabel 1.11.	Indikator ketenagakerjaan Kota Tangerang tahun 2014 – 2018	I-14
Tabel 1.12.	Indikator IPM Kota Tangerang Tahun 2014-2018.....	I-17

BAB II

Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tangerang 2014-2018	II-5
Tabel 2.2.	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang	II-11
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2018	II-15

BAB III

Tabel 3.1.	Perkembangan Indikator Makro Kota Tangerang Tahun 2014-2018 ...	III-4
Tabel 3.2.	Perbandingan Indikator Makro Kota Tangerang dengan Provinsi Banten	III-4
Tabel 3.3.	Target dan Realisasi Indikator Makro Kota Tangerang Tahun 2018....	III-5
Tabel 3.4.	Komponen IPM Kota Tangerang Tahun 2014 – 2018.....	III-5
Tabel 1.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2014 – 2018	III-6
Tabel 3.5.	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Tangerang.....	III-7
Tabel 3.6.	Nilai IKM Kota Tangerang Tahun 2014-2018.....	III-10
Tabel 3.7.	Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Tangerang Tahun 2018	III-10
Tabel 3.8.	Ketercapaian Indikator Sasaran Terhadap Target Tahun 2018.....	III-12
Tabel 3.9.	Capaian Kinerja Sasaran 1	III-14
Tabel 3.10.	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang Tahun 2014-2018	III-15
Tabel 3.11.	Pendapatan Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018	III-19
Tabel 3.12.	Capaian Kinerja Sasaran 2	III-20
Tabel 3.13.	Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2007-2017	III-23
Tabel 3.14.	Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tangerang 2014-2018	III-26
Tabel 3.15.	Capaian Kinerja Sasaran 3	III-29
Tabel 3.16.	Capaian Kinerja Sasaran 4	III-31
Tabel 3.17.	Nilai Investasi di Kota Tangerang berdasarkan Izin Usaha Tahun 2014- 2018.....	III-32
Tabel 3.18.	Nilai Investasi di Kota Tangerang berdasarkan Izin Usaha selama Tahun 2018.....	III-32
Tabel 3.19.	Jumlah Perizinan Bidang Pembangunan.....	III-35
Tabel 3.20.	Jumlah Perizinan Bidang Pemerintahan dan Kesra	III-36
Tabel 3.21.	Jumlah Perizinan Bidang Penanaman Modal.....	III-38
Tabel 3.22.	Capaian Kinerja Sasaran 5	III-40
Tabel 3.23.	Realisasi Kunjungan Wisatawan Tahun 2018	III-41

Tabel 3.24.	Kunjungan Wisatawan Nusantara Ke Objek Wisata	III-42
Tabel 3.25.	Jumlah Pengunjung pada Event di Kota Tangerang	III-43
Tabel 3.26.	Jumlah Taman Tematik.....	III-43
Tabel 3.27.	Jumlah Hotel dan Kelas Hotel di Kota Tangerang.....	III-46
Tabel 3.28.	Capaian Kinerja Sasaran 6	III-47
Tabel 3.29.	Perkembangan Kontribusi Kategori Industri Pengolahan pada PDRB ADHB 2014 - 2018	III-47
Tabel 3.30.	Capaian Kinerja Sasaran 7	III-50
Tabel 3.31.	Capaian Kinerja Sasaran 8	III-55
Tabel 3.32.	Capaian Kinerja Sasaran 9	III-59
Tabel 3.33.	Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Tangerang.....	III-60
Tabel 3.34.	Perkembangan Jumlah PMKS per Kecamatan Tahun 2014-2018.....	III-61
Tabel 3.35.	Capaian Kinerja Sasaran 10	III-63
Tabel 3.36.	Capaian Kinerja Sasaran 11	III-65
Tabel 3.37.	Kejadian dan Penanganan Konflik di Kota Tangerang Tahun 2018....	III-67
Tabel 3.38.	Capaian Kinerja Sasaran 12	III-70
Tabel 3.39.	Titik dan Luas Banjir dan Genangan Tahun 2018	III-71
Tabel 3.40.	Tabulasi Data Titik Kemacetan yang Ditangani sampai dengan Tahun 2018.....	III-77
Tabel 3.41.	Baseline data sampai dengan tahun 2013 jumlah titik kemacetan yang tertangani sudah mencapai 50 titik kemacetan.....	III-77
Tabel 3.42.	Capaian Kinerja Sasaran 14	III-80
Tabel 3.43.	Jumlah Rumah Dan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Perkecamatan Tahun 2018	III-81
Tabel 3.44.	Luas Kawasan Kumuh Berat Tahun 2016-2018	III-81
Tabel 3.45.	RTLH dibangun Tahun 2018	III-83
Tabel 3.46.	Capaian Kinerja Sasaran 15	III-85
Tabel 3.47.	Hasil IPA Sungai Cisadane	III-88
Tabel 3.48.	Hasil IPA Sungai Mokevart	III-88
Tabel 3.49.	Hasil IPA Sungai Angke	III-88
Tabel 3.50.	Hasil IPA Sungai Sabi.....	III-88
Tabel 3.51.	Hasil IPA Sungai Cirarab.....	III-89

Tabel 3.52.	Hasil IPA Situ Cipondoh.....	III-89
Tabel 3.53.	Hasil IPA Situ Gede	III-89
Tabel 3.54.	Hasil IPA Situ Bulakan	III-89
Tabel 3.55.	Hasil IPA Situ Cangkring	III-90
Tabel 3.56.	Hasil Rekap IPA.....	III-90
Tabel 3.57.	Hasil Perhitungan Indeks Pencemaran Udara Tahun 2018.....	III-91
Tabel 3.58.	Hasil Perhitungan Indeks Tutupan Hutan (ITH) 2018.....	III-91
Tabel 3.59.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	III-92
Tabel 3.60.	Perbandingan IKLH Kota Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2014 - 2018	III-93
Tabel 3.61.	Rata-rata Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2018	III-97
Tabel 3.62.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2018	III-99
Tabel 3.63.	Komposisi Belanja Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018.....	III-99
Tabel 3.64.	Alokasi dan Realiasasi Anggaran berdasarkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2018.....	III-100

DAFTAR GAMBAR

BAB I

Gambar 1.1.	Peta Kota Tangerang.....	I-2
Gambar 1.2.	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2014 – 2018.....	I-8
Gambar 1.3.	Grafik Perkembangan Inflasi Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2014-2018.....	I-10
Gambar 1.4.	Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Kota Tangerang 2014-2018	I-14
Gambar 1.5.	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Tangerang Tahun 2014-2018	I-15
Gambar 1.6.	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Tangerang Tahun 2014-2018	I-16
Gambar 1.7.	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kota Tangerang Tahun 2014-2018	I-16

BAB III

Gambar 3.1.	Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang Tahun 2014 – 2018 dan Perbandingannya dengan Provinsi Banten dan Nasional	III-6
Gambar 3.2.	Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Tangerang dan Provinsi Banten 2014-2018	III-7
Gambar 3.3.	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kota Tangerang dan Provinsi Banten 2014-2018	III-8
Gambar 3.4.	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tangerang Tahun 2014-2018	III-9
Gambar 3.5.	Capaian IKU Kota Tangerang Tahun 2018	III-14
Gambar 3.6.	Capaian Nilai AKIP Kota Tangerang	III-26

Gambar 3.7.	Pertumbuhan Ekonomi kategori Industri Pengolahan pada PDRB ADHK Kota Tangerang 2014-2018.....	III-48
Gambar 3.8.	Perkembangan Indeks Pendidikan Kota Tangerang Tahun 2014-2018	III-51
Gambar 3.9.	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Tangerang Tahun 2014-2018	III-52
Gambar 3.10.	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kota Tangerang Tahun 2014-2018	III-53
Gambar 3.11.	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Tangerang Tahun 2014-2018	III-56
Gambar 3.12.	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Tangerang.....	III-59
Gambar 3.13.	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tangerang Tahun 2014-2018	III-64
Gambar 3.14.	Peta Rawan Konflik di Kota Tangerang	III-68
Gambar 3.15.	Grafik Luasan Banjir Dan Genangan 2014 – 2018 (Ha)	III-70
Gambar 3.16.	Peta Persebaran Titik Lokasi Banjir Dan Genangan Di Kota Tangerang Tahun 2018	III-71
Gambar 3.17.	Grafik Jumlah Lokasi Banjir Dan Genangan.....	III-72
Gambar 3.18.	Titik Kemacetan Tertangani Di Kota Tangerang Tahun 2018	III-76
Gambar 3.19.	Kawasan Kumuh Kota Tangerang	III-82
Gambar 3.20.	Jumlah RTLH Dibangun Per Tahun 2014-2018.....	III-84
Gambar 3.21.	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Tahun 2014-2018	III-93
Gambar 3.22.	Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018.....	III-100

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Kota Tangerang

Tahun 2018

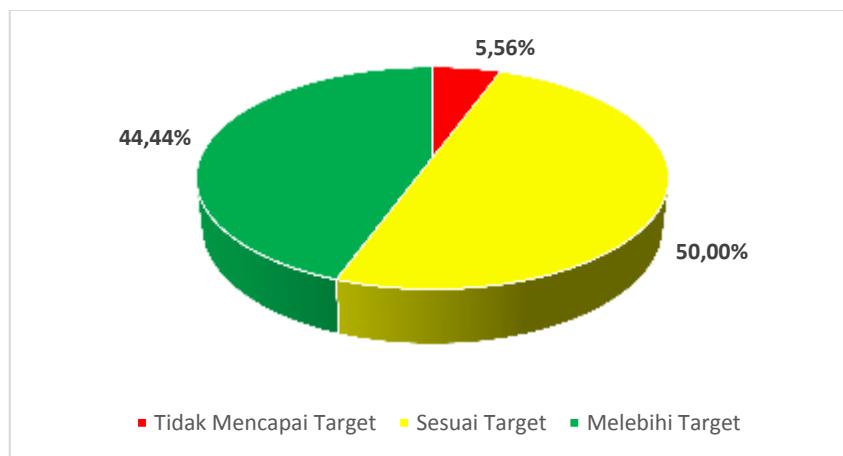
Pemerintah Kota Tangerang telah berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap SKPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2018 merupakan tahun terakhir dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018, dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 68 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja utama dapat digambarkan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran strategis Pemerintah Kota Tangerang, 8 indikator melebihi target (44,44%), 9 indikator sesuai target (50,00%), dan 1 indikator tidak mencapai target (5,56%).



Pada Tahun Anggaran 2018, pencapaian kinerja 15 (lima belas) sasaran strategis pada RPJMD Kota Tangerang termasuk 18 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Tangerang yang dilaksanakan pada Badan, Dinas dan Kantor serta Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.820.305.919.996,22 dengan realisasi anggaran mencapai Rp4.287.017.431.534,18 atau 88,94% (data sebelum dilakukan audit oleh BPK).

BAB I. PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dikatakan berhasil jika mampu mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dengan menerapkan penyelenggaraan *good governance* yang didukung dengan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Penyelenggaraan SAKIP didasarkan pada beberapa regulasi yaitu Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan LKIP Kota Tangerang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP Kota Tangerang Tahun 2018 mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2014-2018, Rencana Kinerja Tahun 2018, Perjanjian Kinerja Tahun 2018 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2018.

I.2 KONDISI KOTA TANGERANG

I.2.1 Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, wilayah Kota Tangerang terletak antara $6^{\circ}6'$ – $6^{\circ}13'$ Lintang Selatan (LS) dan $106^{\circ}36'$ – $106^{\circ}42'$ Bujur Timur (BT). Kota Tangerang berjarak ± 60 km dari Ibukota Provinsi Banten dan ± 27 km dari Ibukota Negara Republik Indonesia, DKI Jakarta. Pesatnya perkembangan Kota Tangerang didukung oleh tersedianya sistem jaringan transportasi terpadu dengan kawasan Jabodetabek, serta memiliki aksesibilitas yang baik terhadap simpul transportasi berskala nasional dan internasional, seperti



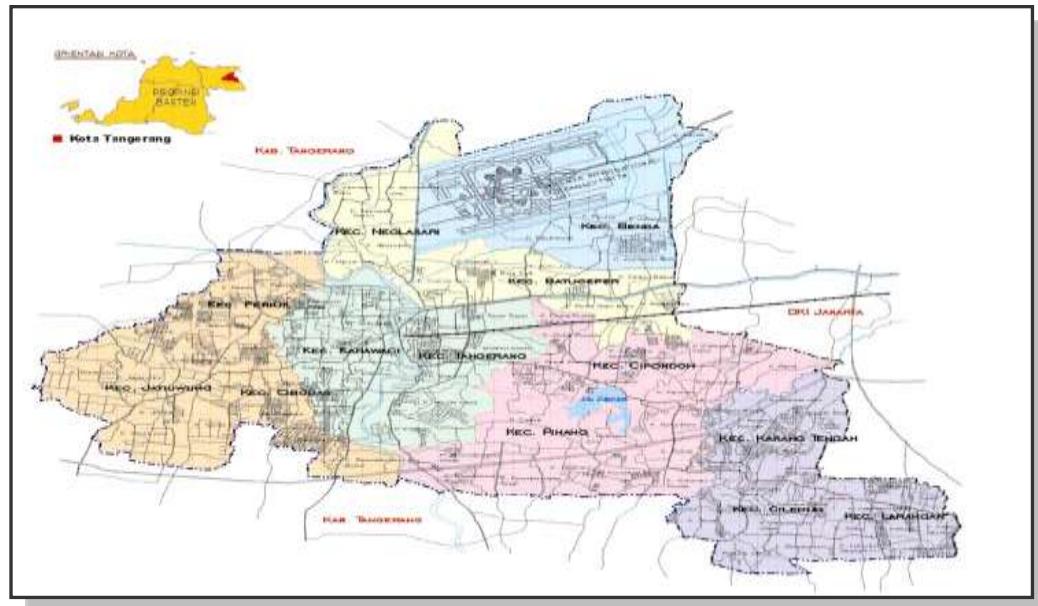
Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Pelabuhan Internasional Tanjung Priok, Pelabuhan Merak serta Pelabuhan Bojonegara. Letak geografis Kota Tangerang yang strategis tersebut telah mendorong pertumbuhan aktivitas industri, perdagangan dan jasa yang merupakan basis perekonomian Kota Tangerang saat ini.

I.2.2 Luas Dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kota Tangerang adalah 164,54 Km² (tidak termasuk luas Bandara Soekarno-Hatta sebesar 19,69 km²). Secara administrasi Kota Tangerang terdiri dari 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara* : Berbatasan dengan Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Kosambi dan Kecamatan Sepatan Timur di Kabupaten Tangerang;
- Sebelah Selatan* : Berbatasan dengan Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua di Kabupaten Tangerang serta Kecamatan Serpong Utara dan Kecamatan Pondok Aren di Kota Tangerang Selatan;
- Sebelah Barat* : Berbatasan dengan Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Cikupa di Kabupaten Tangerang; dan
- Sebelah Timur* : Berbatasan dengan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan di Provinsi DKI Jakarta.

Gambar 1.1. Peta Kota Tangerang



I.2.3 Kondisi Topografi

Wilayah Kota Tangerang rata-rata berada pada ketinggian 10 – 18 meter di atas permukaan laut. Bagian Utara memiliki rata-rata ketinggian 10 meter di atas permukaan



laut, sedangkan bagian Selatan memiliki ketinggian 18 meter di atas permukaan laut, seperti Kecamatan Ciledug, Kecamatan Larangan, dan Kecamatan Karang Tengah. Dilihat dari kemiringan tanahnya, sebagian besar Kota Tangerang mempunyai tingkat kemiringan tanah 0-3% dan hanya sebagian kecil di bagian Selatan kota kemiringan tanahnya antara 3-8%, yaitu berada di Kelurahan Parung Serab, Kelurahan Paninggilan Selatan dan Kelurahan Cipadu Jaya.

I.2.4 Aparat Pemerintah

Aparat Pemerintah Kota Tangerang pada tahun 2018 tercatat sejumlah 8.131 orang, yang terdiri dari:

a. Jenis Kelamin

Laki-laki : 3.401 orang

Perempuan : 4.730 orang

b. Golongan

Golongan I : 143 orang

Golongan II : 1.343 orang

Golongan III : 4.506 orang

Golongan IV : 2.139 orang

c. Jabatan Struktural yang terdiri dari :

Esselton II : 28 orang

Esselton III : 145 orang

Esselton IV : 989 orang

d. Jabatan fungsional yang terisi sebanyak 4.441 orang, terdiri atas :

1. Tenaga guru : 3.626 orang

2. Tenaga kesehatan : 609 orang

3. Analis Kepegawaian : 7 orang

4. Assessor SDM Aparatur : 6 orang

5. Auditor : 21 orang

6. P2UPD : 12 orang

7. Pengujji Kendaraan Bermotor : 5 orang

8. Perencana : 3 orang

9. Pranata Komputer : 20 orang

10. Widya swara : 2 orang

11. Pengawas Sekolah : 82 orang

12. Penilik : 28 orang



13. Arsiparis : 1 orang
14. Penera : 5 orang
15. Pengantar kerja : 1 orang
16. Polisi pamong praja : 4 orang
17. Pranata hubungan masyarakat : 9 orang

e. Tingkat Pendidikan :

SD	: 105 orang
SMP	: 137 orang
SLTA	: 1.063 orang
D1	: 47 orang
D2	: 377 orang
D3	: 529 orang
D4	: 93 orang
S1	: 4.987 orang
S2	: 783 orang
S3	: 10 orang

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Aparat Pemerintah Kota Tangerang telah dilakukan dengan berbagai program melalui pemberian penghargaan, pendidikan, pelatihan teknis umum dan fungsional serta pemberian hukuman dan pembinaan.

a. Pemberian penghargaan

- 1) Satyalancana dengan masa kerja 10, 20 tahun dan 30 tahun sejumlah 875 orang, yang terdiri dari :
 - ⇒ Satyalancana Karya Satya 30 Tahun : 258 orang.
 - ⇒ Satyalancana Karya Satya 20 Tahun : 159 orang.
 - ⇒ Satyalancana Karya Satya 10 Tahun : 458 orang.
- 2) Pemberian Penghargaan Kenaikan Pangkat sejumlah 1.347 orang
- 3) Pemberian penghargaan Purna Tugas : 324 orang.

b. Pendidikan Pelatihan yang meliputi :

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan : 8 orang.
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan : 86 orang, terdiri dari :
 - ⇒ Diklatpim II : 0 orang.
 - ⇒ Diklatpim III : 6 orang.



⇒ Diklatpin IV : 80 Orang.

- 3) Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional melalui pengiriman pada lembaga pendidikan dan pelatihan : 1.552 orang, dengan rincian :

⇒ Pendidikan dan pelatihan teknis : 861 orang.

⇒ Pendidikan dan pelatihan fungsional : 691 orang.

c. Pemberian Hukuman

Pelanggaran Disiplin Pegawai sebanyak 6 orang yang terdiri dari Pelanggaran disiplin pegawai tingkat ringan tidak ada, tingkat sedang tidak ada dan pelanggaran disiplin tingkat berat sebanyak 6 orang.

I.2.5 Perekonomian

I.2.5.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah, yang dapat menggambarkan perkembangan ekonomi suatu daerah. Nilai dan kontribusi sektoral (lapangan usaha) PDRB Kota Tangerang tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1. PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014-2018

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018*)
	RpMilyar	RpMilyar	RpMilyar	RpMilyar	RpMilyar
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.533,55	1.736,20	1.904,57	2.093,73	2.291,69
B. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Industri Pengolahan	37.463,77	40.120,08	42.042,94	45.215,37	46.330,35
D. Pengadaan Listrik dan Gas	182,94	250,35	252,28	297,04	312,25
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	66,64	73,74	79,90	88,35	87,74
F. Konstruksi	7.855,12	8.643,22	9.311,99	10.189,12	11.281,69
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.379,28	13.099,18	13.640,06	14.645,06	14.591,91
H. Transportasi dan Pergudangan	28.532,18	36.392,10	42.074,00	46.694,07	55.680,89
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.499,67	1.691,12	1.856,16	2.059,78	2.226,14
J. Informasi dan Komunikasi	5.098,71	5.476,81	5.957,41	6.851,70	6.558,30
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.764,58	3.083,52	3.589,27	3.887,23	4.372,06
L. Real Estat	5.532,65	6.159,24	6.742,55	7.775,00	7.753,38
M,N. Jasa Perusahaan	1.045,63	1.216,57	1.336,02	1.534,06	1.647,28



Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018*)
	RpMilyar	RpMilyar	RpMilyar	RpMilyar	RpMilyar
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.254,78	1.443,11	1.581,52	1.716,40	1.919,29
P. Jasa Pendidikan	2.348,91	2.593,17	2.829,53	3.149,84	3.331,34
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	927,29	1.002,63	1.088,20	1.213,18	1.277,08
R,S,T,U. Jasa lainnya	1.470,37	1.669,81	1.808,12	2.010,45	2.165,72
PDRB ADHB Kota Tangerang	109.956,07	124.650,85	136.094,52	149.420,38	161.827,09

Sumber: BPS Kota Tangerang, 2018, *) diolah

Tabel 1.2. PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014-2018

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018*)
	RpMilyar	RpMilyar	RpMilyar	RpMilyar	RpMilyar
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.204,68	1.290,04	1.364,52	1.459,44	1.546,64
B. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Industri Pengolahan	34.007,79	35.049,96	36.045,90	37.385,84	38.830,48
D. Pengadaan Listrik dan Gas	158,71	157,08	164,01	175,17	182,98
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	66,99	70,48	75,39	81,45	86,14
F. Konstruksi	5.938,31	6.456,08	6.850,60	7.309,90	7.978,34
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.449,94	11.921,93	12.321,32	12.930,42	13.780,91
H. Transportasi dan Pergudangan	13.133,40	14.130,19	15.233,68	16.553,89	17.778,91
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.208,70	1.294,18	1.402,83	1.527,64	1.640,53
J. Informasi dan Komunikasi	6.083,28	6.666,41	7.243,73	7.912,81	8.806,69
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.228,70	2.409,29	2.722,27	2.801,49	3.039,56
L. Real Estat	5.312,63	5.615,61	6.051,16	6.542,00	7.017,95
M,N. Jasa Perusahaan	850,92	910,62	974,99	1.044,92	1.114,69
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	919,49	984,14	1.057,38	1.112,19	1.166,40
P. Jasa Pendidikan	1.769,86	1.891,04	2.028,28	2.179,66	2.309,66
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	767,46	796,83	847,99	916,19	971,24
R,S,T,U. Jasa lainnya	1.082,67	1.163,71	1.247,11	1.347,28	1.434,15
PDRB ADHK Kota Tangerang	86.183,53	90.807,59	95.631,16	101.280,29	107.685,30

Sumber: BPS Kota Tangerang, 2018, *) diolah

Selama periode 2014-2018, perekonomian Kota Tangerang telah beraser dari kelompok lapangan usaha sekunder ke kelompok lapangan usaha tersier yang terlihat dari kenaikan/penurunan peranan masing-masing kelompok lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Tangerang.



Pada tahun 2014, kelompok lapangan usaha sekunder memberikan sumbangan sebesar 41,44 persen, kemudian tahun 2018, menurun menjadi 35,85 persen. Sedangkan peningkatan kelompok lapangan usaha tersier, yang semula pada tahun 2014 berperan sebesar 57,16 persen, meningkat menjadi 62,74 persen pada tahun 2018. Kelompok lapangan usaha yang paling kecil peranannya dalam perekonomian Kota Tangerang adalah kelompok lapangan usaha primer.

Tabel 1.3. Strukitur Perekonomian Kota Tangerang Berdasarkan Kelompok Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (Persen)

Kelompok	2014	2015	2016	2017	2018*)
Primer	1,39	1,39	1,40	1,40	1,42
Sekunder	41,44	39,38	37,98	37,34	35,85
Tersier	57,16	59,23	60,62	61,26	62,74
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Tangerang, 2018, *) diolah

I.2.5.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Pada tahun 2018 perekonomian Kota Tangerang mengalami percepatan dibandingkan dengan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini terlihat dari laju pertumbuhan PDRB Kota Tangerang tahun 2018 sebesar 6,32 persen, sedangkan tahun 2014 sampai dengan 2017 pertumbuhannya masih dibawah 6 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 11,30 persen. Seluruh lapangan usaha ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2018 mencatat pertumbuhan yang positif.

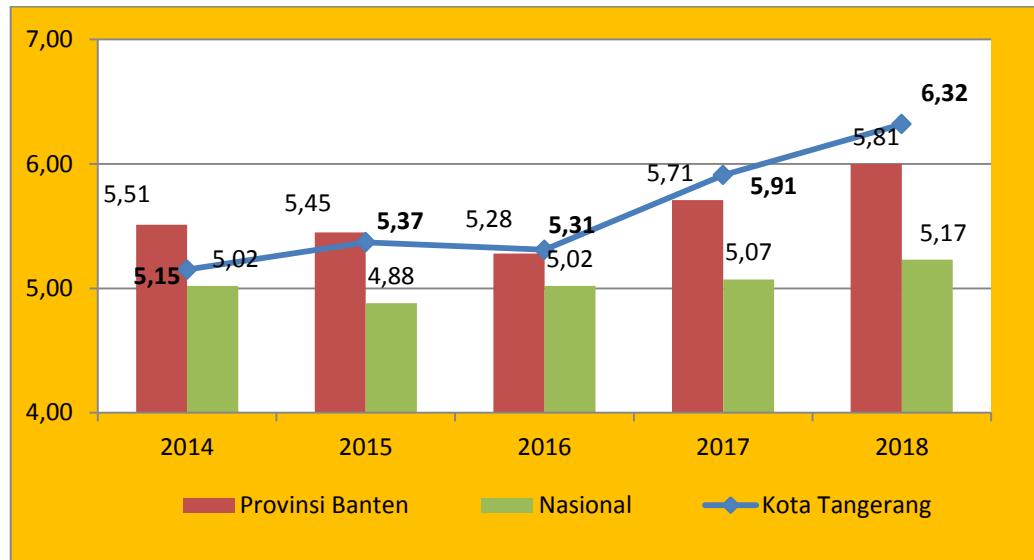
Tabel 1.4. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2014 – 2018

Tahun	LPE (%)		
	Kota Tangerang	Provinsi Banten	Nasional
2014	5,15	5,51	5,02
2015	5,37	5,40	4,88
2016	5,31	5,26	5,02
2017	5,91	5,71	5,07
2018 *)	6,32	5,81	5,17

Sumber: BPS, 2018, *) proyeksi



Gambar 1.2. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2014 – 2018



Sumber: BPS Kota Tangerang, Banten dan Pusat

Selama periode 2016-2018, laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Banten dan Tingkat Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi makro secara regional Banten dan Nasional.

Secara umum, pertumbuhan ekonominya cukup stabil terhadap gangguan/guncangan eksternal, baik dalam tataran global ataupun domestik. Pada tahun 2018, di tengah masih melemahnya perekonomian global dan domestik, Kota Tangerang tetap dapat mempertahankan LPE-nya di atas Provinsi Banten dan Nasional. Relatif stabilnya iklim perekonomian Kota Tangerang selama ini harus tetap dijaga dan dipelihara oleh semua pemangku kepentingan agar dapat mempertahankan laju pertumbuhan yang tinggi.

I.2.5.3 PDRB per Kapita

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2018, secara agregat PDRB per kapita Kota Tangerang mencapai 75 juta rupiah, meningkat 7,64 persen bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar 69,83 juta rupiah. Peningkatan tersebut tidak sebesar dengan peningkatan pada tahun sebelumnya, selama periode 2014-2015 berturut-turut sebesar 13,52 persen dan 10,77 persen.



Tabel 1.5. PDRB Kota Tangerang Tahun 2014 – 2018

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018*)
PDRB per Kapita (Juta Rp)	54,98	60,89	65,00	69,83	75,16
Indeks Perkembangan PDRB per Kapita (2010=100)	148,58	164,55	175,66	188,70	203,14
Pertumbuhan PDRB per Kapita	13,52	10,75	6,75	7,42	7,64

Sumber: BPS Kota Tangerang, 2018, *) diolah

I.2.5.4 Inflasi

Kota Tangerang selama periode 2014-2018 cenderung dapat mengendalikan tingkat inflasi tiap tahunnya. Pada tahun 2014, berada pada dua digit (10,03%), pada tahun selanjutnya 2015 sampai dengan 2018 Kota Tangerang dapat mengendalikan inflasi pada posisi satu digit, bahkan tingkat inflasi dibawah 5%. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks selama tahun 2018, berturut-turut adalah Kelompok kesehatan sebesar 6,68%, kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga sebesar 4,71 persen, kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar sebesar 4,18 persen, kelompok Sandang sebesar 4,13 persen, kelompok Transpor, komunikasi & Jasa Keuangan sebesar 3,43 persen, kelompok Bahan Makanan sebesar 2,50 persen dan kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 1,98 persen. Adapun komoditas dari kelompok kesehatan yang dominan memberikan andil inflasi di Kota Tangerang tahun 2018 adalah tarif rumah sakit, check up dan dokter umum. Sedangkan komoditas dari kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga yang dominan memberikan andil inflasi tahun 2018 adalah kursus-kursus/pelatihan, olahraga dan perlengkapan/peralatan pendidikan.

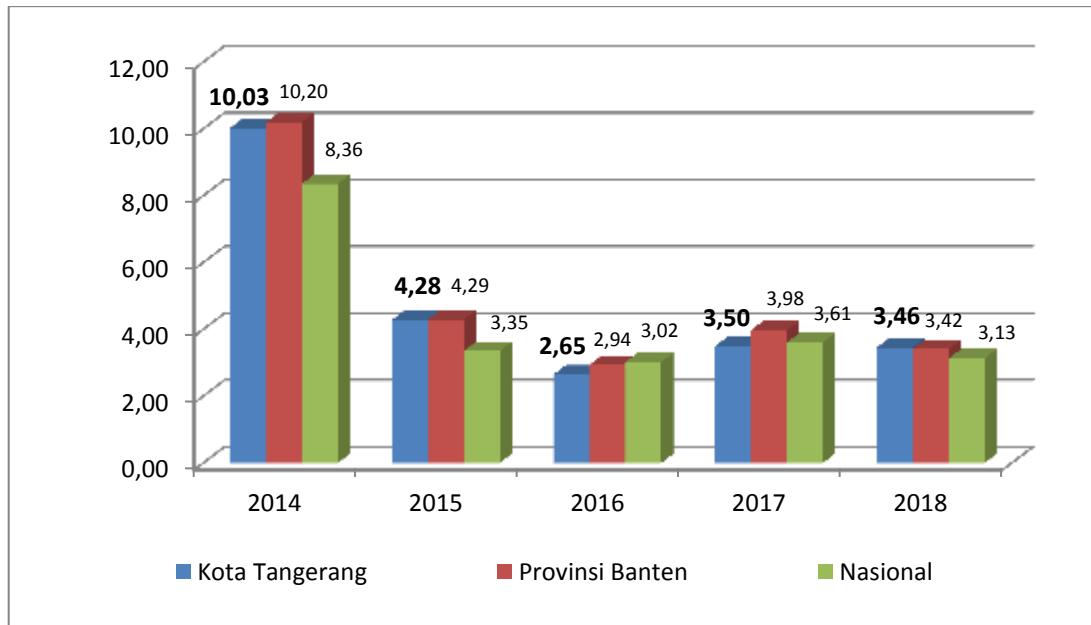
Tabel 1.6. Perkembangan Inflasi Tahunan Tingkat Kota Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Periode 2014-2018

Tahun	Inflasi (%)		
	Kota Tangerang	Provinsi Banten	Nasional
2014	10,03	10,20	8,36
2015	4,28	4,29	3,35
2016	2,65	2,94	3,02
2017	3,50	3,98	3,61
2018	3,46	3,42	3,13

Sumber: BPS RI dan Provinsi Banten, 2018



Gambar 1.3. Grafik Perkembangan Inflasi Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2014-2018



Sumber: BPS RI dan Provinsi Banten, 2018

I.2.6 Bidang Keuangan Daerah

Belanja daerah Pemerintah Kota Tangerang pada tahun anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp4.491.146.524.148,69 dengan komposisi 29,92% belanja tidak langsung dan 70,08% belanja langsung sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.7. Komposisi Belanja Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

NO.	URAIAN	ANGGARAN BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	KOMPOSISI	
				ANGGARAN (%)	REALISASI (%)
1	Belanja Tidak Langsung	1.532.215.015.289,42	1.431.475.914.993,00	29,92	33,39
2	Belanja Langsung	3.288.090.904.706,80	2.855.541.516.541,18	70,08	66,61
	Jumlah	4.820.305.919.996,22	4.287.017.431.534,18	100,00	100,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2019



I.2.7 Bidang Sosial Budaya

I.2.7.1 Penduduk

Jumlah Penduduk Kota Tangerang tahun 2018 diproyeksi berjumlah 2.185.304 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 104,10 artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki. Sedangkan komposisinya masih sama seperti tahun sebelumnya didominasi oleh penduduk usia produktif dengan rasio beban ketergantungan sebesar 37,84 atau setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung kurang lebih 38 penduduk usia non produktif.

Sebagai daerah yang berdekatan dengan Ibu Kota Negara, Kota Tangerang dikatakan daerah cukup padat, setiap kilometer persegi dihuni oleh 13.280 jiwa di mana Kecamatan Ciledug merupakan kecamatan terpadat dengan penghuni 21.2872 jiwa untuk setiap kilometer persegiya, dan Kecamatan Neglasari merupakan kecamatan yang paling rendah tingkat kepadatannya dengan penghuni : 7.542 jiwa untuk setiap kilometer persegiya.

Tabel 1.8. Jumlah Penduduk, Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Tangerang Tahun 2018

No.	Kecamatan	Penduduk			Sex Ratio	Luas (km2)	Kepadatan/km2
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah			
1	Ciledug	97.219	94.595	191.814	102,77	8,77	21.872
2	Larangan	102.962	99.622	202.584	103,35	9,40	21.551
3	Karang Tengah	72.675	70.854	143.529	102,57	10,47	13.709
4	Cipondoh	149.179	145.410	294.589	102,59	17,91	16.448
5	Pinang	104.072	100.777	204.849	103,27	21,59	9.488
6	Tangerang	94.469	89.673	184.142	105,35	15,79	11.662
7	Karawaci	96.158	94.784	190.942	101,45	13,48	14.165
8	Jatiuwung	67.573	61.841	129.414	109,27	14,41	8.981
9	Cibodas	82.223	79.707	161.930	103,16	9,61	16.850
10	Periuk	77.944	74.467	152.411	104,67	9,54	15.976
11	Batu Ceper	54.546	51.146	105.692	106,65	11,58	9.127
12	Neglasari	62.720	58.556	121.276	107,11	16,08	7.542
13	Benda	52.873	49.259	102.132	107,34	5,92	17.252
		Kota Tangerang	1.114.613	1.070.691	2.185.304	104,10	164,55*
							13.280

Sumber: BPS Provinsi Banten (Proyeksi Penduduk Banten 2010-2020) (diolah)

* Tidak termasuk luas Bandara Soekarno Hatta 19,69km²



Tabel 1.9. Penduduk menurut Kelompok Usia dan Rasio Ketergantungan di Kota Tangerang

No.	Kelompok Umur	Jumlah (jiwa)				
		2014	2015	2016	2017	2018*
1	0-4	203.469	205.159	193.447	205.207	204.872
2	5-9	168.032	173.346	173.310	183.992	188.086
3	10-14	139.634	141.040	142.437	146.016	149.760
4	15-19	162.772	163.261	169.376	163.669	163.726
5	20-24	197.659	198.183	199.819	200.293	201.482
6	25-29	219.226	221.650	223.192	225.388	226.498
7	30-34	211.657	214.543	222.437	219.766	221.788
8	35-39	179.706	184.722	191.389	193.053	196.986
9	40-44	152.096	157.473	164.667	168.186	173.269
10	45-49	122.929	129.021	136.303	141.304	147.335
11	50-54	94.272	99.991	105.949	111.528	117.636
12	55-59	68.050	72.814	79.147	83.217	88.421
13	60-64	35.177	38.111	40.838	44.557	48.223
14	65-69	20.593	22.116	24.230	25.325	27.290
15	70+	24.622	25.675	27.165	28.390	29.932
	Jumlah	1.999.894	2.047.105	2.093.706	2.139.891	2.185.304
	Rasio Ketergantungan	38,54	38,34	36,57	37,97	37,84

Sumber: BPS Kota Tangerang, *) Proyeksi Penduduk Banten 2010-2020

Tabel 1.10. Perkembangan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tangerang

No.	Kecamatan	Jumlah (jiwa)					LPP (%)
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Ciledug	173.265	179.824	186.450	192.391	191.814	3,00
2	Larangan	184.977	189.955	194.870	198.950	202.584	2,38
3	Karang Tengah	131.591	134.589	137.510	139.810	143.529	2,15
4	Cipondoh	262.350	274.201	290.783	302.972	294.589	3,49
5	Pinang	185.785	192.061	198.354	203.868	204.849	2,77
6	Tangerang	168.844	172.665	176.397	179.335	184.142	2,14
7	Karawaci	177.907	178.989	179.891	179.914	190.942	1,21
8	Jatiuwung	121.420	121.493	117.043	124.066	129.414	0,82
9	Cibodas	150.320	151.815	153.163	153.768	161.930	1,43
10	Periuk	140.503	142.911	145.206	146.820	152.411	1,84
11	Batu Ceper	97.634	99.107	100.489	101.386	105.692	1,73
12	Neglasari	111.930	113.719	115.412	116.552	121.276	1,78
13	Benda	93.368	95.776	98.138	100.059	102.132	2,33
	Kota Tangerang	1.999.894	2.047.105	2.093.706	2.139.891	2.185.304	2,19

Sumber: BPS Kota Tangerang, *) Proyeksi Penduduk Banten 2010-2020



Perkembangan jumlah penduduk Kota Tangerang selama periode 2014-2018 cukup mengalami peningkatan yang signifikan. Jika pada tahun 2014 jumlah penduduk Kota Tangerang berjumlah 1.999.894 jiwa, kemudian mengalami peningkatan menjadi : 2.047.105 jiwa pada tahun 2015, atau mengalami perlambatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,62%. Pada tahun 2016, jumlah penduduk bertambah menjadi sebesar 2.093.706 jiwa, atau dengan laju pertumbuhan penduduk melambat menjadi 2,56%. Dan pada tahun 2017, jumlah penduduk bertambah menjadi 2.139.891 jiwa, atau dengan laju pertumbuhan penduduk melambat menjadi 2,16%. Dan pada tahun 2018, jumlah penduduk bertambah menjadi 2.185.304 jiwa, atau dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,19%.

I.2.7.2 Tenaga Kerja

Situasi ketenagakerjaan di Kota Tangerang selama lima tahun terakhir menunjukkan angka yang fluktuatif, walaupun tidak terjadi di semua indikator ketenagakerjaan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), yaitu dari 64,64 persen tahun 2014, kemudian naik menjadi 64,99 persen tahun 2017. Namun, menurun menjadi 63,68 persen pada tahun 2018. TPAK merupakan indikator kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif untuk mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan ekonomi.

Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Kota Tangerang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014, jumlah penduduk usia kerja di Kota Tangerang sebesar 1,49 juta orang, kemudian meningkat menjadi 1,65 juta orang pada tahun 2018. Kondisi ini menggambarkan bahwa setiap tahunnya jumlah penduduk yang siap bekerja semakin bertambah di Kota Tangerang.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kota Tangerang pada tahun 2014 sebesar 92,19 persen dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 92,59 persen. Peningkatan laju TKK di tahun 2018 diikuti dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu dari 7,81 persen pada tahun 2014 menjadi 7,41 persen pada tahun 2018. Namun, meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar 7,16 persen.

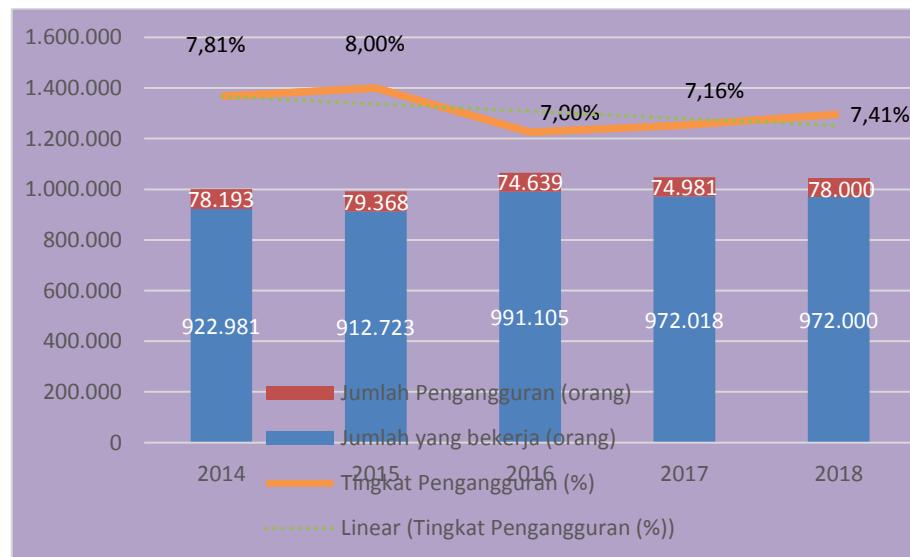


Tabel 1.11. Indikator ketenagakerjaan Kota Tangerang tahun 2014 – 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Usia Kerja (orang)	1.494.299	1.533.913	1.584.512	1.611.064	1.648.869
Angkatan Kerja (orang)	1.011.174	992.981	1.065.744	1.046.999	1.050.000
Jumlah yang bekerja (orang)	922.981	912.723	991.105	972.018	972.000
Jumlah Pengangguran (orang)	78.193	79.368	74.639	74.981	78.000
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK (persen)	64,64	64,68	67,26	64,99	63,68
Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (persen)	7,81	8,00	7,00	7,16	7,41
Tingkat Kesempatan Kerja/TKK (persen)	92,19	92,00	93,00	92,84	92,59

Sumber: BPS Banten dan Kota Tangerang

Gambar 1.4. Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Kota Tangerang 2014-2018



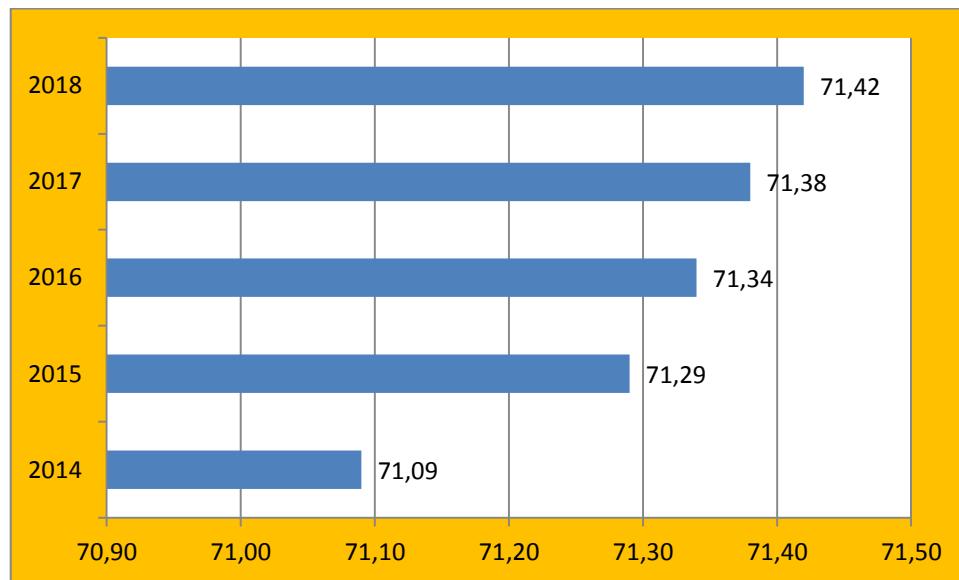
Sumber: BPS Kota Tangerang, 2018

I.2.7.3 Kesehatan

Derajat kesehatan pada dasarnya dapat dilihat dari angka lama harapan hidup. Semakin tinggi angka lama harapan hidup yang mampu dicapai merefleksikan semakin tinggi pula derajat kesehatannya.



Gambar 1.5. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Tangerang Tahun 2014-2018



Sumber: BPS Kota Tangerang, 2018

Angka Harapan Hidup penduduk Kota Tangerang pada Tahun 2014 sebesar 71,09 tahun dan pada Tahun 2018 meningkat menjadi 71,42 tahun. Hal ini berarti menunjukkan penambahan sebesar 0,33 tahun atau terjadi peningkatan sebesar 0,46%.

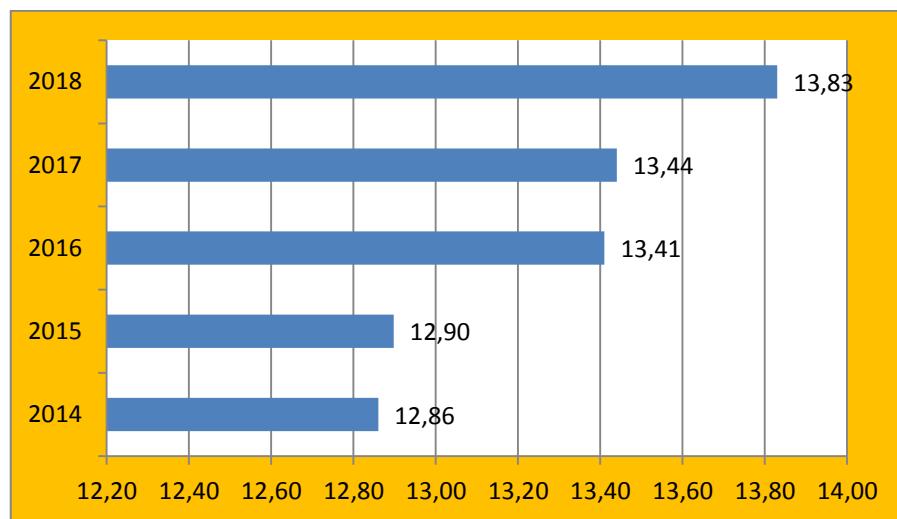
I.2.7.4 Pendidikan

Untuk mengukur dimensi pengetahuan atau pencapaian pendidikan penduduk suatu daerah digunakan dua indikator, yakni harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Informasi mengenai harapan lama sekolah, mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dan perluasan kesempatan dalam bidang pendidikan di suatu wilayah. Adapun rata-rata lama sekolah dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia yang diukur dalam aspek pendidikan. Semakin lama rata-rata tahun pendidikan penduduk di suatu wilayah, akan semakin tinggi pula mutu sumber daya manusianya.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Tangerang pada tahun 2014 sebesar 12,86 tahun dan tahun 2018 meningkat menjadi 13,83 tahun, yang artinya setiap penduduk yang berusia 7 tahun pada tahun 2018 dapat berharap untuk bersekolah selama 13 tahun lebih, atau sampai dengan kuliah semester I.



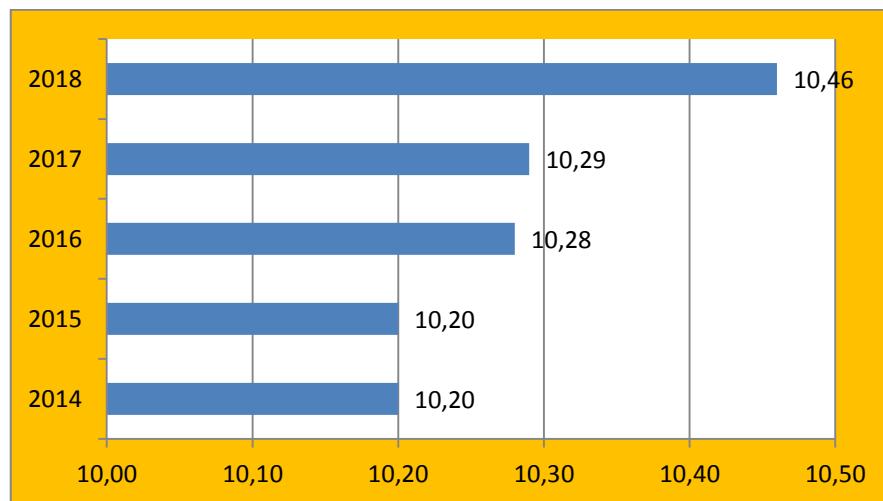
Gambar 1.6. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Tangerang Tahun 2014-2018



Sumber: BPS Kota Tangerang

Rata-rata Lama Sekolah Kota Tangerang selama periode 2014-2018 terus mengalami peningkatan. Peningkatannya ini jelas menjadi penanda bahwa kualitas pendidikan penduduk Kota Tangerang secara rata-rata telah meningkat. Dengan demikian, semakin terbuka peluang bagi penduduk Kota Tangerang untuk lebih meningkatkan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraannya.

Gambar 1.7. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kota Tangerang Tahun 2014-2018



Sumber: BPS Kota Tangerang



I.2.7.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan daerah di Kota Tangerang diorientasikan untuk pembangunan manusia, dengan maksud agar semua masyarakat Kota Tangerang memiliki kesejahteraan yang lebih baik. Hasil upaya tersebut dapat tergambaran didalam perolehan Indeks Pembangunan Manusia sebagai berikut:

Tabel 1.12. Indikator IPM Kota Tangerang Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Komponen IPM						
1	Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,09	71,29	71,34	71,38	71,42
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,86	12,90	13,41	13,44	13,83
3	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	10,20	10,20	10,28	10,29	10,46
4	Pengeluaran per Kapita (Ribu Rp)	13.671	13.766	13.911	14.104	14.283
Indikator IPM						
1	Indeks Kesehatan	78,60	78,91	78,98	79,05	79,11
2	Indeks Pendidikan	69,72	69,83	71,52	71,63	73,28
3	Indeks Pengeluaran	79,69	79,90	80,22	80,64	81,03
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		75,87	76,08	76,81	77,01	77,71

Sumber: BPS Kota Tangerang, 2018

Perkembangan IPM Kota Tangerang selama ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2014 IPM Kota Tangerang sebesar 75,87, pada tahun 2015 meningkat menjadi 76,08, pada tahun 2016 meningkat menjadi 76,81 poin, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 77,01 poin, serta pada tahun 2018 diperkirakan meningkat lagi menjadi 77,71 poin. Hal ini berarti menunjukkan penambahan sebesar 1,84 poin atau terjadi peningkatan sebesar 2,42%.

I.3 KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN TUGAS POKOK SERTA STRUKTUR ORGANISASI

I.3.1 Kedudukan

Pemberlakuan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menekankan aspek desentralisasi yang diberikan dalam wujud otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Berkaitan dengan otonomi daerah dalam pelaksanaannya di Kota Tangerang dapat dijelaskan melalui 2 (dua) aspek, yaitu:



I.3.1.1 Aspek Politik

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kota Tangerang dari aspek politik ditandai dengan program legislatif dalam membahas perubahan atas peraturan tentang struktur organisasi dan tata kerja dan kegiatan partai politik tingkat daerah dan DPRD sebagai mitra pemerintah daerah.

I.3.1.2 Aspek Administrasi/ Manajemen Pemerintah

Pemerintah Kota Tangerang dalam melaksanakan otonomi daerah secara administratif diawali dengan melakukan identifikasi kewenangan pemerintah daerah, penataan kelembagaan, penempatan personil, pengelolaan sumber keuangan daerah, pengelolaan sarana dan prasarana (aset daerah), dan manajemen pelayanan publik

I.3.2 Kewenangan

Kota Tangerang sebagai daerah otonomi, kewenangannya mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang meliputi kebijakan perencanaan nasional, pengendalian secara makro, perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis serta konservasi dan standarisasi nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Tangerang menyelenggarakan 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan 5 (lima) urusan pilihan untuk menyelenggarakan pengembangan sektor unggulan, serta menyelenggarakan Unsur penunjang Urusan Pemerintahan.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar:

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- 4) Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
- 5) Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
- 6) Sosial.



Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar:

- 1) Tenaga Kerja;
- 2) Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- 3) Pangan;
- 4) Pertanahan;
- 5) Lingkungan Hidup;
- 6) Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- 7) Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- 8) Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- 9) Perhubungan;
- 10) Komunikasi Dan Informatika;
- 11) Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah;
- 12) Penanaman Modal;
- 13) Kepemudaan Dan Olah Raga;
- 14) Statistik;
- 15) Persandian;
- 16) Kebudayaan;
- 17) Perpustakaan; Dan
- 18) Kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan:

- 1) Pertanian;
- 2) Pariwisata;
- 3) Kelautan Dan Perikanan;
- 4) Perdagangan; dan
- 5) Perindustrian.

Unsur penunjang Urusan Pemerintahan

- 1) Perencanaan;
- 2) Keuangan;
- 3) Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan; dan
- 4) Penelitian Dan Pengembangan.



I.3.3 Tugas Pokok

Pemerintah Kota Tangerang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud masyarakat Kota Tangerang yang maju, mandiri, dinamis, dan sejahtera, yang berakhlakul karimah.

I.3.4 Struktur Organisasi

Kota Tangerang sebagai salah satu daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Banten, secara yuridis formil didasarkan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

Pada Tahun 2016 telah dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang mengatur tentang pembentukan dan struktur organisasi serta tugas, pokok dan fungsi dari SKPD di Pemerintah Kota Tangerang. Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tersebut menjadi dasar pembentukan dan struktur organisasi, serta kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta rincian tugas SKPD. Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 terdiri atas:

A. Walikota dan Wakil Walikota

Kepala Daerah Kota Tangerang Periode Tahun 2013 – 2018 dipimpin oleh Walikota H. Arief R. Wismansyah dan Wakil Walikota H. Sachrudin.

Perangkat Daerah Kota Tangerang terdiri atas:

B. Sekretariat Daerah

C. Sekretariat DPRD

D. Inspektorat

E. Dinas Daerah, terdiri dari:

- 1) Dinas Pendidikan
- 2) Dinas Kesehatan
- 3) Dinas Pekerjaan Umum
- 4) Dinas Perumahan dan Permukiman
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja
- 6) Dinas Sosial
- 7) Dinas Ketenagakerjaan
- 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 9) Dinas Ketahanan Pangan



- 10) Dinas Pertanahan
- 11) Dinas Lingkungan Hidup
- 12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 13) Dinas Perhubungan
- 14) Dinas Komunikasi dan Informatika
- 15) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 16) Dinas Koperasi dan UKM
- 17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 18) Dinas Pemuda dan Olahraga
- 19) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 20) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

F. Badan, terdiri dari:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2) Badan Pengelola Keuangan Daerah
- 3) Badan Pendapatan Daerah
- 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

G. Perangkat Daerah lain, terdiri dari

- 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 2) Rumah Sakit Umum Daerah
- 3) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

H. Kecamatan dan Kelurahan, terdiri dari:

- 1) Tangerang dengan 8 Kelurahan
- 2) Jatiuwung dengan 6 Kelurahan
- 3) Batuceper dengan 7 Kelurahan
- 4) Benda dengan 5 Kelurahan
- 5) Cipondoh dengan 10 Kelurahan
- 6) Ciledug dengan 8 Kelurahan
- 7) Karawaci dengan 16 Kelurahan
- 8) Periuk dengan 5 Kelurahan
- 9) Cibodas dengan 6 Kelurahan
- 10) Neglasari dengan 7 Kelurahan
- 11) Pinang dengan 11 Kelurahan
- 12) Karang Tengah dengan 7 Kelurahan, dan
- 13) Larangan dengan 8 Kelurahan.



I.4 SISTEMATIKA LKIP 2018

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Pemerintah Kota Tangerang selama Tahun 2018. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Tangerang Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF, pada bagian ini menyajikan tujuan dan sasaran utama yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis maupun penetapan kinerja yang berpedoman pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2014-2018, serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan hal-hal umum tentang organisasi,dasar hukum terbentuknya organisasi, tujuan terbentuknya organisasi, aspek strategis organisasi serta uraian singkat mandat apa yang dibebankan kepada organisasi (gambaran umum tupoksi) serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi dan potensi organisasi yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan organisasi.

Bab II – Perencanaan Kinerja, Pada bab ini menyajikan gambaran singkat mengenai: Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2014-2018 dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Pada awal bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran utama (yang menggambarkan fungsi utama organisasi) yang ingin diraih organisasi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi organisasi.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menyajikan uraian

A. Capaian Kinerja Organisasi



Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kota Tangerang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis/pembangunan daerah sesuai dengan hasil pengukuran organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi/penyerapan anggaran organisasi/OPD yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Pemerintah Kota Tangerang sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Bab IV – Penutup, menyajikan simpulan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa/tahun mendatang.

Lampiran – Lampiran, penjelasan lebih lanjut yang tidak diuraikan dalam badan teks laporan.



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

II.1 RENCANA STRATEGIS

Pada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, melalui pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan rencana strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan untuk lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

II.2 VISI

Merujuk kondisi Kota Tangerang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang serta berpedoman pada Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tangerang Tahun 2005-2025 yaitu: “Kota Industri, Perdagangan Dan Jasa Yang Maju Dan Lestari Berlandaskan Akhlakul Karimah”, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Tangerang periode 2014-2018 mempunyai visi:

**“TERWUJUDNYA KOTA TANGERANG YANG MAJU, MANDIRI,
DINAMIS, DAN SEJAHTERA, DENGAN MASYARAKAT YANG
BERAKHLAKUL KARIMAH”**

Pernyataan visi di atas mempunyai makna sebagai berikut:



Terwujudnya Kota Tangerang Yang Maju

Terwujudnya Kota Tangerang yang maju dalam berbagai hal, melalui pemberian pelayanan terbaik dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan tata kelola perkotaan yang berorientasi lingkungan.

Terwujudnya Kota Tangerang Yang Mandiri

Terwujudnya Kota Tangerang yang mandiri, melalui pembangunan yang dilakukan dengan memaksimalkan segenap potensi daerah yang dimiliki untuk mendorong tumbuhnya rasa percaya diri pada segenap masyarakat dan seluruh stakeholder untuk bersama-sama dan ikut bertanggung jawab dalam kelangsungan pembangunan daerah.

Terwujudnya Kota Tangerang Yang Dinamis

Terwujudnya Kota Tangerang yang dinamis yaitu kehidupan yang berkesinambungan dengan mengikuti era perkembangan jaman dengan tetap menjaga mencerminkan kehidupan masyarakat Kota Tangerang yang meskipun berbeda latar belakang etnis dan budaya, namun memiliki semangat kebersamaan dan nasionalisme berbasis kedaerahan, tenggang rasa dan tanggung jawab, sikap toleransi yang universal dalam membangun Kota Tangerang.

Terwujudnya Kota Tangerang Yang Sejahtera

Terwujudnya Kota Tangerang yang sejahtera, melalui perwujudan masyarakat Kota Tangerang yang sejahtera yaitu memiliki tatanan kehidupan yang baik dan berkualitas sehingga terbentuk kehidupan masyarakat yang makmur dan berkeadilan, dan menjadikan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan daerah.

Terwujudnya Masyarakat Yang Berakhhlakul karimah

Terwujudnya masyarakat Kota Tangerang yang memiliki akhlakul karimah, yaitu terwujudnya masyarakat yang memiliki sikap dan perilaku akhlak mulia yang dicerminkan melalui kualitas hubungan antar manusia dengan Tuhan dan hubungan antar manusia itu sendiri, dan menjadi landasan moral dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat yang religius, demokratis, mandiri, berkualitas sehat jasmani dan rohani, serta tercukupi kebutuhan material spiritual, sehingga mampu mewujudkan sebuah masyarakat madani (madaniyyah) dan hidup menuju negeri yang adil, makmur, dan diberkati (*baldatun toyyibatun warabbun ghafur*).



II.3 MISI

Misi pembangunan daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Misi pembangunan Kota Tangerang Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional

Pelaksanaan pembangunan akan berjalan dengan optimal apabila ditunjang oleh tata pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan. Perwujudan tata pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan didukung dengan struktur birokrasi aparatur yang profesional, kompetensi, berkualitas, transparansi, objektifitas, dan bebas dari intervensi politik dan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) berintegritas, kompeten, dan professional. Melalui Tangerang LIVE yang salah satunya adalah E-CITY, pengembangan Kota Tangerang sebagai E-CITY terus dilakukan secara bertahap. Mulai dari pembuatan aplikasi, website hingga penerapan kepada pegawai Kota Tangerang seperti E-Government, E-Kesehatan, E-Pendidikan, E-Logistik dan E-Pengadaan, E-SPTPD, Akta Kelahiran Online, Pencaker Online, ATCS Dishub, Simpati RSUD dll. Dengan dibuatnya Tangerang Live Room (TLR) yang menghimpun seluruh aplikasi yang ada, maka pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat lagi.

Misi 2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi merupakan salah satu upaya untuk mempercepat kemajuan Kota Tangerang, yang dilakukan dengan memajukan kegiatan ekonomi yang menjadi sektor unggulan, seperti perdagangan dan jasa, industry, dan memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM) sehingga mampu bersaing, serta memperluas kesempatan kerja, mengurangi penganguran, dan mengentaskan kemiskinan. Apalagi dengan adanya program *Investable (kota layak investasi)* diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Berbagai kemudahan terus diberikan Pemerintah Kota Tangerang untuk menarik investor menanamkan modalnya di Kota Tangerang yang sedang bertransformasi menjadi Kota Seribu Industri-Sejuta Jasa. Program-program yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang untuk mendukung kearah itu seperti layanan BPHTB Online, SIUP dan TDP Online. Kemudahan perijinan merupakan salah satu point dasar dalam menarik investor kesuatu daerah. Bila selama ini izin investasi harus menunggu waktu lama, tetapi hal itu tak berlaku lagi di Kota Tangerang. Birokrasi yang



rumit dan lama akan berdampak pada malasnya investor menanamkan modalnya di suatu daerah.

Misi 3 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing diera globalisasi

Pengembangan kualitas pendidikan dan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan masyarakat yang berdaya saing, kualitas kehidupan masyarakat Kota Tangerang yang ditunjang dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan sumber daya manusia, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan, serta faktor pendukung lainnya. Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, Pemerintah Kota Tangerang menyediakan layanan informasi mengenai pendidikan dan kesehatan secara online.

Misi 4 : Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas

Penyediaan dan peningkatan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas mutlak diperlukan sekaligus dapat untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat dalam rangka mendukung berlangsungnya kegiatan ekonomi dan investasi secara produktif. Sarana perkotaan merupakan faktor penunjang bagi kegiatan ekonomi Kota Tangerang.

Misi 5 : Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman

Peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan untuk mendukung dalam rangka melaksanakan salah satu pilar pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman serta seimbang antara lain dapat mengintegrasikan faktor lingkungan hidup dengan ekonomi dan sosial budaya, dapat menciptakan kondisi kemajuan yang seimbang antara peningkatan aspek sosial dan ekonomi dengan kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah Kota Tangerang dalam mewujudkan Kota Sehat, bersih dan nyaman telah mengalokasikan anggaran disetiap OPD untuk enam tatanan menuju Kota yang sehat, bersih dan nyaman yaitu : pertama untuk sarana dan prasarana (urusan Pekerjaan Umum, LH dan Kebersihan), kedua tatanan kehidupan masyarakat sehat dan mandiri (urusan perbaikan gizi, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan lainnya), ketiga ketahanan pangan dan gizi (urusan ketahanan pangan, kesehatan, pertanian, perikanan dan perkebunan), keempat kehidupan sosial yang sehat (urusan pelayanan



dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, pembinaan penyandang cacat dan trauma), kelima yaitu kawasan tertib lalu lintas dan pelayanan transportasi yang berkaitan dengan perhubungan dan pekerjaan, keenam yakni industri dan perkantoran sehat.

II.4 TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA TANGERANG

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018, adalah sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tangerang 2014-2018

Misi	Tujuan		Sasaran	
1 Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional	1.1 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, inovatif, dan akuntabel (good governance)	1.1.1	Terwujudnya penataan pertanahan	
		1.1.2	Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	
		1.1.3	Terwujudnya sistem dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	
		1.1.4	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	
		1.1.5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	
		1.1.6	Terwujudnya aparatur yang profesional	
		1.1.7	Terwujudnya statistik dan persandian yang berkualitas	
		1.1.8	Terwujudnya perencanaan serta penelitian dan pengembangan pembangunan yang berkualitas	
		1.1.9	Terwujudnya kearsipan yang berkualitas	
	1.2 Mengembangkan e-government berbasis teknologi informasi sebagai pendukung pelaksanaan sistem penyelenggaraan, pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik	1.2.1	Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	
2 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi	2.1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memantapkan sinergitas antar sektor perekonomian	2.1.1	Terwujudnya keberdayaan UMKM dan Koperasi sebagai pendukung perekonomian	
		2.1.2	Terwujudnya peningkatan investasi dan kemudahan perijinan	
		2.1.3	Terwujudnya ketahanan pangan yang memadai dan berkualitas	
		2.1.4	Meningkatnya kepariwisataan	
		2.1.5	Terwujudnya perdagangan yang berkualitas serta peningkatan	



Misi		Tujuan		Sasaran	
				perlindungan konsumen	
			2.1.6	Terwujudnya industri yang maju	
3	Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi	3.1	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan beserta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya yang layak, memadai, dan berkualitas	3.1.1	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan
				3.1.2	Meningkatnya aksesibilitas kesehatan
				3.1.3	Terwujudnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
				3.1.4	Terwujudnya keluarga sejahtera melalui keluarga berencana
				3.1.5	Terwujudnya pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial
				3.1.6	Terwujudnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja
				3.1.7	Terwujudnya peningkatan pengelolaan dan pelestarian kebudayaan daerah
				3.1.8	Terwujudnya kepemudaan dan keolahragaan yang mandiri dan berprestasi
				3.1.9	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, kepolitikan dan hukum
				3.1.10	Terwujudnya peningkatan keberdayaan masyarakat
				3.1.11	Terwujudnya peningkatan kesadaran dan kegemaran membaca masyarakat
4	Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas	4.1	Meningkatkan sistem pengendalian banjir yang memadai	4.1.1	Terwujudnya pengendalian banjir dan genangan
		4.2	Mengembangkan sistem transportasi perkotaan yang modern dan terpadu	4.2.1	Terwujudnya jaringan jalan dan sarana pendukungnya yang mantap
				4.2.2	Terwujudnya pelayanan tansportasi perkotaan terpadu
5	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman	5.1	Meningkatkan kualitas penataan ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	5.1.1	Terwujudnya peningkatan penanggulangan bencana
				5.1.2	Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak
				5.1.3	Terwujudnya penataan ruang wilayah yang berkualitas
				5.1.4	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup



II.5 SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN RPJMD

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	
		Uraian	Satuan
1.1.1	Terwujudnya penataan pertanahan	1 Persentase luas lahan bersertifikat	%
		2 Persentase kasus tanah pemda/negara yang diselesaikan	% per tahun
1.1.2	Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1 Persentase penerbitan kartu keluarga	%
		2 Persentase penerbitan kartu tanda penduduk	%
		3 Persentase penerbitan kutipan akta kelahiran	%
		4 Persentase penerbitan kutipan akta kematian	%
		5 Persentase Pasangan Suami-Isteri Ber-Akta Nikah	%
1.1.3	Terwujudnya sistem dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	1 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Poin
		2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada SKPD pelayanan Publik	Poin
		3 Persentase Raperda yang disetujui DPRD	%
1.1.4	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	1 Jumlah pendapatan daerah	Rp. Triliun
		2 Jumlah pendapatan asli daerah (PAD)	Rp. Triliun
		3 Persentase pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah	%
1.1.5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	1 Persentase Hasil temuan yang ditindak lanjuti	%
		2 Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP/ WDP/ TMP
		3 Nilai evaluasi AKIP pemerintah daerah	A, BB, B, CC, C, D
		4 Persentase SKPD yang memiliki nilai "B" hasil evaluasi SAKIP	%
1.1.6	Terwujudnya aparatur yang profesional	1 Persentase Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) diatas 75	%
		2 Jumlah Pegawai yang terkena hukuman disiplin	Orang
1.1.7	Terwujudnya statistik dan persandian yang berkualitas	1 Persentase publikasi data statistik daerah berbasis website	%
		2 Persentase penggunaan persandian untuk pengamanan aplikasi	%
1.1.8	Terwujudnya perencanaan serta penelitian dan pengembangan	1 Persentase output kegiatan yang tercapai	%
		2 Persentase indikator sasaran yang tercapai	%



No.	Sasaran	Indikator Sasaran	
		Uraian	Satuan
	pembangunan yang berkualitas	3	Persentase Keselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD
		4	Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD
		5	Persentase Keselarasan Renja SKPD dan RKPD
		6	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir (RKPD)
		7	Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan strategis dalam perencanaan pembangunan
1.1.9	Terwujudnya kearsipan yang berkualitas	1	Persentase SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku
1.2.1	Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	1	Persentase penyediaan aplikasi perijinan online
		2	Persentase integrasi aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah
2.1.1	Terwujudnya keberdayaan UMKM dan Koperasi sebagai pendukung perekonomian	1	Jumlah UMKM yang melakukan kegiatan usaha
		2	Persentase koperasi yang melakukan kegiatan usaha
2.1.2	Terwujudnya peningkatan investasi dan kemudahan perijinan	1	Jumlah penanaman modal (investasi)
		2	Persentase perizinan tepat waktu
2.1.3	Terwujudnya ketahanan pangan yang memadai dan berkualitas	1	Jumlah Cadangan Pangan
		2	Produksi padi
		3	Produksi sayuran
		4	Produksi Buah-buahan
		5	Produksi tanaman bio farmaka
		6	Produksi Daging
2.1.4	Meningkatnya kepariwisataan	1	Jumlah kunjungan wisatawan
		2	Rata-rata lama kunjungan wisatawan (Rata-rata lama menginap di hotel)
2.1.5	Terwujudnya perdagangan yang berkualitas serta peningkatan perlindungan konsumen	1	Persentase Alat Ukur yang terstandar
		2	Persentase pasar tradisional yang bersih
2.1.6	Terwujudnya industri yang maju	1	Persentase industri yang memiliki standar
		2	Nilai PDRB sektor industri (ADHK)
		3	Persentase IKM memiliki produk sertifikasi halal
3.1.1	Meningkatnya	1	Indeks pendidikan
			Point



No.	Sasaran	Indikator Sasaran	
		Uraian	Satuan
	aksesibilitas pendidikan	2 Harapan lama sekolah	Tahun
		3 Rata-rata lama sekolah	Tahun
		4 Angka melek huruf penduduk usia >15 tahun	(%)
3.1.2	Meningkatnya aksesibilitas kesehatan	1 Indeks kesehatan	Point
		2 Angka harapan hidup	Tahun
		3 Jumlah Kematian Ibu	Orang
		4 Jumlah Kematian Bayi	Orang
		5 Prevalensi Penyakit (Cakupan penemuan dan penanganan pasien baru Tuberkolosis)	%
		6 Presentase balita gizi buruk (BB/TB)	%
3.1.3	Terwujudnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1 Indeks pembangunan gender	Point
		2 Indeks pemberdayaan gender	Point
		3 Jumlah kekerasan terhadap anak	Orang
3.1.4	Terwujudnya keluarga sejahtera melalui keluarga berencana	1 Persentase pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif	%
		2 Persentase posyandu yang melaksanakan kegiatan sebulan sekali	%
3.1.5	Terwujudnya pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial	1 Persentase penurunan PMKS	%
		2 Persentase Penanganan PMKS	%
3.1.6	Terwujudnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja	1 Tingkat Pengangguran Terbuka	%
		2 Jumlah lowongan kerja	Orang
3.1.7	Terwujudnya peningkatan pengelolaan dan pelestarian kebudayaan daerah	1 Persentase pelestarian cagar budaya daerah	%
		2 Jumlah pagelaran budaya kota.	Kegiatan
3.1.8	Terwujudnya kepemudaan dan keolahragaan yang mandiri dan berprestasi	1 Persentase organisasi pemuda yang memiliki sertifikat standar mutu organisasi kepemudaan	%
		2 Persentase organisasi olahraga yang memiliki sertifikat standar mutu organisasi keolahragaan	%
		3 Jumlah atlet berprestasi tingkat Provinsi	orang
3.1.9	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, kepolitikan dan hukum	1 Persentase penyelesaian konflik Suku, Agama, Ras dan Adat (SARA)	%
		2 Persentase penyelesaian penegakan perda	%
3.1.10	Terwujudnya peningkatan keberdayaan masyarakat	1 Persentase kelompok masyarakat aktif	%



No.	Sasaran	Indikator Sasaran		
			Uraian	Satuan
3.1.11	Terwujudnya peningkatan kesadaran dan kegemaran membaca masyarakat	1	Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah	Orang
4.1.1	Terwujudnya pengendalian banjir dan genangan	1	Luas genangan dan banjir	Ha
4.2.1	Terwujudnya jaringan jalan dan sarana pendukungnya yang mantap	1	Persentase kondisi jalan kota yang mantap	%
		2	Persentase keterhubungan pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat produksi di wilayah kota	%
4.2.2	Terwujudnya pelayanan tansportasi perkotaan terpadu	1	Persentase kemacetan yang tertangani	%
		2	Jumlah koridor angkutan umum masal yang beroperasi	Koridor
5.1.1	Terwujudnya peningkatan penanggulangan bencana	1	Persentase penanggulan bencana	%
		2	Jumlah penanganan korban bencana	Orang
5.1.2	Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak	1	Backlog rumah	%
		2	Persentase rumah layak huni	%
		3	Luas lingkungan permukiman kumuh	Ha
		4	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih	%
		5	Persentase penduduk yang terlayani jaringan air limbah	%
5.1.3	Terwujudnya penataan ruang wilayah yang berkualitas	1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%
5.1.4	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	U,SB,B,C,K,SK,W
		2	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%
		3	Persentase pengurangan sampah di perkotaan	%

II.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,



Pemerintah Kota Tangerang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah melalui Peraturan Walikota Tangerang Nomor 68 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang

Misi 1: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan professional

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
1	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Jumlah pendapatan asli daerah (PAD)	Rp. Triliun	Jumlah pendapatan asli daerah (PAD) yang diterima oleh Pemerintah Kota Tangerang.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan Badan Pendapatan Daerah (BPD)	Jumlah pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP/ WDP/ TMP	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
		Nilai evaluasi AKIP pemerintah daerah	A, BB, B, CC, C, D	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kota Tangerang	Bappeda	Nilai Evaluasi AKIP Kota Tangerang diukur sesuai dengan Permenpan No. 25/2012 tentang Pedoman atas Implementasi SAKIP serta perubahannya
3	Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	Persentase integrasi aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah	%	Jumlah sistem informasi dan aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah terintegrasi dibagi Jumlah sistem informasi dan aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang ada	Dinas Komunikasi dan Informatika	Integrasi sistem merupakan proses membangun suatu kesatuan sistem informasi dari komponen-komponen perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan yang berbeda



Misi 2: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
4	Terwujudnya peningkatan investasi dan kemudahan perijinan	Jumlah penanaman modal (investasi)	Rp. Triliun	Jumlah nilai penanaman modal (investasi) PMA dan PMDN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	
		Persentase perizinan tepat waktu	%	Jumlah perijinan yang diterbitkan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku dibagi Jumlah permohonan perijinan yang memenuhi syarat lengkap sesuai peraturan berlaku	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menargetkan seluruh pelayanan izin sesuai waktu sehingga target yang harus dicapai adalah 100%
5	Meningkatnya kepariwisataan	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Tangerang	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kunjungan Wisatawan terdiri dari Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara
		Rata-rata lama kunjungan wisatawan (Rata-rata lama menginap di hotel)	Hari	Jumlah lamanya hari tamu yang menginap di hotel (hari) dibagi Jumlah tamu yang menginap di hotel (orang)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
6	Terwujudnya industri yang maju	Nilai PDRB sektor industri (ADHK)	Rp. Miliar	Nilai PDRB Atas Harga Konstan 2010 pada sektor industri pengolahan	BPS, Dinas Perindustrian dan, Perdagangan	Sektor industri pengolahan merupakan lapangan usaha terbesar yang berperan dalam perekonomian Kota Tangerang.

Misi 3: Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
7	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	Indeks pendidikan	Point	Indeks pendidikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	BPS, Dinas Pendidikan	Indeks Pendidikan atau Indeks Pengetahuan adalah penggabungan dua indikator pendidikan, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
8	Meningkatnya aksesibilitas kesehatan	Indeks kesehatan	Point	Indeks Kesehatan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	BPS, Dinas Kesehatan	Indeks Kesehatan atau Indeks harapan hidup didapat dari angka harapan hidup, digunakan untuk mengukur pembangunan di bidang kesehatan. Meningkatnya angka harapan hidup dapat berarti adanya perbaikan pembangunan di bidang kesehatan
9	Terwujudnya pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial	Persentase penurunan PMKS	%	Jumlah PMKS tahun n dikurang Jumlah PMKS tahun n-1 dibagi Jumlah PMKS tahun n-1 kali 100 persen	Dinas Sosial	Berdasarkan Permensos RI No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
10	Terwujudnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	Jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan dibagi jumlah angkatan kerja kali 100 persen	BPS, Dinas Ketenagakerjaan	Angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan adalah mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja, atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
11	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, kepoltikan dan hukum	Persentase penyelesaian konflik Suku, Agama, Ras dan Adat (SARA)	%	Jumlah penyelesaian konflik SARA yang difasilitasi dibagi Jumlah konflik SARA yang terjadi	Kantor Kesbang dan Politik Dalam Negeri	

Misi 4: Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
12	Terwujudnya pengendalian banjir dan genangan	Luas genangan dan Banjir	Ha	Luas genangan dan banjir di wilayah Kota Tangerang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanganan banjir sampai tuntas sehingga luas genangan dan banjir di wilayah Kota Tangerang akan berkurang
13	Terwujudnya pelayanan tansportasi perkotaan terpadu	Persentase kemacetan yang tertangani	%	Jumlah titik kemacetan yang ditangani dibagi jumlah titik kemacetan di ruas jalan Kota Tangerang kali 100 persen	Dinas Perhubungan	Semakin banyak titik kemacetan yang tertangani maka kondisi lalu lintas semakin lancar

Misi 5: Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
14	Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak	Persentase rumah layak huni	%	Jumlah rumah layak huni dibagi Total jumlah rumah yang ada	Dinas Perumahan dan Permukiman	Permendagri 54 Tahun 2010
15	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	(U, SB, B, C, K, SK, W)	Nilai indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Dinas Lingkungan Hidup	ukuran utama untuk Sasaran Pokok Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019 dan RPJMD Kota Tangerang 2014-2018

II.7 PERJANJIAN KINERJA KOTA TANGERANG TAHUN 2018

Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2018 mengacu pada dokumen RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2018, dan dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2018.



Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2018

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Misi 1				
1	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Jumlah pendapatan asli daerah (PAD)	Rp. Triliun	1,67
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP/ WDP/ TMP	WTP
		Nilai evaluasi AKIP pemerintah daerah	A, BB, B, CC, C, D	B
3	Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	Persentase integrasi aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah	%	100,00
Misi 2				
4	Terwujudnya peningkatan investasi dan kemudahan perijinan	Jumlah penanaman modal (investasi)	Rp. Triliun	6,75
		Persentase perizinan tepat waktu	%	100,00
5	Meningkatnya kepariwisataan	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	363.642
		Rata-rata lama kunjungan wisatawan (Rata-rata lama menginap di hotel)	Hari	2,15
6	Terwujudnya industri yang maju	Nilai PDRB sektor industri (ADHK)	Rp Miliar	40.907,26
Misi 3				
7	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	Indeks pendidikan	Point	70,45
8	Meningkatnya aksesibilitas kesehatan	Indeks kesehatan	Point	79,11
9	Terwujudnya pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial	Persentase penurunan PMKS	%	2,97
10	Terwujudnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,52
11	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, kepoltikan dan hukum	Persentase penyelesaian konflik Suku, Agama, Ras dan Adat (SARA)	%	100,00



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Misi 4				
12	Terwujudnya pengendalian banjir dan genangan	Luas genangan dan Banjir	Ha	225
13	Terwujudnya pelayanan tansportasi perkotaan terpadu	Persentase kemacetan yang tertangani	%	100,00
Misi 5				
14	Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak	Persentase rumah layak huni	%	99,43
15	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	(U, SB, B, C, K, SK, W)	SK

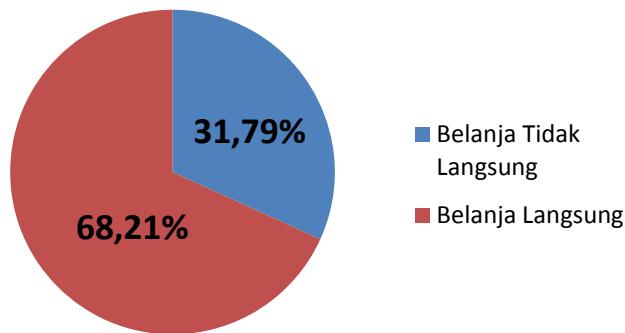
II.8 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018

Pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kota Tangerang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang dengan total belanja langsung sebesar Rp3.288.090.904.706,80. Adapun, komposisi belanja APBD Kota Tangerang, sebagai berikut:

No	Uraian	Rencana Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	1.532.215.015.289,42	31,79
2	Belanja Langsung	3.288.090.904.706,80	68,21
	Jumlah	4.820.305.919.996,22	100,00

Sumber: APBD Perubahan Tahun 2018

Komposisi Alokasi Anggaran Tahun 2018





BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik

Pemerintah Kota Tangerang selaku pengembang amanah masyarakat Kota Tangerang melaksanakan kewajiban akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Tangerang, sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2014-2018, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahun 2018, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Prosentase	Predikat
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai/Sesuai Target
> 100%	Melebihi Target



III.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Metodologi dalam Pengukuran kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- 1) Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Tingkat Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Tingkat Pencapaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan pengukuran kinerja, maka untuk menggambarkan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini, ditetapkan suatu skala pengukuran ordinal pencapaian kinerja berdasarkan kriteria yang tercantum dalam Tabel T-E.1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:



Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1. $91\% \leq 100\%$ atau lebih	: Sangat Tinggi
2. $76\% \leq 90,99\%$: Tinggi
3. $66\% \leq 75,99\%$: Sedang
4. $51\% \leq 65,99\%$: Rendah
5. $\leq 50,99\%$: Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

➤ Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), dan hasil (outcomes).

➤ Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

III.2 CAPAIAN INDIKATOR MAKRO

Tujuan pembangunan Kota Tangerang telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Kota Tangerang telah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan



berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauhmana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan itu sendiri. Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam indikator makro pembangunan daerah.

Perkembangan indikator makro Kota Tangerang tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Perkembangan Indikator Makro Kota Tangerang Tahun 2014-2018

Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
IPM	Poin	75,87	76,52	76,81	77,01	77,74
LPE	%	6,17	5,88	5,31	5,91	6,32
Tingkat Kemiskinan	%	4,91	4,60	4,94	4,95	4,55
TPT	%	7,81	8,00	7,00	7,16	7,41
IKM	Kategori	B	B	B	A	A

Sumber: BPS Kota Tangerang dan diolah

Kondisi Realiasi Indikator Makro Kota Tangerang dari tahun 2014 sampai dengan 2018 menunjukkan hasil di atas rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Banten. Demikian juga kondisi realisasi indikator makro untuk IPM dan LPE menunjukkan nilai di atas rata-rata Propinsi Banten. Hal ini berarti bahwa usaha peningkatan IPM yang dilakukan melalui peningkatan usaha di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi di Kota Tangerang relatif lebih berhasil dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten.

Tabel 3.2. Perbandingan Indikator Makro Kota Tangerang dengan Provinsi Banten

INDIKATOR		IPM	LPE	Tingkat Kemiskinan	TPT	IKM
Satuan		Poin	%	%	%	Kategori
2014	Kota Tangerang	75,87	6,17	4,91	7,81	B
	Provinsi Banten	69,89	5,47	5,51	9,07	
2015	Kota Tangerang	76,52	5,88	4,60	8,00	B
	Provinsi Banten	70,59	5,37	5,75	9,55	
2016	Kota Tangerang	76,81	5,31	4,94	7,00	B
	Provinsi Banten	70,96	5,28	5,36	8,92	
2017	Kota Tangerang	77,01	5,91	4,95	7,16	A
	Provinsi Banten	71,42	5,71	5,59	9,28	



INDIKATOR	IPM	LPE	Tingkat Kemiskinan	TPT	IKM
Satuan	Poin	%	%	%	Kategori
2018	Kota Tangerang	77,74	6,32	4,55	7,41
	Provinsi Banten	71,77	6,00	5,24	8,52

Sumber: BPS dan diolah

Tabel 3.3. Target dan Realisasi Indikator Makro Kota Tangerang Tahun 2018

No.	Indikator Makro	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	77,72	77,74	100,03
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6,1	6,32	103,61
3.	Tingkat Kemiskinan (% Jumlah Penduduk Miskin)	%	4,66	4,55	102,36
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,52	7,41	101,46
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori	A	A	100,00

Sumber: BPS Kota Tangerang (diolah)

III.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung secara komposit berdasarkan tiga indeks yang terdiri dari indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.4. Komponen IPM Kota Tangerang Tahun 2014 – 2018

Komponen IPM Kota Tangerang	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,09	71,29	71,34	71,38	71,42
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,86	12,90	13,41	13,44	13,83
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	10,20	10,20	10,28	10,29	10,46
Pengeluaran (Ribu Rupiah)	13.671,00	13.766,00	13.911,00	14.104,00	14.283
Indeks Harapan Hidup	78,60	78,61	78,98	79,05	79,11
Indeks Pengetahuan	69,72	69,83	71,52	71,63	73,28
Indeks Pengeluaran	79,69	79,90	80,22	80,64	81,03
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,87	76,08	76,81	77,01	77,74

Sumber: BPS Kota Tangerang, 2018 (diolah)



Kecenderungan angka IPM Kota Tangerang menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan manusia yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang secara berkelanjutan telah membawa hasil yang positif.

III.2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

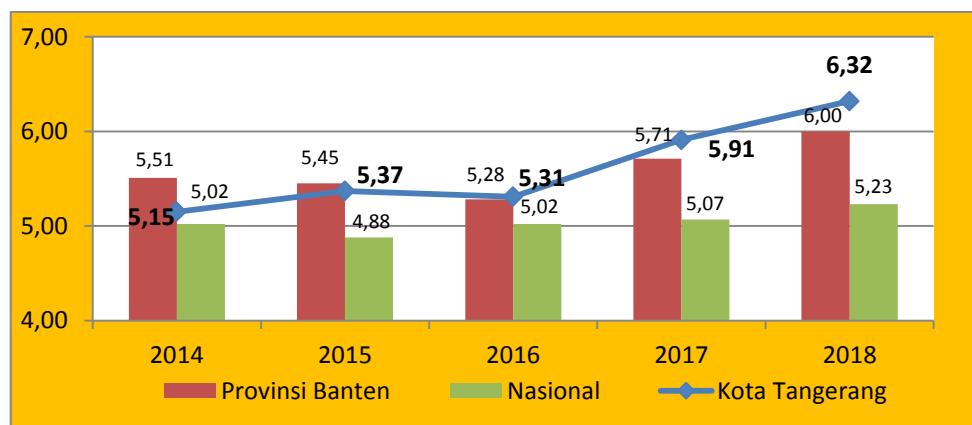
Pada tahun 2018 perekonomian Kota Tangerang mengalami percepatan dibandingkan dengan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini terlihat dari laju pertumbuhan PDRB Kota Tangerang tahun 2018 sebesar 6,32 persen, sedangkan tahun pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang tahun 2014 sampai dengan 2017 masih dibawah 6 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 11,30 persen. Seluruh lapangan usaha ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2018 mencatat pertumbuhan yang positif.

Tabel 1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2014 – 2018

Tahun	LPE (%)		
	Kota Tangerang	Provinsi Banten	Nasional
2014	5,15	5,51	5,02
2015	5,37	5,45	4,88
2016	5,31	5,28	5,02
2017	5,91	5,71	5,07
2018	6,32	6,00	5,23

Sumber: BPS, 2018

Gambar 3.1. Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang Tahun 2014 – 2018 dan Perbandingannya dengan Provinsi Banten dan Nasional



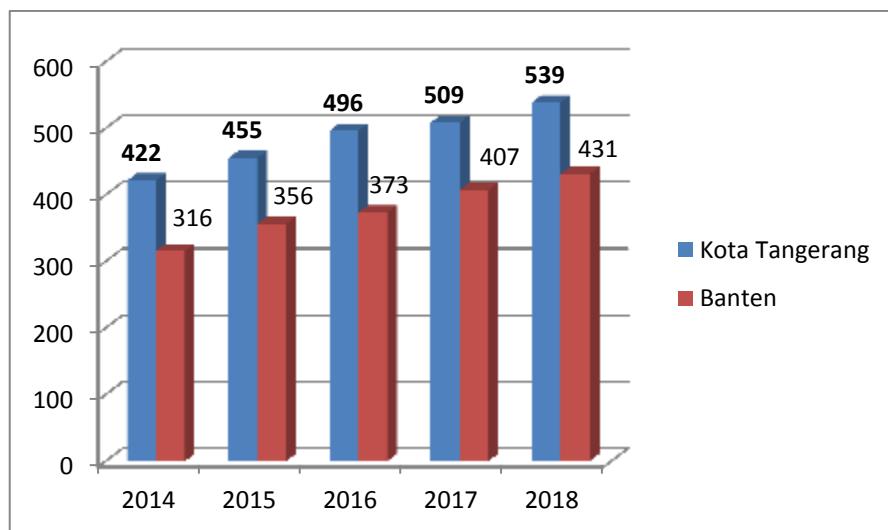
Sumber: BPS Kota Tangerang, Banten dan Pusat



Selama periode 2014-2018, laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Banten dan Tingkat Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi makro secara regional Banten dan Nasional.

III.2.3 Tingkat Kemiskinan

Gambar 3.2. Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Tangerang dan Provinsi Banten 2014-2018



Sumber : BPS Kota Tangerang, 2018, diolah.

Tabel 3.5. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Tangerang

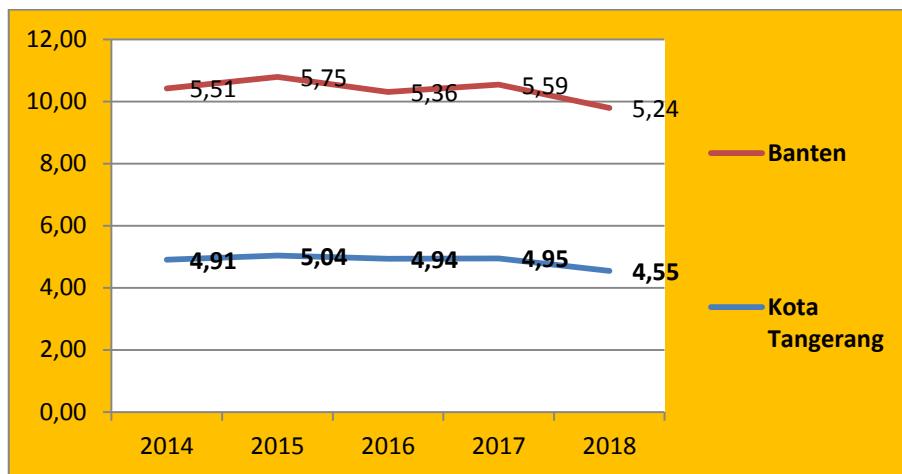
Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/ kapita/ bulan)	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2014	421.554	98.800	4,91
2015	455.228	102.560	5,04
2016	496.349	102.880	4,94
2017	508.551	105.340	4,95
2018	538.772	98.717	4,55

Sumber: BPS Kota Tangerang

Tabel 3.5 menunjukkan perkembangan jumlah dan persentase Penduduk miskin Kota Tangerang dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 berfluktuatif, dimana terjadi penurunan dan peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Tangerang dan persentase penduduk miskin di interval angka 4 sampai 5 persen.



Gambar 3.3. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kota Tangerang dan Provinsi Banten 2014-2018



Sumber: BPS (diolah)

Program kesehatan gratis, pendidikan melalui Program Tangerang Cerdas, infrastruktur dan subsidi pangan tepat sasaran untuk mengentaskan kemiskinan bagi warga Kota Tangerang. Masyarakat dengan pendapatan sedikit diatas garis kemiskinan tidak tergolong miskin, tetapi sangat rentan terhadap kemiskinan biasanya hanya dengan sedikit goncangan masalah ekonomi mereka akan berubah menjadi miskin. Keadaan ini mengakibatkan banyak penduduk yang keluar masuk menjadi miskin.

Oleh karenanya program – program pro kemiskinan tidak hanya ditujukan untuk mereka yang berada dibawah garis kemiskinan tetapi juga masyarakat yang rentan miskin yaitu masyarakat yang dengan mudah jatuh ke bawah garis kemiskinan.

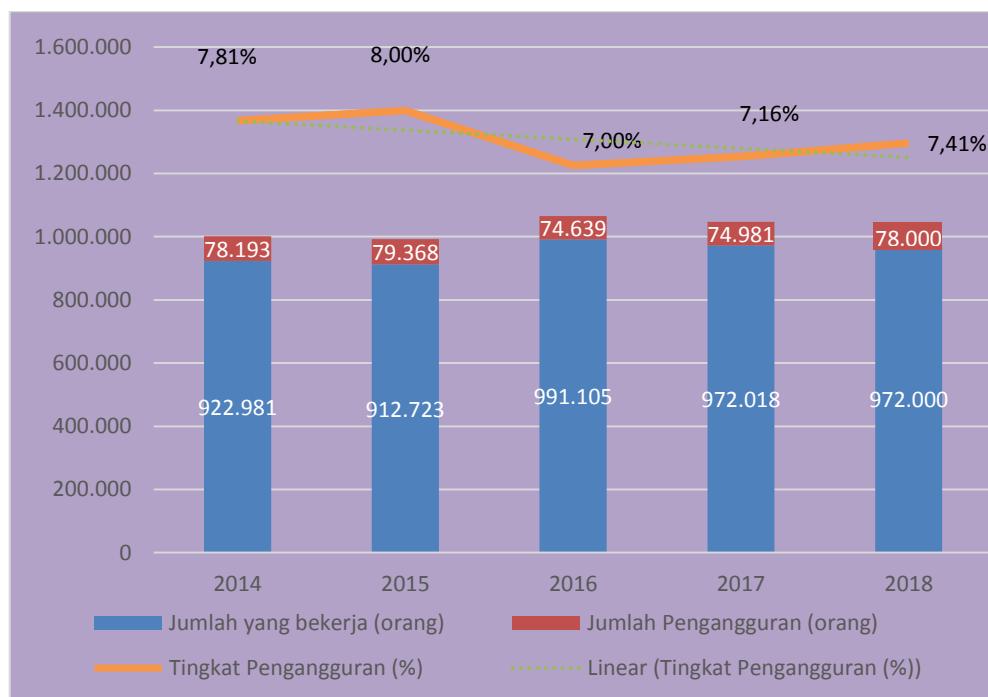
III.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dihitung melalui rasio antara jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan terhadap jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2018, jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan di Kota Tangerang sebanyak 78.000 orang, sedangkan jumlah angkatan kerjanya sebanyak 1.050.000 orang. Sehingga, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tangerang tahun 2018 sebesar 7,41%. Hal ini mengartikan bahwa diantara 100 orang yang termasuk ke dalam angkatan kerja terdapat sekitar 7 orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Jika dibandingkan dengan 5 tahun



terakhir Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Tangerang cenderung stabil dikisaran 7 s.d 8 persen.

Gambar 3.4. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tangerang Tahun 2014-2018



Sumber: BPS Kota Tangerang, 2018

III.2.5 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan seberapa jauh tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah selaku penyedia jasa layanan.

Metode pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kota Tangerang Tahun 2014-2018 mengikuti gradasi penilaian dalam angket dengan dasar teknik skala Likert. Teknik skala Likert mengarahkan persepsi responden terhadap empat pilihan jawaban yang tersedia dalam angket, sehingga dalam hasil pengukurannya akan mendapatkan 4 kelas penilaian, yaitu :

- ⇒ Kategori A (pelaksanaan pelayanan di unit penyelenggara pelayanan yang di dinilai Sangat Baik oleh masyarakat) dengan nilai 81,26 sampai dengan 100,00.
- ⇒ Kategori B (pelaksanaan pelayanan di unit penyelenggara pelayanan yang di dinilai Baik oleh masyarakat) dengan nilai 62,51 sampai dengan 81,25.
- ⇒ Kategori C (pelaksanaan pelayanan di unit penyelenggara pelayanan yang di dinilai Kurang Baik oleh masyarakat) dengan nilai 43,76 sampai dengan 62,50.



- ⇒ Kategori D (pelaksanaan pelayanan di unit penyelenggara pelayanan yang di dinilai Tidak Baik oleh masyarakat) dengan nilai 25,00 sampai dengan 43,75.

Tabel 3.6. Nilai IKM Kota Tangerang Tahun 2014-2018

No.	Tahun Pengukuran	Nilai IKM	Kategori	Mutu
1	2014	63,50	B	Baik
2	2015	78,77	B	Baik
3	2016	80,45	B	Baik
4	2017	82,26	A	Sangat Baik
5	2018	82,92	A	Sangat Baik

Sumber: Bagian Organisasi SETDA Kota Tangerang, 2018

Berdasarkan data dalam tabel di atas, diperoleh peningkatan yang linear dan signifikan atas nilai IKM Kota Tangerang Tahun 2014-2018.

III.3 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA TANGERANG TAHUN 2018

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2018 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Tangerang berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7. Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Tangerang Tahun 2018

MISI 1 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018		
			Target	Realisasi	%
1	Jumlah pendapatan asli daerah (PAD)	Rp. Triliun	1,67	1,87	111,98
2	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP/ WDP/ TMP	WTP	WTP	100,00
3	Nilai evaluasi AKIP pemerintah daerah	A, BB, B, CC, C, D	B	B	100,00
4	Persentase integrasi aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah	%	100,00	100,00	100,00



MISI 2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2018		
			Target	Realisasi	%
5	Jumlah penanaman modal (investasi)	Rp. Triliun	6,75	6,79	100,59
6	Persentase perizinan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00
7	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	363.642	1.598.150	439,48
8	Rata-rata lama kunjungan wisatawan (Rata-rata lama menginap di hotel)	Hari	2,15	2,20	102,33
9	Nilai PDRB sektor industri (ADHK)	Rp Miliar	40.967,26	38.830,48	94,78

MISI 3 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing diera globalisasi

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2018		
			Target	Realisasi	%
10	Indeks pendidikan	Point	70,45	73,28	104,02
11	Indeks kesehatan	Point	79,11	79,11	100,00
12	Persentase penurunan PMKS	%	2,97	2,93	101,35
13	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,52	7,41	101,46
14	Persentase penyelesaian konflik Suku, Agama, Ras dan Adat (SARA)	%	100,00	100,00	100,00

MISI 4 : Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2018		
			Target	Realisasi	%
15	Luas genangan dan Banjir	Ha	225	222,18	101,25
16	Persentase kemacetan yang tertangani	%	100,00	100,00	100,00



MISI 5 : Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2018		
			Target	Realisasi	%
17	Persentase rumah layak huni	%	99,43	99,43	100,00
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	(U, SB, B, C, K, SK, W)	SK	SK	100,00

Pencapaian kinerja ini selanjutnya diuraikan dalam sub bab pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis.

III.4 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Merujuk pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Tangerang Tahun 2018, RPJMD Perubahan Tahun 2014-2018 dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 86 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang, telah ditetapkan 15 (lima belas) sasaran dengan 18 (Delapan belas) indikator kinerja (*out comes*) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.8. Ketercapaian Indikator Sasaran Terhadap Target Tahun 2018

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Keterangan
Misi 1. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Akuntabel, Dan Transparan, Didukung Dengan Struktur Birokrasi Yang Berintegras, Kompeten, Dan Profesional				
1	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	1	111,98	Melebihi Target
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	2	100,00	2 Indikator Sesuai Target
3	Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	1	100,00	Sesuai Target



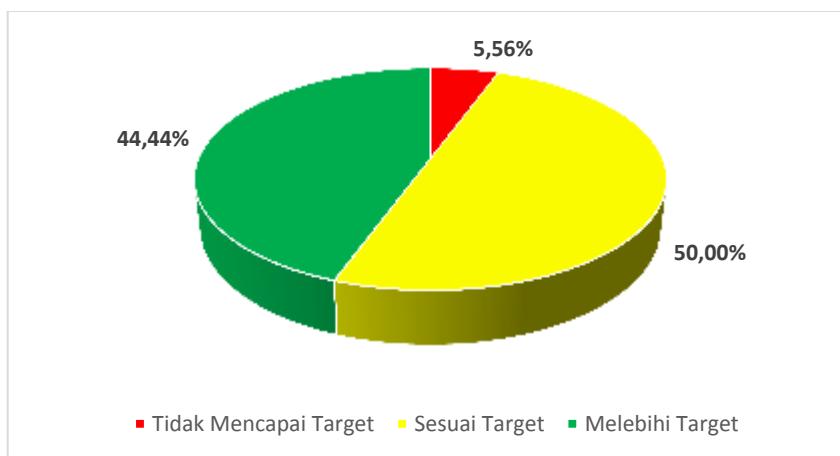
No.	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Keterangan
Misi 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berdaya Saing Tinggi				
4	Terwujudnya peningkatan investasi dan kemudahan perijinan	2	100,30	1 Indikator Melebihi Target dan 1 Indikator Sesuai Target
5	Meningkatnya kepariwisataan	2	270,91	2 Indikator Melebihi Target
6	Terwujudnya industri yang maju	1	94,78	Tidak Mencapai Target
Misi 3 : Mengembangkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Dan Kesejahteraan Sosial Demi Terwujudnya Masyarakat Yang Berdaya Saing Di Era Globalisasi				
7	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	1	104,02	Melebihi Target
8	Meningkatnya aksesibilitas kesehatan	1	100,00	Sesuai Target
9	Terwujudnya pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial	1	101,35	Melebihi Target
10	Terwujudnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja	1	101,46	Melebihi Target
11	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, kepoltikan dan hukum	1	100,00	SesuaiTarget
Misi 4 : Meningkatkan Pembangunan Sarana Perkotaan Yang Memadai Dan Berkualitas				
12	Terwujudnya pengendalian banjir dan genangan	1	101,25	Melebihi Target
13	Terwujudnya pelayanan tansportasi perkotaan terpadu	1	100,00	SesuaiTarget
Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan Yang Bersih, Sehat, Nyaman				
14	Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak	1	100,00	SesuaiTarget
15	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	1	100,00	SesuaiTarget



Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran dapat digambarkan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran strategis Pemerintah Kota Tangerang, yaitu 8 indikator melebihi target (44,44%), 9 indikator sesuai target (50,00%), dan 1 indikator belum mencapai target (5,56%).

Gambar 3.5.

Capaian IKU Kota Tangerang Tahun 2018



Selengkapnya pengukuran kinerja terhadap pencapaian indikator sasaran tahun 2018 adalah sebagai berikut:

III.4.1 SASARAN 1

Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9. Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				2018		
		2014	2015	2016	2017	Target	Realisasi	%
Jumlah pendapatan asli daerah (PAD)	Rp. Triliun	1,26	1,47	1,59	1,86	1,67	1,87	111,98

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan dalam wilayah Kota Tangerang, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD



memegang peranan yang sangat penting dalam membiayai program pembangunan Pemerintah Kota Tangerang.

Peningkatan PAD mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang agar mampu membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya dapat menjadi mandiri.

Pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan, terdiri atas:

- A. Pajak daerah;
- B. Retribusi daerah;
- C. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- D. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah.

Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dikenakan pajak. Pajak daerah berkontribusi paling besar tehadap PAD, tahun 2014 sebesar 84,13%, tahun 2015 sebesar 79,59%, tahun 2016 sebesar 82,39%, tahun 2017 sebesar 84,41% dan tahun 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar 83,42%. Berikut Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018.

Tabel 3.10. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang Tahun 2014-2018

PAD	2014		2015		2016		2017		2018	
	Rp Trilyun	Kontribusi (%)								
Pajak Daerah	1,06	84,13	1,17	79,59	1,31	82,39	1,57	84,41	1,56	83,42
Retribusi Daerah	0,07	5,56	0,09	6,12	0,07	4,40	0,07	3,76	0,08	4,28
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,01	0,79	0,01	0,68	0,01	0,63	0,01	0,54	0,02	1,07



PAD	2014		2015		2016		2017		2018	
	Rp Trilyun	Kontribusi (%)								
Lain-lain PAD yang Sah	0,12	9,52	0,20	13,61	0,20	12,58	0,21	11,29	0,21	11,23
Jumlah	1,26	100,00	1,47	100,00	1,59	100,00	1,86	100,00	1,87	100,00

Sumber: DPKD, 2019

Pajak daerah yang merupakan sumber penerimaan yang menjadi tumpuan Pemerintah Kota Tangerang, pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah..

Pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Tangerang meliputi 9 jenis pajak, yaitu:

- a) Pajak Hotel;
- b) Pajak Restoran;
- c) Pajak Hiburan;
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Penerangan Jalan;
- f) Pajak Parkir;
- g) Pajak Air Tanah;
- h) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan; dan
- i) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Objek retribusi :

- a. Jasa umum;
- b. Jasa usaha; dan
- c. Perizinan tertentu.

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.



Jenis Retribusi Jasa Umum yang dikelola Pemerintah Kota Tangerang adalah:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- e) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha yang dikelola Pemerintah Kota Tangerang adalah:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b) Retribusi Terminal;
- c) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- d) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus: dan
- e) Retribusi Rumah Potong Hewan.

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dikelola Pemerintah Kota Tangerang adalah:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b) Retribusi Izin Gangguan/Keramaian;
- c) Retribusi Izin Trayek; dan
- d) Retribusi Izin Mempekerjakan Tanaga Asing.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan



Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, yaitu Deviden Bank BJB, Deviden PDAM dan Deviden PD Pasar.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b) penerimaan jasa giro;
- c) Pendapatan bunga deposito;
- d) Tuntutan ganti kerugian daerah;
- e) pendapatan denda pajak;
- f) Penerimaan lain-lain;
- g) Dana Kapitasi JKN; dan
- h) Pendapatan dari BLUD.

PAD selama 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup baik, dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terlihat pada tahun 2014 sebesar Rp1,26 trilyun, tahun 2015 sebesar Rp1,47 trilyun, tahun 2016 sebesar Rp1,59 trilyun, tahun 2017 sebesar Rp1,86 trilyun, dan tahun 2018 sebesar Rp1,87 trilyun. Dengan kata lain selama kurun waktu 5 tahun telah mengalami peningkatan atau bertambah sebesar Rp0,61 trilyun atau meningkat sebesar 48,41%.

Upaya yang telah dilakukan

- a) Pendataan potensi wajib pajak baru;
- b) Penurunan reklame kain yang belum membayar pajak;
- c) Penempelan stiker/baliho segel terhadap media reklame yang belum berizin dan membayar pajak;
- d) Penyampaian surat teguran belum menyampaikan laporan omzet;
- e) Pemuthakhiran data wajib pajak (checker);
- f) Pemeriksaan pajak daerah;
- g) Penagihan tunggakan pajak daerah;
- h) Penyegelan terhadap wajib pajak daerah yang belum membayar pajak;



- i) Penempelan stiker lunas pajak reklame.

Permasalahan

- a) Belum optimalnya intensifikasi pemungutan pajak daerah khususnya pemeriksaan pajak daerah karena kurangnya tenaga pemeriksa pajak;
- b) Belum tersedianya tenaga IT untuk melaksanakan pemeliharaan aplikasi sistem pajak daerah.

Upaya yang akan dilakukan

- a) Optimalisasi pemungutan Pajak Daerah, yang dilaksanakan melalui:
 1. Pendataan potensi wajib pajak baru;
 2. Penurunan reklame kain yang belum membayar pajak;
 3. Penempelan stiker/baliho segel terhadap media reklame yang belum berizin dan membayar pajak;
 4. Penyampaian surat teguran belum menyampaikan laporan omzet;
 5. Pemuthakhiran data wajib pajak (checker);
 6. Pemeriksaan pajak daerah;
 7. Penagihan tunggakan pajak daerah;
 8. Penyegelean terhadap wajib pajak daerah yang belum membayar pajak;
 9. Penempelan stiker lunas pajak reklame;
 10. Pemeliharaan Sistem Pajak Daerah untuk meningkatkan aplikasi sistem pajak online;
 11. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak;
 12. Peningkatan pelayanan pajak online berupa laporan omzet secara online dan pembayaran secara online;
 13. Melakukan rapat koordinasi terkait pajak penerangan jalan dengan PT. PLN Disjaya dan PT. PLN Disbanten per triwulan.
- b) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan pajak daerah.

Tabel 3.11. Pendapatan Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018



Pendapatan Daerah	2014		2015		2016		2017		2018	
	Rp Trilyun	Kontribusi								
PAD	1,26	41,72	1,47	43,49	1,59	46,91	1,86	49,08	1,87	46,98
Dana Perimbangan	1,09	36,09	1,06	31,36	1,25	36,87	1,32	34,83	1,34	33,67
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,67	22,19	0,85	25,15	0,55	16,22	0,62	16,09	0,77	19,35
Jumlah	3,02	100,00	3,38	100,00	3,39	100,00	3,80	100,00	3,98	100,00

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2019

Dilihat dari struktur Pendapatan Daerah selama 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa kontribusi paling besar dalam pembentuk Pendapatan Daerah Kota Tangerang adalah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada Tahun 2018, kontribusi PAD sebesar 46,98% walaupun kontribusinya mengalami penurunan dibanding tahun 2017 yang sebesar 49,08%, namun Total Pendapatan meningkat yang disumbang dari Lain-lain Pendapan Daerah yang sah; disusul Dana Perimbangan sebesar 33,67%; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 19,35%. Kemudian jika ditelusuri lebih lanjut, kontribusi PAD mengalami tren peningkatan; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah relatif stabil. Hal ini tentunya berimplikasi pada menurunnya kontribusi Dana Perimbangan, dari 36,09% pada tahun 2014, dan terus menurun hingga 33,67% pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan tingkat kemandirian Kota Tangerang semakin meningkat.

III.4.2 SASARAN 2

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.12. Capaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				2018		
		2014	2015	2016	2017	Target	Realisasi	%
Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP/WDP/TMP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00
Nilai evaluasi AKIP pemerintah daerah	A, BB, B, CC, C, D	CC	CC	CC	B	B	B	100,00



Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2018, melalui 2 indikator kinerja adalah sebesar 100,00%, dengan kategori **Sangat Tinggi**. Beberapa informasi penting setiap indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

III.4.2.1 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan reformasi birokrasi yang merupakan target kinerja yang harus dicapai berdasarkan amanat dari RPJPD Kota Tangerang. Sasaran meningkatkannya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dengan indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Tahun 2018 untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara, BPK bertanggung jawab pada pernyataan pendapat/opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan secara independen dan dengan integritas tinggi, sedangkan penyusunan dan penyajian laporan keuangan merupakan tanggung jawab entitas. Empat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK yaitu sebagai berikut:

Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion)

Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau biasa disingkat WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Selain opini WTP ada pula opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan atau biasa disingkat WTP-DPP. Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkannya paragraf penjelasan, misalnya adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi. Selain itu, bisa juga karena auditor



setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal.

Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion)

Opini Wajar dengan pengecualian atau biasa disingkat WDP adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan *little adverse* (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Tidak wajar (adverse opinion)

Opini Tidak Wajar atau biasa disebut TW adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer of opinion)

Opini Tidak Menyatakan Pendapat atau biasa disebut TMP diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan. Misalnya, auditor tidak diperbolehkan meminta data-data terkait penjualan atau aktiva tetap, sehingga tidak dapat mengetahui berapa jumlah penjualan dan pengadaan aktiva tetapnya, serta apakah sudah dicatat dengan benar sesuai dengan SAP. Dalam hal ini auditor tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan WTP, WDP, atau TW.

Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan



keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak.

Dalam rangka pemenuhan target indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan akuntabilitas SKPD, dilakukan kuatifikasi pengukuran dengan formulasi sebagai berikut :

- ❖ Apabila mendapatkan “Tidak Memberikan Pendapat (TMP)”, diberikan nilai 1 (satu);
- ❖ Apabila mendapatkan opini “Disclaimer”, maka nilainya adalah 2 (dua);
- ❖ Apabila mendapatkan opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP), maka nilainya 3 (tiga); dan
- ❖ Apabila mendapatkan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP), maka nilainya adalah 4 (empat).

Berdasarkan press release BPK-RI Perwakilan Provinsi Banten, tanggal 31 Mei 2018, Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang merupakan opini WTP yang kesebelas kali secara berturut-turut diperoleh Pemerintah Kota Tangerang.

Pemberian opini WTP tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Banten dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 di Kantor Perwakilan BPK-RI Provinsi Banten pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018. Sebagaimana diketahui opini WTP merupakan penghargaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan pemerintah di Indonesia. Sehingga penghargaan yang diraih untuk kesebelas kalinya tanpa putus tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Tangerang dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Apalagi Pemerintah Kota Tangerang menjadi satu-satunya pemerintah daerah yang telah mendapat opini WTP berbasis akrual sebelas kali secara berturut-turut di Provinsi Banten.

Tabel 3.13. Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2007-2017

No.	Pemda	Opini Tahun									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017



No.	Pemda	Opini Tahun										
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Prov. Banten	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	TMP	TMP	WDP	WTP	WTP
2.	Kab. Lebak	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
3.	Kab. Pandeglang	WDP	WDP	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP	TMP	WDP	WTP	WTP
4.	Kab. Serang	TMP	WDP	WDP	WDP	WTP						
5.	Kab. Tangerang	WDP	WTP									
6.	Kota Cilegon	WDP	WDP	WDP	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	Kota Serang	-	WDP									
8.	Kota Tangerang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9.	Kota Tangerang Selatan	-	-	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

Pada Tahun 2018, target yang ditetapkan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah WTP atau nilai 4 (empat). Realisasi capaian target kinerja Pemerintah Kota Tangerang untuk opini BPK-RI atas LKPD Tahun 2017 mendapatkan opini WTP atau mendapatkan point (4) sesuai dengan LHP Nomor 17a/LHP/XVIII.SRG/05/2018 dari BPK-RI. Sehingga penghitungan pencapaian target untuk indikator dimaksud adalah : WTP (4) / WTP (4) x 100% atau sama dengan 100%, artinya capaian target indikator kinerja dimaksud dapat tercapai%.

Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Tangerang tetap menargetkan untuk bisa memperoleh opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018, sehingga dapat mempertahankan sampai dengan dua belas kali berturut-turut.

Upaya yang telah dilakukan

- Memberikan pemahaman dan meningkatkan kuantitas maupun kualitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah;
- Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi pengelolaan keuangan daerah serta mengintegrasikan dengan aplikasi lainnya yang terkait.



Permasalahan

- a) Pengelolaan dan pengisian dokumen sumber belum seluruhnya dilaksanakan dengan tertib;
- b) Pengelolaan data transaksi aset dan keuangan belum seluruhnya dilaksanakan dengan tertib;
- c) Pemahaman akan pentingnya menjaga konsistensi data belum sepenuhnya terbangun;
- d) Pemahaman sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah belum merata;
- e) Perbedaan pengaturan dalam pelaksanaan keuangan daerah oleh pemerintah pusat menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan.

Upaya yang akan dilakukan

- a) Memberikan pemahaman dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah;
- b) Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi pengelolaan keuangan daerah serta mengintegrasikan dengan aplikasi lainnya yang terkait.

III.4.2.2 Nilai Evaluasi AKIP Pemerintah Daerah

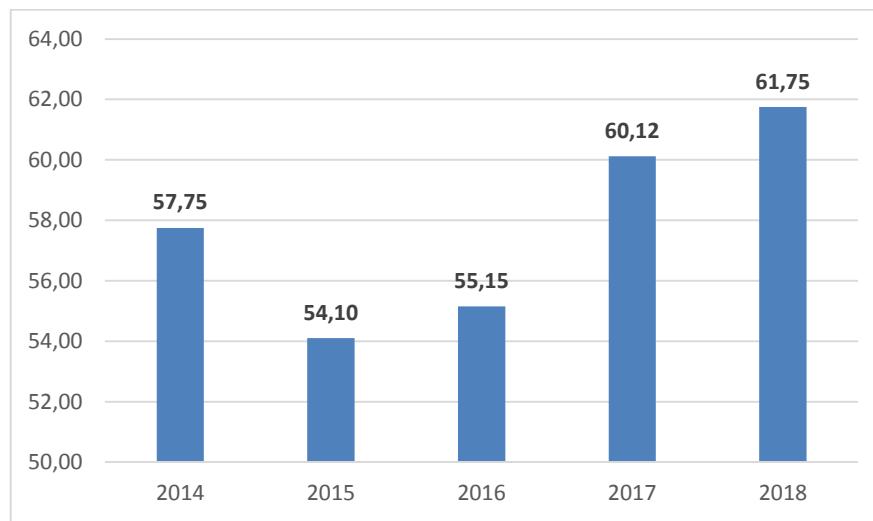
Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Nilai Evaluasi AKIP Kota diukur sesuai dengan Permenpan No. 12/2015 tentang Pedoman Atas Implementasi SAKIP.

Dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Tangerang tahun 2018 adalah 61,75 atau kategori B telah mencapai target RPJMD pada tahun 2018. Atas capaian tersebut maka kinerja akuntabilitas Kota Tangerang tahun 2018 adalah sesuai target. Capaian tersebut naik sebesar 1,63 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 60,12.



Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintahan Kota Tangerang sudah menunjukkan hasil yang baik.

Gambar 3.6. Capaian Nilai AKIP Kota Tangerang



Sumber: Bappeda Kota Tangerang, 2018

Untuk melihat perkembangan capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Tangerang sejak tahun 2014 meliputi 5 komponen AKIP sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.14. Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tangerang 2014-2018

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	2014	Bobot	2015	2016	2017	2018	
								Nilai	% Kinerja Komponen Berdasarkan Bobot
a.	Perencanaan Kinerja	35	19,07	30	19,83	19,83	21,39	21,97	73,23
b.	Pengukuran Kinerja	20	12,11	25	10,96	11,35	14,32	14,34	57,36
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,02	15	9,08	9,42	9,00	9,62	64,13
d.	Evaluasi Internal	10	5,90	10	4,31	3,75	4,96	5,06	50,60
e.	Capaian Kinerja	20	11,65	20	9,92	10,81	10,45	10,76	53,80
	Nilai Hasil Evaluasi		57,75		54,10	55,16	60,12	61,75	
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC		CC	CC	B	B	

Sumber: Bappeda Kota Tangerang, 2019



Dari data tersebut di atas diperoleh gambaran hasil evaluasi LKIP Kota Tangerang Tahun 2018, secara umum terdapat peningkatan pada seluruh komponen SAKIP dibandingkan tahun 2017. Sedangkan, Komponen Evaluasi Internal menempati posisi kinerja terendah sebesar 50,60% dan kinerja tertinggi pada komponen perencanaan kinerja sebesar 73,23%.

Hasil evaluasi tersebut menunjukan:

- a) Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan perbaikan atas sistem manajemen kinerja yang ditunjukkan dengan komitmen pemimpin daerah bersama dengan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Perbaikan dilakukan dengan menyempurnakan Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pada level SKPD.
- b) Penjabaran Sasaran dan Indikator Kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon IV namun penjabarannya masih belum seluruhnya didasarkan pada kinerja organisasi level diatasnya. Indikator Kinerja pada level eselon III dan IV juga belum seluruhnya terukur dan mendukung tercapainya sasaran strategis pada organisasi diatasnya.
- c) Pengukuran kinerja pada instansi dan OPD masih belum sepenuhnya menggunakan aplikasi manajemen kinerja untuk memudahkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pencapaian target kinerja.
- d) Analisis pencapaian kinerja yang disusun dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya menggambarkan efektifitas penggunaan sumberdaya, hanya sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- e) Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja melalui Inspektorat, akan tetapi hasil evaluasi masih belum sepenuhnya menggambarkan kondisi penerapan SAKIP di tingkat OPD.

Rekomendasi / Upaya Perbaikan

- a) Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran kinerja (cascade down) dari Level Walikota sampai ke level individu pegawai.
- b) Melakukan reviu terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU. Hasil reviu ini harus dapat memastikan bahwa



anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis dan program/kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran.

- c) Menggunakan aplikasi manajemen kinerja yang terpadu sebagai sarana monitoring dan evaluasi oleh pimpinan dan sebagai dasar pemberian reward and punishment.
- d) Meningkatkan kualitas hasil evaluasi internal dengan menjaga kualitas evaluator. Harus dilakukan peningkatan kualitas evaluator. Harus dilakukan peningkatan kualitas evaluator secara terus menerus sehingga akan tercipta pemahaman yang merata antar evaluator dan nantinya akan memberikan rekomendasi yang berkualitas dalam rangka peningkatan manajemen kinerja di Kota Tangerang.
- e) Mengevaluasi efektifitas dan efisiensi rumusan program serta kegiatan dengan lebih menfokuskan kepada hasil yang diharapkan sehingga akan memberikan manfaat yang lebih dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang.

Aksi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018

- a) Penyusunan Peraturan Perundungan
 - 1. Peraturan Walikota Tangerang tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang; (Telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Tangerang No. 68 Tahun 2018, tanggal 23 Juli 2018).
 - 2. Peraturan Walikota Tangerang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. (Telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Tangerang No. 69 Tahun 2018, tanggal 23 Juli 2018).
- b) Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan (e-planning) dan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Simonev).
- c) Reviu dan Revisi Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

III.4.3 SASARAN 3

Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi

Tabel 3.15. Capaian Kinerja Sasaran 3



Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				2018		
		2014	2015	2016	2017	Target	Realisasi	%
Persentase integrasi aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah	%	28,28	45,52	71,00	86,67	100,00	100,00	100,00

Pemerintah Kota Tangerang terus melakukan berbagai inovasi dalam pengembangan integrasi aplikasi, keberadaan aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat serta dalam rangka meningkatkan Pemerintahan yang bersih dan transparan salah satunya adalah tercapainya *Smartcity*.

Pada tahun 2018 kinerja sasaran integrasi aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah dengan target sebesar 100% dan realisasi target sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Indikator ini dicapai dengan beberapa aplikasi yang telah terintegrasi.

Upaya Yang Telah Dilakukan Tahun 2018

Berdasarkan rencana aksi KPK bahwa aplikasi milik pemda yang terkait dengan perencanaan, penganggaran dan layanan publik (perijinan) sampai dengan tahun 2018 sudah harus terintegrasi. Selama tahun 2018, sebanyak 13 aplikasi yang sudah terintegrasi sebagai berikut :

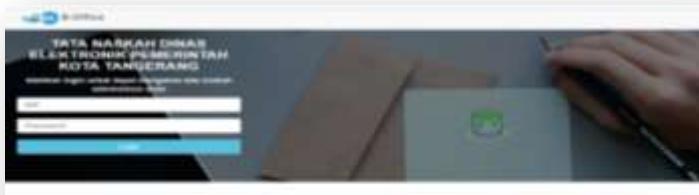
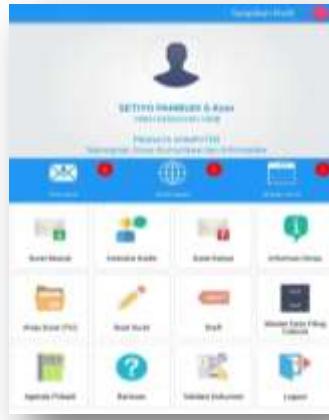
1. e-Planning;
2. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD);
3. Sistem Informasi Evaluasi dan Pelaporan (SIEVLAP);
4. Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah (SIPBD);
5. Sistem Informasi Kepegawaian Daerah (SIKDA);
6. Sistem Informasi Petugas Lapangan (SIGAP);
7. Aplikasi Portal eGov;
8. Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan (SIAP);
9. Aplikasi e-Office;
10. Dashboard LIVE;
11. Sistem Informasi Statistik Daerah (SISTAD);



12. Sistem Pengelolaan, Penatausahaan, dan Pelaporan Keuangan Kota Tangerang (SP3KTRA);

13. Aplikasi e-Audit.

Beberapa aplikasi diatas sudah bisa diakses melalui versi Web dan *mobile*.

Aplikasi e-Office	
Versi website	Versi android
	
Aplikasi Dashboard Laksa	
Versi website	Versi android
	



Permasalahan yang dihadapi

1. Aplikasi dibangun dengan menggunakan *platform* teknologi yang berbeda;
2. Belum selesainya koordinasi teknis dengan LKPP terkait dengan integrasi aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Solusi Terhadap Permasalahan

1. Melakukan pemetaan terhadap *platform* aplikasi yang berbeda;
2. Koordinasi lebih lanjut dengan LKPP agar SIRUP dan SPSE bisa terintegrasi.

III.4.4 SASARAN 4

Terwujudnya peningkatan investasi dan kemudahan perijinan

Tabel 3.16. Capaian Kinerja Sasaran 4

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				2018		
		2014	2015	2016	2017	Target	Realisasi	%
Jumlah penanaman modal (investasi)	Rp. Triliun	4,28	5,07	6,86	7,68	6,75	6,79	100,59
Persentase perizinan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Rata-rata capaian kinerja sasaran 4 melalui 2 indikator kinerja Tahun 2018 adalah sebesar 100,30%, dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Beberapa informasi penting setiap indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

III.4.4.1 Jumlah Penanaman Modal (Investasi)

Kinerja sasaran peningkatan investasi dan kemudahan perijinan dicapai melalui indikator kinerja jumlah penanaman modal (investasi) dengan target sebesar Rp. 6,75 triliun dan terrealisasi sebesar Rp. 6,79 triliun atau 100,59% dari target, menunjukkan bahwa realisasi dari Penanaman Modal pada tahun 2018 melebihi target. Pencapaian target indikator jumlah penanaman modal (investasi) terdiri dari Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Izin Usaha Penanaman Modal Asing (PMA).

Prediksi Bank Dunia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada perekonomian dunia pada Tahun 2018 akan mencapai 5,2%, prospek ekonomi



Indonesia terus positif selain faktor permintaan domestik yang menguat, harga komoditas global yang tinggi juga diperkirakan mampu mendorong investasi dan menghasilkan pertumbuhan modal tercepat dalam periode lebih dari lima tahun. Bank Dunia juga memperkirakan defisit neraca transaksi berjalan Indonesia akan melebar karena sejumlah faktor diantaranya permintaan dalam negeri yang lebih tinggi, kondisi perdagangan yang lebih lemah dan pertumbuhan global yang lebih lambat. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada realisasi investasi Izin Usaha setiap tahunnya. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17. Nilai Investasi di Kota Tangerang berdasarkan Izin Usaha Tahun 2014-2018

Tahun	Data Hasil IU PMDN		Data Hasil IU PMA		Dalam Jutaan Rp (Kurs 1 USD = Rp. 13.300,-)
	Jumlah Izin	Jumlah Investasi Rp (Jutaan)	Jumlah Izin	Nilai Dalam USD (Ribuan)	
2014	38	3.837.046,70	48	538.854,80	6.735.685,00
2015	30	1.994.319,40	47	133.772,40	1.672.155,00
2016	35	3.652.727,10	51	239.514,80	6.735.685,00
2017	1.287	5.594.922,80	51	157.414,20	7.688.531,70
2018	1.070	4.896.781,70	78	142.337,50	6.791.252,60

Sumber: DPMPTSP, 2018

Tabel 3.18. Nilai Investasi di Kota Tangerang berdasarkan Izin Usaha selama Tahun 2018

No	Bulan	PMDN		PMA		JUMLAH PMDN + PMA		
		Jumlah Proyek	Nilai Investasi Dalam Jutaan Rupiah (Rp)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi Dalam Ribuan USD (US\$)	Nilai Investasi Dalam Jutaan Rupiah (Rp) 1 USD = Rp.13,300,-	Jumlah Proyek	
1	Januari	30	24.240,0	3	5.295,5	70.430,2	33	94.670,2
2	Februari	111	156.824,4	5	13.825,0	185.255,0	116	342.079,4
3	Maret	108	274.618,2	13	42.228,2	561.635,1	121	836.253,3
4	April	138	1.495.642,6	18	39.359,3	523.478,7	156	2.019.121,3
5	Mei	142	816.791,7	16	25.084,1	333.618,5	158	1.150.410,2
6	Juni	100	958.978,6	8	9.605,8	127.757,1	108	1.086.735,7
7	Juli	126	228.175,0	2	1.165,4	15.500,0	128	243.675,0
8	Agustus	122	590.595,4	0	0	0	122	590.595,4
9	September	50	171.823,0	0	0	0	50	171.823,0
10	Oktober	22	59.453,2	1	180,1	2.395,7	23	61.848,9
11	November	115	111.489,6	11	5.298,5	70.469,4	126	181.959,0
12	Desember	6	8.150,0	1	295,6	3.931,2	7	12.081,2
Jumlah		1.070	4.896.781,7	78	142.337,5	1.894.470,9	1.148	6.791.252,6

Sumber: DPMPTSP, 2018



Berdasarkan data realisasi penanaman modal tahun 2018, beberapa perusahaan dari total realisasi penanaman modal meningkat karena adanya perluasan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang menanamkan modalnya dapat mengembangkan usahanya. Meningkatnya penanaman modal sejalan dengan meningkatnya kepercayaan penanaman modal terhadap perekonomian Indonesia, antara lain juga didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal. Memudahkan para investor dan melayani lebih baik lagi investor untuk penanaman modal. Dilihat dari tabel Nilai Investasi PMDN dan PMA terdapat 1.148 proyek dengan total nilai Rp. 6,79 T.

Upaya yang telah dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai penanaman modal (investasi) melalui kegiatan:

1. Penyelenggaraan Pameran Investasi yang dilaksanakan 4 kali yaitu 2 kali pameran keluar Daerah , 1 kali Tangerang Expo dan 1 kali Festival Cisadane
2. Sosialisasi LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dengan anggaran Rp. 74.290.000,- yang dilaksanakan dengan mengundang 200 perusahaan PMA dan PMDN dengan materi Arah Kebijakan Penanaman Modal di kota Tangerang Serta Praktik Cara Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal secara Online.
3. Sosialisasi Pelayanan Perijinan yang dilaksanakan mengundang 400 masyarakat dengan materi informasi jenis-jenis perizinan, persyaratan & biaya. Banner informasi pelayanan perijinan (Jenis Perizinan yang dilayani oleh DPMPTSP Kota Tangerang) yang terpasang di Kelurahan dan Kecamatan, Jasa Publikasi Iklan media cetak mengenai Sosialisasi tentang perizinan sebanyak 23 kali tayang.
4. Rapat-Rapat Koordinasi Bidang Pembangunan melaksanakan rapat pertimbangan yang dipimpin oleh Walikota dan SKPD terkait. Rapat ini bertujuan untuk mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) yang berdampak skala besar terhadap investasi dan lingkungan.
5. Pengadaan sarana dan prasarana yaitu menyediakan media promosi (Leaflet, CD, Souvenir, Banner), pemeliharaan Billboard/Baliho dan Belanja Jasa Publikasi dalam Majalah



6. Kajian Potensi dan prasarana investasi melaui penyusunan kajian peraturan penanaman modal, penyusunan kajian peraturan pembangunan, penyusunan kajian pemkes.

Permasalahan yang dihadapi

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Belum sepenuhnya tersedianya data peluang pasar investasi di Kota Tangerang sebagai acuan Perusahaan untuk berinvestasi Di Kota Tangerang
2. Masih banyaknya Perusahaan PMA dan PMDN yang belum melaporkan (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) Setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal untuk mengetahui perkembangan investasi Di Kota Tangerang. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal. LKPM ditujukan untuk memantau realisasi investasi dan produksi. LKPM mencakup kegiatan penanaman modal yang dilakukan perusahaan di setiap lokasi dan bidang usaha investasi, kecuali bidang usaha perdagangan. Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan penanaman modal di bidang usaha perdagangan, LKPM cukup berdasarkan lokasi yang telah dinyatakan pada Izin Prinsip. Masih banyak perusahaan yang tidak melaporkan LKPM.
3. Masih banyaknya Masyarakat atau Investor yang belum mengetahui tentang prosedur dan kemudahan perizinan di Kota Tangerang.

Solusi terhadap Permasalahan

Upaya untuk mendukung pencapaian target jumlah penanaman modal (investasi) dilaksanakannya kegiatan:

1. Pembuatan Kajian Potensi dan prasarana investasi;
2. Sosialisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dengan mengundang 100 perusahaan;
3. Mengikuti Pameran investasi.



III.4.4.2 Persentase perizinan tepat waktu

Kinerja sasaran peningkatan investasi dan kemudahan perijinan dicapai melalui indikator kinerja Presentase perizinan tepat waktu dengan target sebesar tahun 2018 sebesar 100.00% dan direalisasikan sebesar 100.00% dengan rumus perhitungan pembilang yaitu Jumlah perizinan yang diterbitkan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku dan penyebut yaitu Jumlah permohonan perizinan yang memenuhi syarat lengkap sesuai peraturan berlaku.

Realisasi Perizinan tahun 2018 DPMPTSP telah melayani 123 jenis perijinan dengan total jumlah ijin untuk Bidang Pembangunan sebanyak 1.771 Izin, untuk Bidang Pemkes sebanyak 8.252 izin, untuk Bidang Penanaman Modal sebanyak 8.930 Izin. Secara keseluruhan izin yang selesai dilaksanakan di DPMPTSP sebanyak 18.957 Izin

Tabel 3.19. Jumlah Perizinan Bidang Pembangunan

No	SK IZIN	JUMLAH
I	Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan	1.771
1	Izin Lokasi	0
2	izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)	247
3	izin mendirikan bangunan (IMB)	1.073
4	Izin Lingkungan	75
5	Izin Mendirikan Klinik Pratama	0
6	Izin Mendirikan Klinik Utama	0
7	Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	30
8	Izin Pelayanan Pengolahan Sampah	0
9	Izin Pembuangan Air Limbah	22
10	Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota	0
11	Sertifikat Laik Fungsi	1
12	Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun	0
13	Pengesahan Rencana Tapak	0
14	Rekomendasi Menara Telekomunikasi	0
15	Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas	2
16	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup(SPPL)	321

Sumber: DPMPTSP



Tabel 3.20. Jumlah Perizinan Bidang Pemerintahan dan Kesra

No	SK IZIN	JUMLAH
II	Jumlah Izin Bidang Pemerintahan dan Kesra	8.252
A	Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan	3.287
1	Izin Trayek (Pembaharuan SK KP, PK/BN, Peremajaan/ Penggantian Kendaraan)	180
2	Izin Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia	2
3	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	1
4	Izin Perparkiran	12
5	Pengajuan Persetujuan Peremajaan/Penggantian Kendaraan	5
6	Pengantar Balik Nama Kendaraan	35
7	Pengantar Plat Kuning	7
8	Insidentil Kendaraan	2
9	Izin Usaha Angkutan Barang	15
10	Izin Usaha Angkutan Pariwisata	0
11	Izin Usaha Angkutan Karyawan	0
12	Izin Usaha Angkutan Sekolah Mengemudi	0
13	Izin Usaha Angkutan Sewa	0
14	Izin Usaha Angkutan Taksi	0
15	Izin Usaha Angkutan Umum	0
16	Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT)	3
17	Izin Operasional Angkutan Karyawan	0
18	Izin Operasional Angkutan Sekolah Mengemudi	25
19	Kartu Izin Usaha	1.038
20	Bangunan Makam	222
21	Perpanjangan Bangunan Makam	0
22	Perpanjangan Penggunaan Tanah Makam	1.740
	Jumlah Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan	3.287
B	Bidang Pelayanan Perizinan Kesra	4.965
1	Izin Pendirian Sekolah	1
2	Sekolah Menengah Pertama	0
3	Izin Pendirian Kursus	25
4	Izin Laboratorium Klinik Pratama	0
5	Izin Optik	3
6	Izin Toko Obat	15
7	Izin Apotek	89
8	Izin Klinik Utama	2
9	Izin Klinik Pratama	50
10	Izin Operasional dan Klasifikasi Rumah Sakit Kelas C	1



No	SK IZIN	JUMLAH
11	Izin Operasional dan Klasifikasi Rumah Sakit Kelas D	0
12	Izin Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	61
	SURAT IZIN PRAKTEK	
13	- Bidan	335
14	- Apoteker	233
15	- Dokter Umum,	475
16	- Dokter Gigi	117
17	- Dokter Spesialis	333
18	- Perawat	1.254
19	- Fisioterapis	57
20	- Radiografer	106
21	- Okupasi Terapis	2
22	- Terapis Wicara	3
23	- Tenaga Teknis Kefarmasian	309
24	- Ahli Teknologi Laboratorium Medik	191
25	- Tenaga Sanitarian	32
26	- Penata Anestesi	7
27	- Tenaga Gizi	50
28	- Refraksionis Optisien	10
29	- Terapis Gigi dan Mulut	31
30	- Oprtosis Prostetis	0
31	- Perekam Medis	75
32	- Tenaga Elektromedis	15
33	- Transfusi Darah	0
34	- Tenaga Kesehatan Tradisional	2
	Penghentian Praktek / Kerja	
	- Bidan	3
	- Apoteker	61
121	- Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis	245
	- Penutupan Apotek	26
	- Penutupan Klinik	0
35	Izin Praktek Dokter Hewan Praktik Mandiri/Bersama	5
36	Izin Praktik Tenaga Paramedik Veteriner	0
37	Izin Penyelenggaraan Radiologi Diagnostik	4
38	Izin Penyelenggaraan Klinik Hemodialisa	0
39	Izin Penyelenggaraan Unit Pelayanan Dialisis di RS	2
40	Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat	36
41	Surat Tanda Terdaftar Penyehat Tradisional	10



No	SK IZIN	JUMLAH
42	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional	0
43	Sertifikat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Tertentu	0
44	Izin Operasional Pengendalian Vektor	3
45	Izin Toko Alat Kesehatan	2
46	Sertifikat Hygiene Sanitasi Rumah Makan/Restoran	2
47	Sertifikat Hygiene Sanitasi Jasa Boga/Catering	6
48	Sertifikat Laik Sehat Hotel	3
49	Sertifikat Hygiene Sanitasi Depot Air Minum	1
50	Surat Izin Praktik Dokter Hewan Tenaga Asing	0
51	Izin Depo/Toko Obat Hewan	0
52	Izin Klinik Hewan	0
53	Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi Cabang	5
54	Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan Cabang	1
55	Rekomendasi Perluasan Gudang PBF Cabang	0
56	Rekomendasi Perluasan Gudang PAK Cabang	0
57	Rekomendasi Pergantian PJ Teknis PBF Cabang	3
58	Rekomendasi Pergantian PJ Teknis PAK Cabang	0
59	Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Lab Klinik Madya	0
60	Rekomendasi Pergantian Kepala Cabang PBF Cabang	2
61	Rekomendasi Pergantian Kepala Cabang PAK Cabang	1
62	Rekomendasi Pengendalian Vektor	3
63	Surat Izin Praktik Dokter Mandiri	15
64	Surat Izin Praktik Dokter Fasyankes	283
65	Surat Izin Praktik Praktik Perawat Fasyankes	357
66	Rekomendasi Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	2
67	Izin dan Penutupan Pedagang Eceran Obat	2
68	Izin Penyelenggaraan Optikal	2
	Jumlah Bidang Kesra	4.969

Sumber: DPMPTSP, 2018

Tabel 3.21. Jumlah Perizinan Bidang Penanaman Modal

NO	SK IZIN	JUMLAH
	BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL	8.930
1	Izin Industri (Izin Usaha Industri, Izin Tanda Daftar Industri, Izin Perluasan)	1
2	Izin Penanaman Modal	
	a. Izin Prinsip	27



NO	SK IZIN	JUMLAH
	b. Izin Usaha	22
3	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	2.305
4	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	2.675
5	Izin Reklame	3.433
6	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	43
7	Izin Usaha Toko Modern;	2
8	Izin Usaha Jasa Konstruksi;	112
9	Tanda Daftar Gudang;	14
10	Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	294
11	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	0
12	Izin Usaha Simpan Pinjam	0
13	Izin Penyelenggaraan Warung Internet	0
14	Izin Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi	0
15	Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Agen	0
16	SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol)	0
17	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)	2

Upaya yang telah dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target indikator tingkat pelayanan waktu pengurusan perizinan tepat waktu dilaksanakannya kegiatan:

1. Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Perizinan.
2. Melaksanakan Kegiatan Penataan Ruang SKPD (Penataan Pelayanan berbentuk Mal Pelayanan Publik) untuk memberikan kenyamanan kepada Masyarakat dalam mengurus proses perizinan dan Pelayanan Publik lainnya.
3. Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk memberikan fasilitas kebutuhan counter Mal Pelayanan Publik kepada Masyarakat dalam mengurus proses perizinan dan pelayanan publik lainnya.
4. Melaksanakan Pemeliharaan ISO 9001:2015 untuk meningkatkan mutu pelayanan.
5. Melaksanakan Penataan Parkir dalam rangka memberikan fasilitas parkir Mal Pelayanan Publik dan memberikan kenyamanan kepada Masyarakat.
6. Melaksanakan Penataan Taman dalam rangka memberikan fasilitas Mal Pelayanan Publik dan memberikan keindahan kepada Masyarakat.



7. Standar Operasional Prosedur DPMPTSP sudah disusun dan diharapkan dapat berjalan dengan efektif.

Permasalahan yang dihadapi

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi untuk tingkat pelayanan waktu pengurusan perizinan tepat waktu seperti:

1. Terbatasnya SDM;
2. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam pengurusan perizinan.

Solusi dari Permasalahan

Bertolak dari permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka Upaya yang akan dilakukan antara lain berupa:

1. Penyampaian izin Via Pos.
2. Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pelayanan perizinan di Kecamatan dengan mengundang 400 orang terdiri unsur RT, RW, Kelurahan, Tokoh Masyarakat dan melaksanakan Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat.
3. Melaksanakan Bimbingan Teknis pegawai bekerjasama dengan BKPSDM.

III.4.5 SASARAN 5

Meningkatnya Kepariwisataan

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.22. Capaian Kinerja Sasaran 5

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				2018		
		2014	2015	2016	2017	Target	Realisasi	%
Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	478.715	500.493	536.963	1.088.700	363.642	1.598.150	439,48
Rata-rata lama kunjungan wisatawan (Rata-rata lama menginap di hotel)	Hari	1,33	1,55	1,80	1,96	2,15	2,20	102,33



Rata-rata capaian kinerja Tahun 2018 pada sasaran 5 melalui 2 indikator adalah sebesar 270,91%, dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Beberapa informasi penting setiap indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

III.4.5.1 Jumlah kunjungan wisatawan

Kinerja sasaran meningkatnya kepariwisataan dicapai melalui Indikator kinerja sasaran jumlah kunjungan wisatawan dengan dengan target 363.642 orang dan direalisasikan sebanyak 1.598.150 orang atau 439,48%. Pencapaian indikator melalui formulasi perhitungan jumlah total kunjungan wisatawan ke Kota Tangerang pada tahun 2018. Jumlah tersebut terdiri dari wisatawan nusantara sebanyak 1.360.154 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 237.996 orang. Apabila dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan tahun 2017 yang berjumlah 1.088.700 orang, maka jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Tangerang pada tahun 2018 meningkat 46,79 %.

Tabel 3.23. Realisasi Kunjungan Wisatawan Tahun 2018

Kategori Wisatawan	2014	2015	2016	2017	2018		
					Target	Realisasi	%
Wisnus	413.743	431.743	461.502	793.390	303,642	1.360.154	447,95
Wisman	64.972	68.750	75.461	295.357	60.000	237.996	396,66
Jumlah	478.715	500.493	536.963	1.088.700	363.642	1.598.150	439,48

Sumber : Disbudpar 2018 Bidang Pariwisata Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Kunjungan wisatawan ke Kota Tangerang secara kumulatif meski mengalami peningkatan, namun kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan 0,19% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 295.357 orang, sedangkan pada tahun 2018 hanya mencapai 237.996 orang. Hal ini disebabkan wisatawan mancanegara memilih menggunakan jasa akomodasi di Kota Tangerang Selatan, yang dilengkapi dengan sarana-sarana penunjang lainnya seperti centre park.

Untuk kunjungan wisatawan nusantara mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu mencapai 71,44% dari 793.390 orang pada tahun 2017 meningkat 1.360.154 orang pada tahun 2018. Realisasi jumlah kunjungan wisnus terdiri dari wisatawan yang menginap di hotel sebanyak 821.056 orang dan wisatawan yang



berkunjung ke objek wisata daerah, antara lain ke situ bulakan, situ cipondoh, festival cisadane, Festival budaya nusantara 2, culinary night dan taman-taman tematik sebanyak 539.098 orang. Peningkatan wisatawan yang menginap di hotel disebabkan adanya event-event nasional di Kota Tangerang pada tahun 2018, antara lain Rapimnas HIPMI, Mukernas Organda ke 3 se Indonesia, Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi (SAIK), Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 54 dan Health Cities Summit dan Tanwir Pemuda Muhammadiyah Se- Indonesia. Selain itu, disebabkan pula dengan bertambahnya volume wisnus dari daerah yang transit di Kota Tangerang baik dalam rangka melanjutkan perjalanan ke kota lain di Indonesia maupun melakukan perjalanan ibadah umrah. Selain itu, disebabkan bertambahnya pembangunan taman-taman tematik

Tabel 3.24. Kunjungan Wisatawan Nusantara Ke Objek Wisata

No	Nama Objek Wisata	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
1	Kampung Bekelir	366	1.237	275	-	-	89	103	106	147	175	155	-
2	Taman Potret	9.320	8.540	9.460	9.300	8.561	18.829	2.778	5.163	3.235	6.698	11.295	20.982
3	Taman Bambu	2.000	2.300	2.050	2.994	2.101	1.130	1.245	1.086	1.521	2.636	5.245	5.763
4	Taman Ekpresi	3.550	3.492	2.654	2.526	2.132	5.841	1.747	2.487	2.574	4.739	6.133	5.693
5	Taman Prestasi	2.783	3.250	1.934	3.288	2.587	6.020	1.053	531	2.842	3.352	3.771	8.610
6	Taman Kunang-Kunang	3.550	3.492	2.654	3.195	1.228	5.876	621	588	525	901	725	773
7	Taman Pisang	3.679	2.625	3.891	2.904	1.713	3.645	1.677	1.504	1.574	2.431	3.838	3.530
8	Taman Ecopark	215	119	175	192	182	1.270	2.420	3.998	3.125	6.252	10.571	8.333
9	Taman Gajah	11.650	10.190	13.049	13.932	14.101	28.018	4.835	7.605	3.585	11.474	19.915	25.362
10	Situ Cipondoh	725	-	-	-	-	3.786	4.034	3.940	3.820	3.766	3.898	4.216
11	Situ Bulakan	625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Taman Pramuka	621	455	534	497	473	3.614	658	416	815	1.213	1.167	1.348
JUMLAH		39.084	35.700	36.676	38.828	33.078	78.118	21.171	27.424	23.763	43.637	66.713	84.610

Sumber : Disbudpar, 2018

Tabel 3.25. Jumlah Pengunjung pada Event di Kota Tangerang



No.	Nama Event	Jumlah Pengunjung
1	Festival Cisadane	80.000
2	Festival Budaya Nusantara	30.000
3	Culinary Night	75.000
	TOTAL	185.000

Sumber: Disbudpar, 2018

Tabel 3.26. Jumlah Taman Tematik

No	Nama Taman Tematik	Alamat
1.	Taman Gajah	Jl. Perintis Kemerdekaan Kec. Tangerang
2.	Taman Pramuka	Jl. Daan Mogot Kec. Tangerang
3.	Taman Eco Park	Jl. Pintu air 10 Kel. Mekarsari Kec. Neglasari
4.	Taman Elektrik	Jl. Satria Sudirman Kec. Tangerang
5.	Taman Ekspresi	Jalan Panda Raya Perum 1 Kec. Cibodas
6.	Taman Potret	Jalan Jenderal Sudirman Kec. Tangerang
7.	Taman Prestasi	Jalan Jenderal Ahmad Yani Kec. Tangerang
8.	Taman Bambu	Jalan Perintis Kemerdekaan
9.	Taman Nobar	Jalan Berhias Kec. Karawaci
10.	Kalipasir Promenade	Jl. Perintis Kemerdekaan No.38
11.	Taman Kunci	Jalan MH. Thamrin
12.	Hutan Kota	Jalan Daan Mogot
13.	Taman Kunang-kunang	Jalan Pandan Raya
14.	Cisadane walk	Jalan Benteng Jaya
15.	Taman Dayung	Jalan Dadang Suprapto
16.	Taman Pisang	Jalan Pandan Raya
17.	Jam Gede Jasa	Jalan Sudirman
18.	Taman Laksa	Jalan M Yamin
19.	Skate Park	Jalan M. Yamin
20.	Cisadane River Promade	Jalan Imam Bonjol
21.	Tugu Adipura Akhlaqul Karimah	Jalan M. Yamin-Jalan Veteran
22.	Taman Situ Cipondoh	Jalan KH. Hasyim Ashari
23.	Taman Alun-alun Neglasari	Kedaung Wetan
24.	Flying Deck Cisadane	Jalan Kali Pasir Indah
25.	Taman Herbal	Jalan Daan Mogot
26.	Taman Burung Perak	Jalan M. Yamin
27.	Alun-alun Kota Tangerang	Jalan Satria

Sumber : Disbudpar, 2018

Upaya yang telah dilakukan



Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian indikator jumlah kunjungan wisatawan sehingga melebihi target adalah melalui kegiatan:

1. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri yang dibagi ke dalam dua sub kegiatan yaitu promosi luar daerah dan culinary night setiap bulan di objek-objek wisata Kota Tangerang;
2. Sosialisasi Sadar Wisata kepada masyarakat di sekitar objek wisata daerah;
3. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival-Festival Pada Objek Wisata Daerah berupa Festival Cisadane yang setiap tahunnya mengalami peningkatan kunjungan wisatawan dan di tahun 2019 Festival Cisadane masuk ke dalam 100 kalender event nasional;
4. Pengembangan objek pariwisata unggulan berupa pembangunan Flaying Deck lanjutan di bantaran sungai Cisadane sepanjang 60 meter dan pembangunan dermaga apung;
5. Pembuatan Media Promosi Pariwisata Kota Tangerang berupa penayangan promosi multimedia dan pemasangan banner outdoor di sejumlah lokasi strategis;
6. Penataan RTH;
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Dekorasi Kota dan Reklame;
8. Penataan Taman Lingkungan.

Permasalahan Yang dihadapi

Terdapat permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator selama tahun 2018 seperti:

1. Belum optimalnya pendataan terkait Data Kunjungan Wisatawan Pada Event-Event Festival.
2. Belum tertatanya secara baik pedagang kaki lima di kawasan wisata kuliner
3. Terbatasnya Lahan Parkir Yang Memadai
4. Masih terbatasnya pentas seni dan budaya di objek wisata daerah
5. Terbatasnya stall-stall penjualan suvenir hasil kerajinan di objek wisata daerah.
6. Belum optimalnya sentra informasi pariwisata
7. Belum maksimalnya kampanye event-event festival

Solusi terhadap permasalahan



Kegiatan yang dilakukan di tahun 2019 untuk meningkatkan pencapaian indikator kinerja sasaran melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara ke beberapa daerah dan peningkatan penyelenggaraan wisata kuliner
2. Pembinaan Duta Pariwisata Kang Dan Nong sebanyak 50 orang;
3. Sosialisasi Sadar Wisata kepada masyarakat yang bertema pembangunan kampung-kampung wisata;
4. Penyelenggaraan Festival-Festival Pada Objek Wisata Daerah;
5. Pelatihan Pemandu Wisata;
6. Pembuatan Media Promosi Pariwisata Kota Tangerang ;
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Dekorasi Kota dan Reklame;
8. Penataan Taman Lingkungan di beberapa kecamatan.

III.4.5.2 Rata-Rata Lama Kunjungan Wisatawan (Rata-Rata Lama Menginap Di Hotel)

Kinerja sasaran meningkatnya kepariwisataan dicapai melalui indikator kinerja sasaran Rata-rata lama kunjungan wisatawan (rata-rata menginap di hotel) dengan target 2,15 hari dan direalisasikan 2.20 hari atau 102,33%. Pencapaian indikator ini melalui formulasi perhitungan jumlah malam tempat tidur yang terpakai dibagi jumlah wisatawan yang menginap dikali 100%.

Tahun 2018 Jumlah tempat tidur hotel yang terpakai sebanyak 23.300 tempat tidur dan jumlah wisatawan yang menginap sebanyak 1.059.052 orang. Faktor lain penyebab pencapaian indikator kinerja sasaran melebihi target, adanya event-event nasional yang digelar di Kota Tangerang di tahun 2018 rata-rata menginap 2 sampai 3 hari, seperti Rapimnas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia selama 4 (empat) hari dari tanggal 6-9 Maret 2018 di Hotel Novotel yang dihadiri oleh 2000 peserta dari 34 Badan Pengurus Daerah; Musyawarah Kerja Nasional Pengusaha Organda yang ke 3 di hotel Allium pada tanggal 7-9 Agustus 2018 yang dihadiri oleh perwakilan dari 33 provinsi se-Indonesia; Perhelatan akbar di bidang kehumasan yaitu Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi (SAIK) tahun 2018 dari tanggal 2-4 Desember 2018 yang dihadiri oleh 1500 peserta dari seluruh Indonesia; Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 54 dan Health Cities Summit tahun 2018 yang digelar mulai tanggal 4-6 November



2018; Tanwir Pemuda Muhammadiyah se-Indonesia dari tanggal 27-30 Nopember 2018. di samping itu, bertambahnya jumlah hotel di tahun 2018 dari 54 meningkat menjadi 61 hotel.

Tabel 3.27. Jumlah Hotel dan Kelas Hotel di Kota Tangerang

Kelas Hotel	Jumlah				Keterangan
	2015	2016	2017	2018	
Bintang 1	1	1	1	2	Terdaftar
Bintang 2	9	9	9	9	Terdaftar
Bintang 3	5	8	10	10	Terdaftar
Bintang 4	6	7	8	8	Terdaftar
Bintang 5	1	1	1	1	Terdaftar
Non Bintang	29	30	31	31	Terdaftar
Jumlah	51	56	60	61	

Sumber data : Disbudpar 2018 Bidang Pariwisata Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Upaya yang telah dilakukan

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian indikator rata-rata lama kunjungan wisatawan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi hotel;
2. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya berupa pembentukan ASITA Kota Tangerang;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan. Pemantauan dilakukan terhadap 100 usaha jasa pariwisata yang tersebar di 13 kecamatan;
4. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata.

Permasalahan Yang dihadapi

Terdapat permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator selama tahun 2018 seperti:

1. Belum optimalnya agenda tetap tahunan tentang festival yang diselenggarakan, sehingga wisatawan nusantara dan mancanegara lebih memilih berkunjung ke daerah-daerah lain yang telah memiliki agenda tetap tahunan.
2. Banyaknya usaha jasa pariwisata yang belum memiliki standar usaha jasa pariwisata.
3. Lemahnya peran duta-duta pariwisata dalam pengembangan pariwisata.
4. Promosi pariwisata daerah kota Tangerang belum maksimal.

Solusi terhadap permasalahan



Kegiatan yang dilakukan di tahun 2019 untuk meningkatkan pencapaian indikator kinerja sasaran melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi;
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan;
3. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata.

III.4.6 SASARAN 6

Terwujudnya Industri Yang Maju

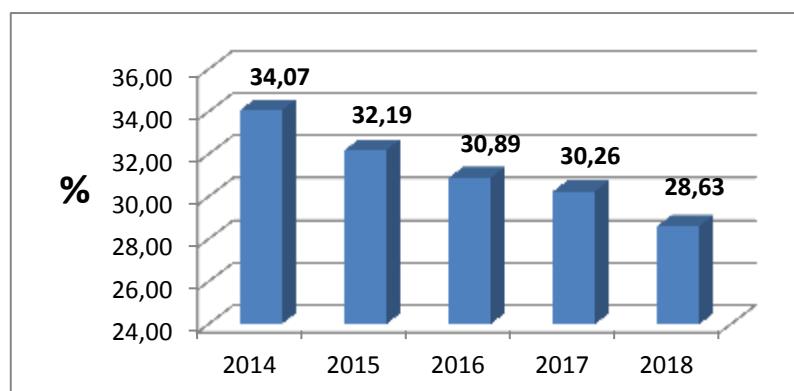
Pencapaian sasaran 6 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.28. Capaian Kinerja Sasaran 6

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				2018		
		2014	2015	2016	2017	Target	Realisasi	%
Nilai PDRB sektor industri (ADHK)	Rp Milyar	34.007,79	35.049,96	36.045,90	37.385,84	40.967,26	38.830,48	94,78

Kategori Industri Pengolahan merupakan lapangan usaha terbesar kedua yang berperan dalam perekonomian Kota Tangerang. Sejak tahun 2016, kontribusi Kategori Industri Pengolahan turun menjadi peringkat kedua setelah Kategori Transportasi dan Pergudangan. Tahun 2018, Kontribusi Industri Pengolahan sebesar 28,63 persen dari PDRB ADHB. Lima tahun terakhir Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terus menurun.

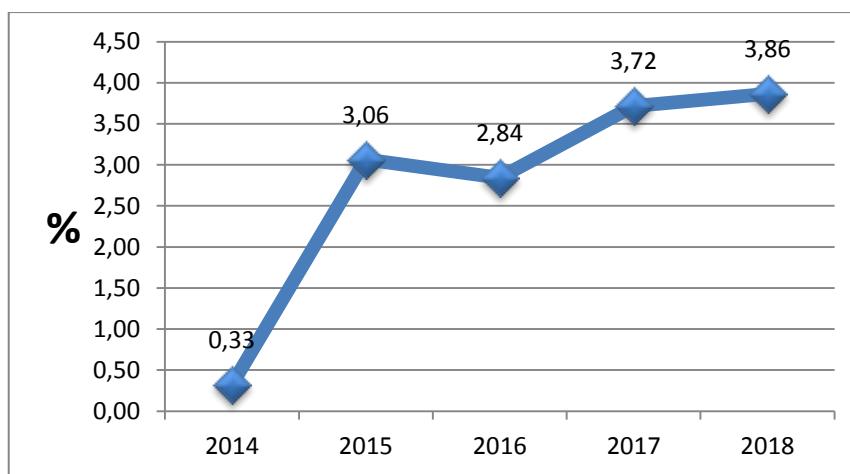
Tabel 3.29. Perkembangan Kontribusi Kategori Industri Pengolahan pada PDRB ADHB 2014 - 2018





Sedangkan Laju pertumbuhan kategori Industri Pengolahan pada PDRB ADHK tahun 2018 adalah sebesar 3,86 persen, pertumbuhannya lebih cepat dibanding tahun 2017 yang sebesar 3,72 persen. Sub lapangan usaha yang mencatatkan laju pertumbuhan terbesar adalah Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik, kemudian diikuti oleh Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman dan Industri Alat Angkutan.

Gambar 3.7. Pertumbuhan Ekonomi kategori Industri Pengolahan pada PDRB ADHK Kota Tangerang 2014-2018



Sumber: BPS Kota Tangerang (diolah)

Upaya yang telah dilakukan

Upaya yang telah dilakukan dalam mewujudkan industri yang memiliki standar, yaitu melalui :

1. Pembinaan-pembinaan bagi Industri Kecil, Menengah dan Besar melalui kegiatan :
2. Pembinaan dan pengawasan dan pengendalian industry di Kota Tangerang, serta
3. Pembinaan industry Hijau dan produk ramah lingkungan,
4. Penyusunan pemetaan wilayah pengembangan industri konveksi dan tahu tempe Kota Tangerang,
5. pendataan perindustrian dan perdagangan, dan
6. pembinaan peningkatan industry kreatif IKM dan masyarakat melalui Bintek Keterampilan dan Pemanfaatan Limbah Industri dalam mendorong peningkatan



pendapatan masyarakat dan meningkatnya pula persentase PDRB Sektor industry (ADHK) di Kota Tangerang.

Upaya-upaya tersebut dilakukan antara lain melalui kegiatan :

- a. Pembinaan desain kemasan Makanan dan minuman,
 - b. Pembinaan peningkatan industry kreatif IKM dan Masyarakat melalui Bintek keterampilan dan Pemanfaatan Limbah Industri,
 - c. Pembinaan keterampilan bagi anggota P2WKSS.
7. Membentuk Tim Teknis Terpadu Pengawasan Barangwajib SNI yang terdiri dari dari Kepolisian RI, BPPOBM Provinsi Banten, LPPOM Propinsi Banten, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP Kota Tangerang, Kecamatan/Kelurahan terkait.
 8. Promosi produk-produk industry baik kecil dan menengah melalui kegiatan Promosi Perdagangan internasional, promosi IKM melalui pameran maupun melalui e-commerce antara lain di Bukalapak, Tokopedia dll.

Permasalahan yang dihadapi

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target yang maksimal tersebut, yaitu :

1. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya penerapan standar industry dalam rangka peningkatan daya saing industry dan meningkatkan pendapatan pelaku industry.
2. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB belum tercapai maksimal (100 %) dikarenakan berbagai kendala, antara lain:
 - a. Banyaknya pabrik/industri di Kota Tangerang yang tutup (gulung tikar) dan pindah ke luar daerah bahkan ke luar negeri.
 - b. Upah buruh di Kota Tangerang sangat tinggi sehingga menjadi penyebab banyaknya pabrik yang menutup usahanya dan pindah ke luar negeri, seperti Vietnam atau daerah di luar Provinsi Banten.
 - c. Biaya produksi yang tinggi sehingga dari tahun ke tahun banyak pengurangan produksi dan PHK, sehingga banyak menimbulkan demo-demo buruh yang mengakibatkan investasi semakin berkurang.



- d. Kurs Dollar terhadap rupiah turun dari Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) menjadi Rp.14.060 (empat belas ribu enam puluh rupiah).

Solusi terhadap permasalahan

Terkait permasalahan tersebut diatas, maka upaya yang akan dilakukan adalah :

1. Pembinaan dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada semua pelaku usaha baik industri kecil, menengah maupun besar, tentang pentingnya penggunaan dan penerapan standar antara lain ISO, GMP dan Standar Nasional Indonesia (SNI) lebih khususnya bagi industri yang menghasilkan produk-produk wajib SNI.
2. Pemberian bantuan Sertifikat SNI gratis terhadap 5 IKM dengan produk wajib SNI yang memenuhi persyaratan sesuai hasil evaluasi Badan Standar Nasional Indonesia.
3. Mengikuti kebijakan yang dituangkan dalam aturan perundang-undangan dengan mensosialisasikan segera semua kebijakan-kebijakan baru yang berlaku, khususnya yang memudahkan dalam iklim berinvestasi dan peningkatan pendapatan negara/daerah.

III.4.7 SASARAN 7

Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan

Pencapaian sasaran 7 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

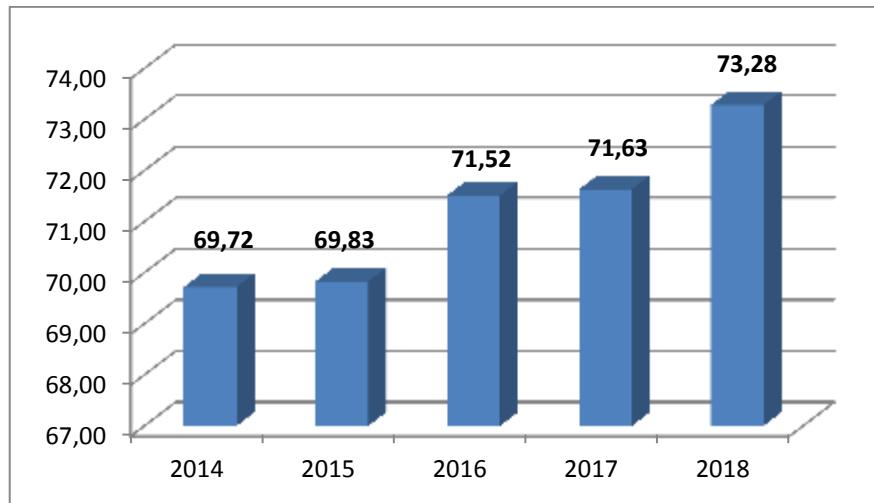
Tabel 3.30. Capaian Kinerja Sasaran 7

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				2018		
		2014	2015	2016	2017	Target	Realisasi	%
Indeks Pendidikan	Point	69,71	69,80	71,52	71,63	70,45	73,28	104,02

Indeks Pengetahuan atau Indeks Pendidikan Kota Tangerang tahun 2018 adalah 73,28. Angka ini meningkat sebesar 1,65 poin dari tahun 2017. Namun dari angka indeks ini masih jauh dari angka maksimalnya (100), sehingga dapat dikatakan pencapaian indikator pengetahuan di Kota Tangerang masih perlu ditingkatkan sehingga masyarakat mempunyai kesempatan dan kemauan untuk menempuh pendidikan lebih tinggi.



Gambar 3.8. Perkembangan Indeks Pendidikan Kota Tangerang Tahun 2014-2018



Sumber: BPS Kota Tangerang (diolah)

Pencapaian pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk menilai kemajuan suatu masyarakat. Hal ini karena masyarakat yang berpendidikan akan lebih mudah menyerap informasi-informasi kemajuan peradaban, sehingga dapat meningkatkan kualitas penduduk daerah yang bersangkutan. Pendidikan juga mempunyai korelasi yang kuat dengan berbagai aspek sosial ekonomi. Berbagai penelitian menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan berkaitan erat dengan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat. Oleh karena itu pembangunan pendidikan sangat penting untuk mencetak generasi yang memiliki kemampuan dan berkualitas unggul bagi kemajuan suatu bangsa.

Pada dasarnya pembangunan pendidikan difokuskan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, juga untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dengan perkembangan dunia usaha.

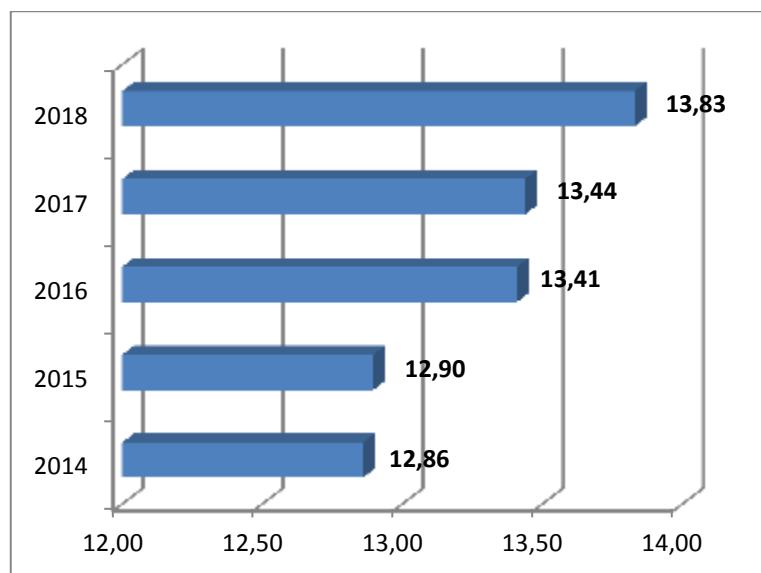
Peningkatan partisipasi masyarakat dan perluasan kesempatan dalam bidang pendidikan, dapat dilihat dari indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk. Kedua indikator ini dalam pembangunan manusia mewakili aspek pengetahuan, yang keberhasilannya memerlukan dukungan kuat dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah.



Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Tangerang pada tahun 2018 adalah 13,83 tahun, berarti setiap penduduk Kota Tangerang yang berusia 7 tahun pada tahun 2018, dapat berharap untuk bersekolah selama 13 tahun lebih, atau kuliah sampai semester II.

Gambar 3.9. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Tangerang
Tahun 2014-2018



Sumber: BPS Kota Tangerang (diolah)

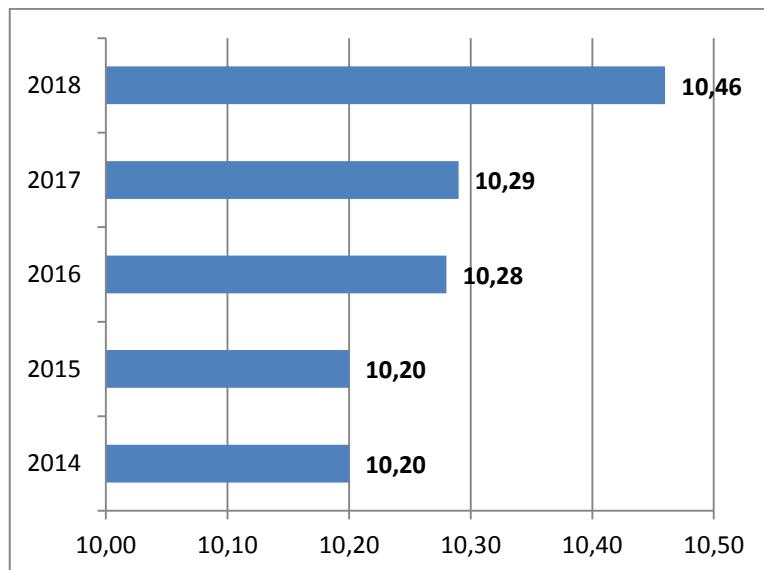
Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yaitu jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal, dengan cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Angka RLS yang dicapai Kota Tangerang pada tahun 2018 adalah 10,46 tahun, artinya rata-rata penduduk Kota Tangerang yang berumur 25 tahun ke atas, bersekolah hingga setara kelas II SMU.



Gambar 3.10. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kota Tangerang Tahun 2014-2018



Sumber: BPS Kota Tangerang (diolah)

Peningkatan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah mengindikasikan adanya perbaikan dalam hal sarana dan prasarana pendidikan serta partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan. Adapun perbaikannya ini juga menjadi penanda bahwa sistem pendidikan di Kota Tangerang selama ini sudah berjalan pada arah yang benar.

Upaya yang telah dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Indeks Pendidikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Biaya Operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri dengan alokasi yang diberikan kepada 1 TK Negeri;
2. Biaya Operasional Pendidikan SD/MI Negeri dan Swasta yang diberikan kepada 339-SD/MI Negeri, 23-SD Swasta, besaran BOP persekolah berdasarkan jumlah siswa dengan tarif Rp.50.000,-/siswa/bln;
3. Biaya Operasional Pendidikan SMP/MTs Negeri dan Swasta yang diberikan kepada 35-SMP/MTs Negeri dan 150-SMP Swasta, besaran BOP persekolah berdasarkan jumlah siswa dengan tarif Rp.105.000,-/siswa/bln.



4. Pembiayaan Tangerang Cerdas SD yang diberikan kepada siswa tidak mampu jenjang SD/MI dengan rincian 10.800-siswa SD dan 1.200-siswa MI dengan besaran Biaya Personal Siswa Rp.80.000,-/siswa/bln.
5. Pembiayaan Tangerang Cerdas SMP yang diberikan kepada siswa tidak mampu jenjang SMP/MTs sebanyak 4.795-siswa dengan besaran Biaya Personal Siswa sebesar Rp.100.000,-/siswa/bln.
6. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal (Paket A, B dan C) yang diberikan kepada 37-lembaga PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat).
7. Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan untuk mendanai penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket A,B dan C sebanyak 4.000-Warga Belajar.
8. Pemberian Insentif guru PAUD/TK/RA/SD/MI/SMP/MTs sebanyak 16.155-Guru SD/MI/SMP/MTs, 4595-guru TK/RA sebesar Rp. 650.000,-/org/bln dan 1200-guru PAUD sebesar Rp.350.000,-/org/bln.

Permasalahan yang dihadapi

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan Indeks Pendidikan seperti masih adanya sebagian kecil masyarakat usia > 15 tahun yang buta aksara.

Solusi terhadap permasalahan

Upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang mendukung langsung terhadap pencapaian Indek Pendidikan disemua jenjang dengan lebih mengutamakan kegiatan prioritas sebagaimana tersebut diatas dengan kegiatan lanjutan yang akan diselenggarakan ditahun yang akan datang sbb :

1. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal (Paket A, B dan C) untuk 37-PKBM;
2. Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan;
3. Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional sebanyak 500 orang;
4. Pemberian Insentif guru PAUD/TK/RA/SD/MI/SMP/MTs sebanyak 16.155-Guru SD/MI/SMP/MTs, 4595-guru TK/RA sebesar Rp. 650.000,-/org/bln dan 1200-guru PAUD sebesar Rp.350.000,-/org/bln.



III.4.8 SASARAN 8

Meningkatnya Aksesibilitas Kesehatan

Pencapaian sasaran 8 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.31. Capaian Kinerja Sasaran 8

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				2018		
		2014	2015	2016	2017	Target	Realisasi	%
Indeks kesehatan	Point	78,60	78,85	78,98	79,05	79,11	79,11	100,00

Indeks Kesehatan atau Indeks Harapan Hidup merupakan turunan dari Angka Harapan Hidup yang telah dicapai dibanding kondisi 'ideal' sesuai standar UNDP yaitu 85 tahun (100 persen). Indikator harapan hidup digunakan untuk mengukur pembangunan di bidang kesehatan. Meningkatnya angka harapan hidup dapat berarti adanya perbaikan pembangunan di bidang kesehatan. Yang biasanya ditandai dengan membaiknya kondisi sosial ekonomi penduduk, membaiknya kesehatan lingkungan dan lain sebagainya. Pada tahun 2018 Indeks harapan hidup masyarakat di Kota Tangerang mencapai 79,11.

Tersedianya sarana kesehatan yang cukup dan sarana transportasi yang lancar sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan yang ada sangat membantu masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang tinggi, tetapi yang tak kalah penting adalah mengingatkan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

Angka Harapan Hidup

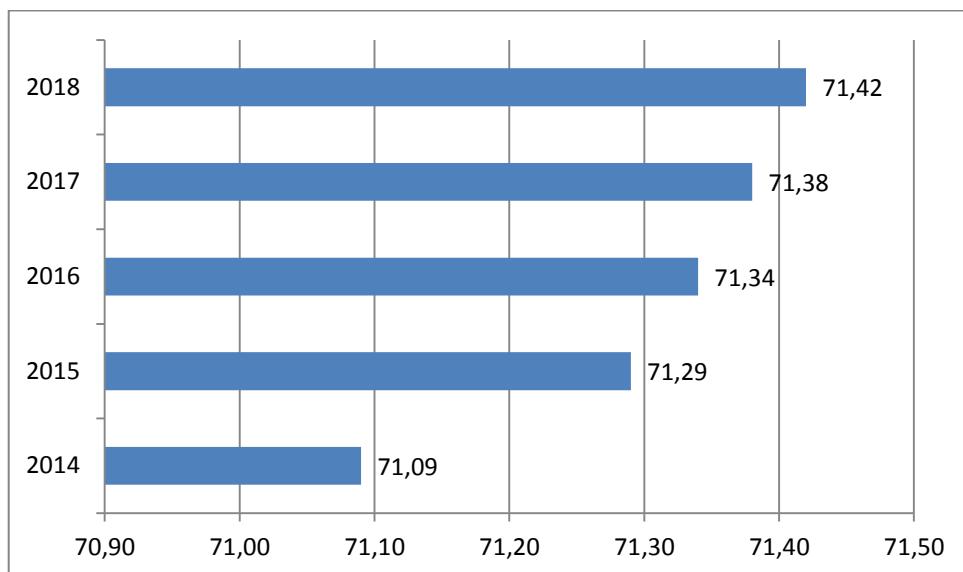
Angka harapan hidup dapat menggambarkan tingkat kesehatan yang telah dicapai masyarakat. Semakin baik tingkat kesehatan masyarakat diharapkan kesempatan untuk hidupnya cenderung semakin besar/lama. Sebaliknya tingkat kesehatan yang buruk akan cenderung memperpendek usia hidup. Angka harapan hidup berbanding terbalik dengan tingkat kematian bayi, artinya semakin tinggi angka kematian bayi maka angka harapan hidup cenderung semakin pendek, demikian pula sebaliknya.

Angka harapan hidup di Kota Tangerang selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu dari 71,09 tahun pada tahun 2014 menjadi 71,42 tahun pada tahun 2018. Angka harapan hidup sebesar 71,42 tahun dapat diartikan bahwa peluang hidup



bayi yang lahir di Kota Tangerang pada tahun 2018 diharapkan dapat hidup sampai usia sekitar 71 tahun lebih.

Gambar 3.11. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Tangerang Tahun 2014-2018



Sumber: BPS Kota Tangerang (diolah)

Upaya yang telah dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian Indeks Kesehatan antara lain melalui:

1. Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk kebutuhan pelayanan Puskesmas dan jaringannya.
2. Pembangunan puskesmas dengan menyempurnakan pembangunan Puskesmas Panunggangan Barat, Peninggilan dan Manis Jaya yang sudah dilakukan pembangunannya pada tahun 2017.
3. Pengadaan Alat Kesehatan dan Laboratorium Puskesmas yang didistribusikan untuk Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas UGD 24 jam dan Persalinan, Puskesmas Petir, Puskesmas Sangiang dan Puskesmas Tanah Tinggi.
4. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas untuk merehab puskesmas Pedurenan, Pondok Bahar, dan Larangan Utara.
5. Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium/Alat Kesehatan antara lain kalibrasi alat-alat laboratorium pada UPT Labkesda.



6. Pengadaan sarana Penunjang Rujukan dengan memenuhi kelengkapan penunjang untuk *Public Service Center* (PSC) dan Operasional Ambulance 119.
7. Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan Permukiman terhadap 49.920 rumah di Kota Tangerang.
8. Pemantauan Kualitas Kesehatan Lingkungan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 381 sampel (air bersih sumur, air depot isi ulang, PDAM penduduk dan air TPM).
9. Pembinaan dan penyuluhan teknis penatalaksanaan bagi sarana kesehatan yang dilakukan terhadap 64 FKTP Klinik/Praktik Mandiri di Kota Tangerang.
10. Perawatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium yaitu terselenggaranya survailen sistem manajemen mutu laboratorium UPT Labkesda sesuai dengan ISO 17025:2017 dan Kepmenkes RI No.298/MENKES/SK/III/2008.
11. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Instalasi Farmasi yaitu terlaksananya kegiatan resertifikasi ISO 9001:2015 pada UPT Instalasi Farmasi.
12. Perawatan Manajemen Mutu Akreditasi Puskesmas dilakukan terhadap 27 Puskesmas yang sudah terakreditasi.
13. Akreditasi 8 Puskesmas di Kota Tangerang.
14. Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di 33 UPT Puskesmas dengan anggaran Rp60.576.076.752,- yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas.
15. Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di UPT Labkesda dengan anggaran Rp1.280.375.640,- yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan di Laboratorium Kesehatan Daerah Terpadu dengan Laboratorium Halal.
16. Survey Prilaku Hidup Bersih dan Sehat yang dilakukan terhadap Rumah Tangga yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan sasaran 10.400 Rumah Tangga.
17. Penguatan Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan di Kelurahan, Kecamatan, Puskesmas, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Posyandu se-Kota Tangerang.
18. Pembinaan Forum Kota Tangerang yang dilaksanakan di 62 Kampung / RW di Kota Tangerang.



Permasalahan yang dihadapi

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi terkait pencapaian indikator sasaran Indeks Kesehatan, seperti:

1. Penurunan angka kemiskinan yang belum optimal;
2. Sanitasi Lingkungan yang belum sepenuhnya baik;
3. Masih adanya Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) yang belum membudaya.

Solusi Terhadap Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas adalah dengan kegiatan:

1. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang harus diselesaikan bersama secara komprehensif dan terus menerus oleh semua lintas sektor terkait tidak hanya oleh Dinas Kesehatan;
2. *Open Defecation Free* (ODF) atau Buang Air Besar Sembarangan merupakan perilaku masyarakat yang harus dirubah dengan penyuluhan budaya PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat) dan memperbaiki sanitasi lingkungan melalui program Pengembangan Lingkungan Sehat. Dinas Kesehatan melakukan koordinasi dengan sektor terkait di seluruh kecamatan agar terwujud Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBABS) dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, advokasi kepada dinas terkait dan verifikasi data jamban sehat di masyarakat;
3. Dinas Kesehatan melakukan koordinasi dengan Dinas Perumahan dan Permukiman terkait pemenuhan jamban sehat;
4. Membudayakan tatanan PHBS pada masyarakat dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi sehingga terbentuk 152 RW PHBS;
5. Melaksanakan pelayanan kesehatan secara komprehensif baik Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif, serta Edukatif melalui Cageur Jasa (Colaborasi Kunjungan Rumah Integrasi Keluarga Sehat);
6. Melakukan kegiatan-kegiatan inovasi guna mendukung pelaksanaan Program Program Kesehatan, seperti; SISEKSI (Sistem Monitoring di Seluruh Siklus Kehidupan), Babar Bahagia (Bayi dan Ibu Cageur, Bawa Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Indonesia Sehat), Cageur Jasa (Colaborasi Kunjungan Rumah Integrasi Keluarga Sehat), Sisrute (Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi);



7. Fasilitas Ambulance Gratis Pemerintah Kota Tangerang yang siaga 24 jam dengan nomor telepon (021) 55771135 untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Tangerang agar mudah mengakses fasilitas kesehatan yang dibutuhkan;
8. Melakukan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan melaksanakan program-program kesehatan yang terpadu di semua bidang dan sektor terkait;
9. Peningkatan aksesibilitas masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas.

Gambar 3.12. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Tangerang



III.4.9 SASARAN 9

Terwujudnya pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial

Pencapaian sasaran 9 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

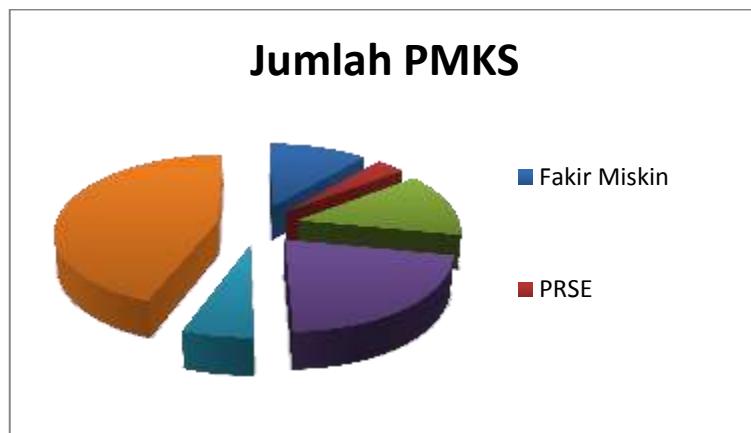
Tabel 3.32. Capaian Kinerja Sasaran 9

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				2018		
		2014	2015	2016	2017	Target	Realisasi	%
Persentase penurunan PMKS	%	3,36	3,71	3,90	3,11	2,97	2,93	101,35

Untuk mencapai target indikator sasaran tersebut dilakukan melalui 4 program yaitu Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Program Pebinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya), Program Pembinaan Anak Terlantar dan Program Pembinaan Panti



Asuhan/Panti Jompo. Pendekatan layanan yang dilakukan dalam program dan kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap penurunan angka PMKS dikarenakan program dan kegiatan dapat dikatakan relevan serta dapat meningkatkan kesejahteraan fakir miskin, komponen pemberdayaan fakir miskin melalui pengembangan usaha ekonomi produktif, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan usaha ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja dan meningkatkan penghasilan. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini dalam bentuk bimbingan sosial dan bantuan pemberian fasilitas modal usaha yang disalurkan kepada fakir miskin, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), anak terlantar dan penghuni panti. Jenis PMKS yang berkontribusi dalam menurunkan angka PMKS tahun 2018 dapat dilihat pada diagram dibawah ini



Target indikator persentase penurunan PMKS pada tahun 2018 sebesar 2,97% dan dapat direalisasikan sebesar 2,93% sehingga capaian kinerja sebesar 101,37%. Data jumlah PMKS per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.33. Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Tangerang

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PMKS (TAHUN)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Batuceper	3.896	3.735	3.541	3.517	3.517
2	Benda	5.628	5.536	5.353	5.205	5.191
3	Cibodas	3.679	3.465	3.319	3.312	3.298
4	Ciledug	4.083	3.867	3.676	3.595	3.582
5	Cipondoh	4.276	4.171	4.023	3.989	4.001
6	Jatiuwung	4.248	4.043	3.798	3.671	3.669
7	Karang Tengah	3.622	3.550	3.301	3.279	3.271
8	Karawaci	7.743	7.282	7.185	6.875	6.846



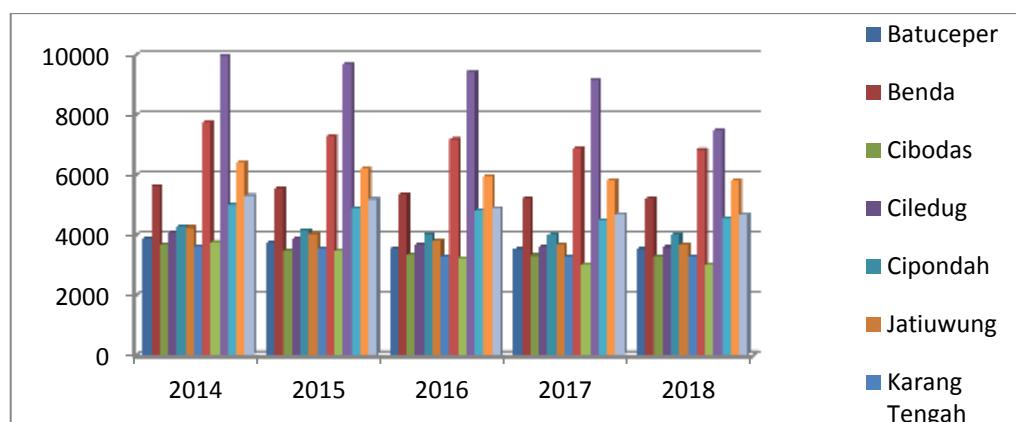
NO.	KECAMATAN	JUMLAH PMKS (TAHUN)				
		2014	2015	2016	2017	2018
9	Larangan	3.772	3.477	3.230	3.026	2.999
10	Neglasari	9.979	9.674	9.435	9.157	7.469
11	Periuk	4.986	4.895	4.793	4.499	4.549
12	Pinang	6.426	6.191	5.971	5.830	5.806
13	Tangerang	5.313	5.183	4.900	4.694	4.671
TOTAL		67.651	65.069	62.525	60.649	58.869

Sumber : Dinas Sosial, 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah PMKS di Kota Tangerang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 jumlah PMKS mencapai 60.649 jiwa sedangkan di tahun 2018 ini menjadi 58.869 jiwa sehingga dapat diketahui bahwa di tahun 2018 ini terjadi penurunan jumlah PMKS sebanyak 1.780 jiwa. Dari data tersebut dapat dihitung laju penurunan PMKS yaitu selisih jumlah PMKS yaitu dari selisih jumlah PMKS dibagi jumlah PMKS tahun 2017 sebanyak 2,93%.

Penurunan angka PMKS yang signifikan terjadi pada salah satu jenis PMKS yaitu angka fakir miskin, hal ini dapat terjadi karena adanya kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diselenggaran oleh Dinas Sosial Kota Tangerang maupun kegiatan yang didanai oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi Banten berkaitan dengan peningkatan kemampuan dan pemberian bantuan modal bagi kelompok usaha bersama dan usaha ekonomi produktif. Grafik perkembangan jumlah PMKS per kecamatan dapat dilihat pada grafik di bawah ini

Tabel 3.34. Perkembangan Jumlah PMKS per Kecamatan Tahun 2014-2018



Upaya yang telah dilakukan



Upaya yang dilakukan untuk menurunkan PMKS antara lain melalui program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya dan program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) melalui kegiatan :

1. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi penumbuhan KUBE Keluarga Miskin sebanyak 200 orang atau 20 KUBE yang tersebar di beberapa kecamatan;
2. Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi sebanyak 60 orang yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Tangerang;
3. Pemberdayaan eks Penyandang Penyakit Sosial sebanyak 108 orang;
4. Pelatihan keterampilan dan praktik belajar kerja bagi anak terlantar 180 orang.
5. Pelatihan Kewirausahaan bagi Penghuni Panti peserta 384 orang;
6. Selain upaya tersebut di atas Dinas Sosial juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBN dan APBD I dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Tangerang, melalui kegiatan antara lain:
 - a. Program Keluarga Harapan (PKH) 19.440 KSM melalui sumber dana APBN;
 - b. Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) 32.136 KSM melalui sumber dana APBN;
 - c. Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 5 RTSM melalui sumber dana APBN.

Permasalahan Yang dihadapi

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi untuk menurunkan PMKS seperti: Belum optimalnya sistem informasi yang dapat digunakan untuk memperbaharui data PMKS, sehingga proses pemutakhiran data masih dilakukan secara manual.

Solusi terhadap permasalahan

Upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah dengan kegiatan:

- Melakukan kerjasama dengan dinas terkait yakni Dinas Kominfo mengenai pembuatan aplikasi pemutakhiran data PMKS yang dapat digunakan oleh mitra



Dinas Sosial sehingga data yang disajikan dapat lebih akurat dan juga mendukung kegiatan Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT).

III.4.10 SASARAN 10

Terwujudnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja

Pencapaian sasaran 10 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.35. Capaian Kinerja Sasaran 10

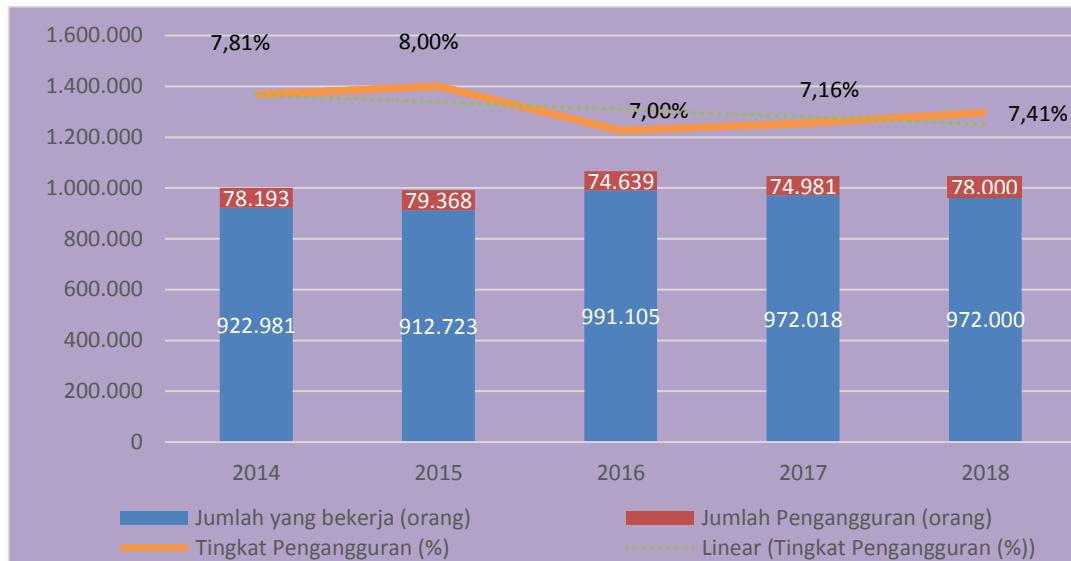
Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				2018		
		2014	2015	2016	2017	Target	Realisasi	%
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,81	8,01	7,00	7,16	7,52	7,41	101,46

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah berkerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Indikator ini berfungsi sebagai acuan pemerintah daerah untuk pembukaan lapangan kerja baru. Disamping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan/kegagalan program dan kegiatan ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Secara formulasi, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dihitung melalui rasio antara jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan terhadap jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2018, jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan di Kota Tangerang sebanyak 78.000 orang, sedangkan jumlah angkatan kerjanya sebanyak 1.050.000 orang. Sehingga, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tangerang tahun 2018 sebesar 7,41%. Hal ini mengartikan bahwa diantara 100 orang yang termasuk ke dalam angkatan kerja terdapat sekitar 7 orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Jika dibandingkan dengan 4 tahun terakhir Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Tangerang cenderung stabil dikisaran 7 s.d 8 persen.



Gambar 3.13. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tangerang Tahun 2014-2018



Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2018

Upaya yang telah dilakukan

1. Membentuk Bursa Kerja Khusus (BKK) di setiap SMK di Kota Tangerang. Dengan dibentuknya BKK, informasi kesempatan kerja langsung dapat diterima oleh Siswa SMK atau calon Lulusan SMK untuk mempersiapkan memasuki dunia kerja/dunia usaha.
2. Memperbanyak upaya pencarian lowongan kerja melalui Bursa Kerja (Job fair) di Tingkat Kota sebanyak 1 (satu) kali dan 2 (dua) kali di 13 Kecamatan.
3. Pembuatan/Pengembangan Aplikasi Siap Kerja untuk memudahkan masyarakat memperoleh ketersediaan lowongan kerja.
4. Bursa kerja Online yang dikelola oleh Dinas Ketenagakerjaan.

Permasalahan

1. Tidak semua pencari kerja terdaftar menginformasikan /melaporkan keberadaan mereka setelah mendapatkan pekerjaan atau menjadi wirausaha baru;
2. Perusahaan pemberi kerja sebagai peserta Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) tidak seluruhnya melaporkan hasil penempatan tenaga kerja;
3. Tidak Semua perusahaan (pemberi kerja) melaporkan lowongan kerja ke Dinas Ketenagakerjaan.



Upaya yang akan dilakukan

1. Pencari kerja terdaftar menginformasikan/melaporkan keberadaan mereka setelah mendapatkan pekerjaan atau menjadi wirausaha baru.
2. Perusahaan peserta pameran kesempatan kerja (job fair), melaporkan hasil rekrutmennya secara berkala kepada Dinas Ketenagakerjaan.
3. Lowongan kerja yang dilaporkan harus update dan intensitas perusahaan dalam menyampaikan lowongan kerja harus diperbanyak.
4. Dinas Ketenagakerjaan harus memperbanyak fungsional pengantar kerja untuk pelaksanaan *job canvassing* (pencarian lowongan kerja) ke perusahaan / pemberi kerja.
5. Angkatan kerja yang tidak bekerja (penganggur), yang merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, akan dilatih untuk menjadi wirausaha baru untuk mendapatkan penghasilan.

III.4.11 SASARAN 11

Persentase penyelesaian konflik Suku, Agama, Ras dan Adat (SARA)

Pencapaian sasaran 11 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.36. Capaian Kinerja Sasaran 11

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				2018		
		2014	2015	2016	2017	Target	Realisasi	%
Persentase penyelesaian konflik Suku, Agama, Ras dan Adat (SARA)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tidak SARA. Tindakan ini mengebiri dan melecehkan kemerdekaan dan segala hak-hak dasar yang melekat pada manusia. SARA dapat digolongkan dalam Tiga Kategori :



Kategori pertama yaitu **Individual**: merupakan tindakan Sara yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Termasuk di dalam katagori ini adalah tindakan maupun pernyataan yang bersifat menyerang, mengintimidasi, melecehkan dan menghina identitas diri maupun golongan.

Kategori kedua yaitu **Institusional** : merupakan tindakan Sara yang dilakukan oleh suatu institusi, termasuk negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja telah membuat peraturan diskriminatif dalam struktur organisasi maupun kebijakannya.

Kategori ke tiga yaitu **Kultural** : merupakan penyebaran mitos, tradisi dan ide-ide diskriminatif melalui struktur budaya masyarakat.

Dalam pengertian lain SARA dapat di sebut diskriminasi yang merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat manusia, ini disebabkan karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan yang lain. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antar golongan, kelamin, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karakteristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi Diskriminasi langsung, terjadi saat hukum, peraturan atau kebijakan jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, ras, dan sebagainya, dan menghambat adanya peluang yang sama. Diskriminasi tidak langsung, terjadi saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan.

Meningkatnya konflik yang bermuasa SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) yaitu suatu kekerasan yang dilatarbelakangi sentimental antar suku, agama, ras, atau golongan tertentu. Konflik Sara biasanya karena adanya egoisitas seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan dengan jalan kekerasan. Konflik tersebut bisa disebabkan hanya karena hal sepele, seperti tersinggung, diledek atau hal-hal yang sekiranya tidak perlu dibesar-besarkan. Bukan hanya fisik yang terkena dampaknya, psikis pun terganggu. Pasca konflik tersebut seseorang mungkin saja trauma akibat perlakuan yang tidak pernah dialami sebelumnya dan tidak mau mengalaminya lagi. Sedangkan primordialisme yaitu suatu paham yang menganggap bahwa kelompoknya lebih tinggi dan lebih hebat dari kelompok lain. Primordialisme tertuju kepada



pemikiran suatu kelompok terhadap kelompok lain. Paham tersebut mengakibatkan anggota-anggotanya lebih menghormati kelompoknya sendiri dibandingkan dengan kelompok lain.

Tabel 3.37. Kejadian dan Penanganan Konflik di Kota Tangerang Tahun 2018

No	Bulan	Jumlah Kejadian	Penanganan Konflik	Prosentase
1	Januari	2	2	100
2	Februari	9	9	100
3	Maret	8	8	100
4	April	6	6	100
5	Mei	8	8	100
6	Juni	1	1	100
7	Juli	10	10	100
8	Agustus	3	3	100
9	September	9	9	100
10	Okttober	7	7	100
11	November	2	2	100
12	Desember	3	3	100
JUMLAH		67	67	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas bahwa telah terjadi 67 Kasus Konflik selama Januari-Desember 2018 dan tertangani sebanyak 67 kasus konflik atau 100%, adapun jenis konflik tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian	Jumlah Konflik	Jumlah Penanganan	Prosentase
1	Konflik Unjuk Rasa	41	41	100
2	Konflik Berdasarkan Suku	1	1	100
3	Konflik Berdasarkan Agama	13	13	100
4	Konflik Berdasarkan Ras	-	-	100
5	Konflik Berdasarkan Golongan / Kelompok	12	12	100
	Jumlah	67	67	100

Sumber: Kantor Kesbangpol, 2018

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa telah terjadi 41 unjuk rasa, 1 konflik antar suku, 13 konflik antar agama dan 12 konflik antar golongan/kelompok. Adapun peta rawan konflik di Kota Tangerang dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.14. Peta Rawan Konflik di Kota Tangerang





Upaya yang telah dilakukan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi Penyelesaian Konflik, suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dilakukan melalui Program dan Kegiatan :

1. Kegiatan Koordinasi Peningkatakan Kerjsama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dilakukan sebanyak 7 kali kegiatan dalam bentuk Rapat Koordinasi bersama Aparat Keamanan dari unsur ke polisian, unsur TNI, unsur Kejaksaan, unsur imigrasi dan Trantib Kecamatan Se Kota Tangerang
2. Kegiatan Fasilitasi Penanganan Konflik (IPOLESBUDHANKAM-Agama), bertujuan untuk memonitoring wilayah selama 12 bulan dan Pembentukan Tim 14 Orang di bagi per Kecamatan se Kota Tangerang.
3. Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama dengan peserta sebanyak 300 Orang yang meliputi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Forum Pemuda Lintas Agama (FPLA Kota Tangerang) dengan narasumber dari FKUB Kota Tangerang, MUI dan dari Kementerian.
4. Kegiatan Pengawasan Organisasi yang berafiliasi dengan asing dan membawa anasir-anasir ideologi di luar pancasila dalam bentuk monitoring terhadap Organisasi Asing / orang asing yang berada di daerah Kota Tangerang. Dalam hal ini bekerja sama oleh Imigrasi Kota Tangerang, Kepolisian, TNI dan BIN.
5. Kegiatan Pelatihan Bela Negara dengan peserta Mahasiswa se Kota Tangerang sebanyak 80 Orang dan dibekali oleh Materi Peningkatan Wawasan Kebangsaan,



Pemantapan Ideologi Pancasila, NKRI dan Undang-Undang Dasar dilaksanakan selama 3 hari.

6. Kemitraan Wawasan Kebangsaan Bagi Ormas dan LSM dengan jumlah peserta sebanyak 300 Orang terdiri dari Ormas se Kota Tangerang, LSM dan Tokoh Pemuda se-Kota Tangerang, dengan narasumber dari Kementerian, Kepolisian, TNI atau Jajaran samping lainnya.

Permasalahan Yang dihadapi

1. Partisipasi masyarakat dalam menentukan pilihan di proses Pilkada baik Gubernur maupun Walikota tergolong sedang. Dalam Pilkada Gubernur Banten tahun 2017 tingkat partisipasi masyarakat sebesar 67 %, sedangkan Dalam Pilkada Walikota partisipasi masyarakat sebesar 71%, masih jauh dari harapan pemerintah pusat sebesar 85% partisipasi masyarakat;
2. Terorisme dan meningkatnya Radikalisme, yang diindikasikan dari kecenderungan terjadinya peningkatan faham-faham dan kelompok radikal yang bersifat transnasional yang dilaksanakan melalui teknologi informasi karena mulai lunturnya pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai solidaritas dikalangan masyarakat;
3. Peredaran gelap Narkoba dan penyalahgunaan Narkoba.

Solusi terhadap permasalahan

1. Peningkatan kegiatan sosialisasi dikalangan masyarakat terutama pemilih pemula, perempuan dan kaum marjinal secara masif
2. Peningkatan pemahaman masyarakat dalam bertoleransi antar pemeluk agama
3. peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, serta sosialisasi tentang deradikalasi dan bahaya terorisme serta pencegahan faham-faham radikal.
4. Pembinaan secara langsung kepada masyarakat melalui Pembentukan kampung bersih Narkoba (Bersinar) sampai dengan Tingkat Kota.
5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara aparat keamanan, Lembaga Pemerintah, Ormas, LSM dan Partai Politik serta Pemberdayaan Forum-forum di Kota Tangerang.

III.4.12 SASARAN 12



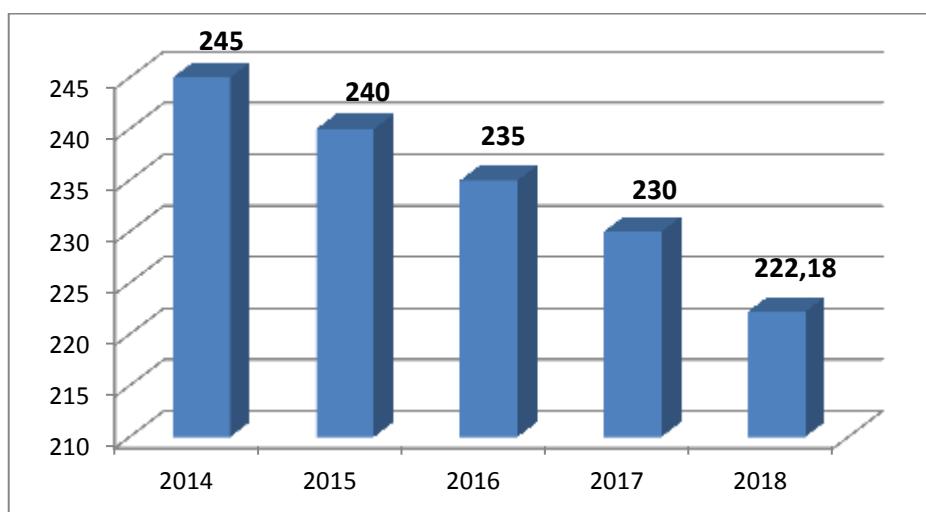
Pencapaian sasaran 12 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.38. Capaian Kinerja Sasaran 12

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				2018		
		2014	2015	2016	2017	Target	Realisasi	%
Luas genangan dan Banjir	Ha	245	240	235	230	225	222,18	101,25

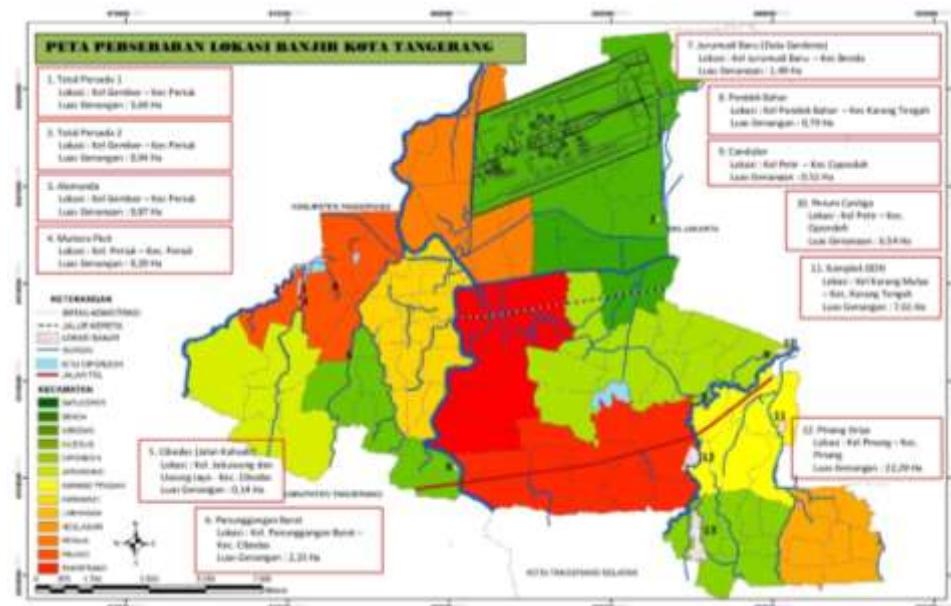
Kinerja Sasaran terwujudnya pengendalian banjir dan genangan yang memadai dicapai melalui indikator luas genangan dan banjir dengan target penurunan dari tahun 2014 sampai dengan 2018 sebesar 5 Ha setiap tahun. Pada tahun 2018 luasan banjir dan genangan sebesar 222,18 Ha. Hal ini menunjukan adanya pengurangan luas banjir dan genangan seluas 7,82 Ha dari tahun sebelumnya (2017) seluas 230 Ha dan melebihi target dari yang ditetapkan sebesar 5 Ha. Adapun sebagai gambaran kondisi pencapaian penurunan banjir dan genangan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut :

Gambar 3.15. Grafik Luasan Banjir Dan Genangan 2014 – 2018 (Ha)



Sumber: Dinas PUPR, 2018

Gambar 3.16. Peta Persebaran Titik Lokasi Banjir Dan Genangan Di Kota Tangerang Tahun 2018



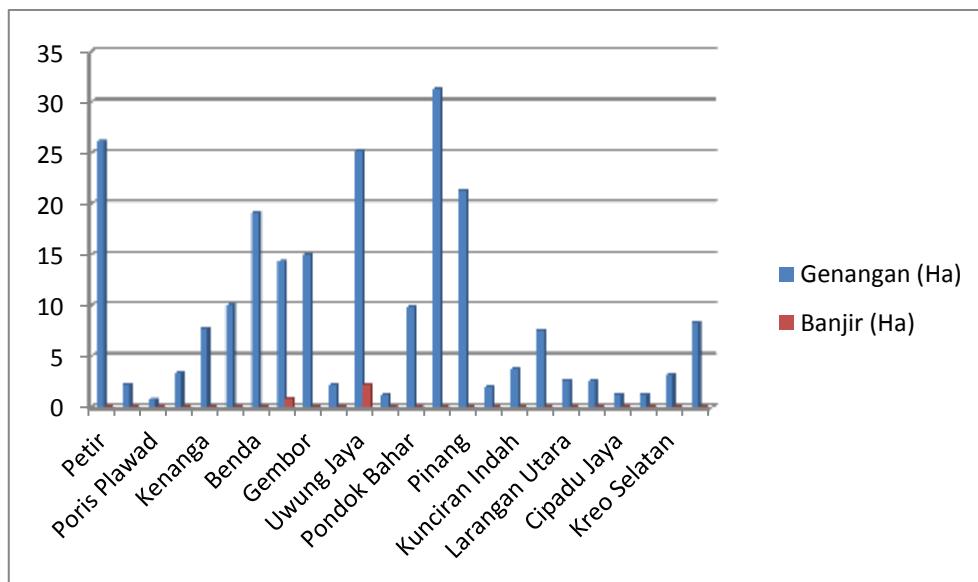
Tabel 3.39. Titik dan Luas Banjir dan Genangan Tahun 2018

No	kecamatan	Lokasi / Kelurahan	Jumlah titik banjir dan genangan		Luas banjir dan genangan		Tinggi Genangan
			genangan (titik)	banjir (Titik)	genangan (Ha)	banjir (Ha)	
1	cipondoh	Petir	8	-	26,11	-	30 cm
		Cipondoh Makmur	4	-	2,26	-	30 cm
		Poris Plawad	3	-	0,73	-	30 cm
		Gondrong	5	-	3,31	-	30 cm
		Kenanga	7	-	7,73	-	30 cm
2	Benda	Jurumudi Baru	12	-	10	-	50 cm
		Benda	8	-	19,1	-	
3	Priuk	Priuk	4	1	11,44	0,87	50 cm
		Gembor	2	-	15,06	-	50 cm
4	Cibodas	Jatiuwung	1	-	2,17	-	-
		Uwung Jaya	6	1	25,16	2,14	100 cm
		Panunggangan barat	1	-	1,26	-	50 cm
5	Karang Tengah	Pondok Bahar	5	-	9,84	-	50 cm
		Karang Mulya	4	-	31,25	-	50 cm
6	Pinang	Pinang	2	-	21,34	-	30 cm
		Kunciran Jaya	3	-	1,93	-	



No	kecamatan	Lokasi / Kelurahan	Jumlah titik banjir dan genangan		Luas banjir dan genangan		Tinggi Genangan	
			genangan (titik)	banjir (Titik)	genangan (Ha)	banjir (Ha)		
		Kunciran Indah	6	-	3,7	-	30 cm	
		Kunciran	4	-	7,57	-	30 cm	
7	Larangan	Larangan Utara	7	-	2,62	-	50 cm	
		Larangan Indah	4	-	2,54	-	50 cm	
		Cipadu Jaya	2	-	1,26	-	50 cm	
		Larangan Selatan	1	-	1,27	-	50 cm	
		Kreo Selatan	2	-	3,15	-	50 cm	
		Gaga	5	-	8,37	-	50 cm	
Jumlah			106	2	219,17	3,01		
Jumlah			108		222,18			

Gambar 3.17. Grafik jumlah lokasi banjir dan genangan



Adapun penurunan luasan banjir dan genangan pada tahun 2018 seluas 7,87 Ha terdapat di Perumahan Total Persada seluas 5,64 Ha dan 2,23 Ha di Panunggangan Barat. Sedangkan dari 222,18 ha wilayah yang masih mengalami banjir dan genangan, terdapat di 7 kecamatan yaitu kecamatan cipondoh seluas 40,14ha dengan titik banjir dan genangan sebanyak 27 titik, Kecamatan Benda seluas 29,1ha sebanyak 20 titik, Kecamatan Priuk seluas 26,5 ha sebanyak 6 titik, Kecamatan Cibodas seluas 28,59



hasebanyak 8 titik, Kecamatan Karang Tengah seluas 41,09 ha sebanyak 9titik, dan Kecamatan Pinang 34,54ha sebanyak 15 titik serta Kecamatan Larangan 19,2ha sebanyak 21 titikdengan rata-rata penurunan banjir dan genangan dalam jangka waktu 2 - 3 jam.

Upaya yang telah dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi luasan genangan dan banjir antara lain melalui program atau kegiatan :

1. Program pembangunan drainase melalui kegiatan:

- a. Pembangunan drainase sepanjang 89.191 meter dengan anggaran Rp.165.005.059.706,- yang tersebar di Kecamatan Tangerang sepanjang (8.913 meter), Kecamatan Jatiuwung sepanjang (2.970 meter), Kecamatan Karawaci sepanjang (7.572 meter), Kecamatan Neglasari sepanjang (4.576 meter), Kecamatan Pinang sepanjang (8.495 meter), Kecamatan Benda sepanjang (5.946 meter), Kecamatan Batu Ceper sepanjang (5.145 meter), Kecamatan Karang tengah sepanjang (5.941 meter), Kecamatan Periuk sepanjang sepanjang (9.423 meter), Kecamatan Cibodas sepanjang (7.974 meter), Kecamatan Cipondoh sepanjang (7.955 meter), Kecamatan Larangan sepanjang (6.544 meter), dan Kecamatan Ciledug sepanjang (7.737 meter).
- b. Rehabilitasi/peningkatan, pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong sepanjang 206.482 meter dengan anggaranRp. 15.599.943.800,- yang tersebar di 13 Kecamatan.

2. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya melalui kegiatan :

- a. Pembangunan pintu air sebanyak 6 unit dengan anggaran Rp.1.069.013.000,- yang tersebar di Kecamatan Priuk (3 unit),Kecamatan Ciledug (2 unit) dan Kecamatan Karang tengah (1 unit).
- b. Pelaksanaan normalisasi saluran sungai di wilayah titik banjir dengan anggaran Rp. 4.230.497.000,- yang tersebar di 13 Kecamatan.
- c. Rehabilitasi/pemeliaraan jaringan irigasi saluran sungai sepanjang 1.000 meter dengan anggaran Rp. 5.939.387.000,- yang tersebar di 13 Kecamatan



- d. Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air sebanyak 168 unit dengan anggaran Rp. 1.610.463.000,- yang tersebar di 13 Kecamatan.
- e. Pemeliharaan pompa dan diesel air sebanyak 48 unit rumah pompa dengan anggaran Rp. 1.811.106.000,- yang tersebar di 13 Kecamatan.
- f. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya melalui kegiatan :
- g. Pembangunan embung sebanyak seluas 0.64 Hektar dengan anggaran Rp. 5.139.214.000,- yang tersebar di Kecamatan Karawaci (1 buah), Kecamatan Batuceper (1 buah), Kecamatan Karang Tengah (1 buah).

3. Program pembangunan turap/talud/bronjong melalui kegiatan :

- a. Pembangunan turap dengan panjang 3.500 meter dengan anggaran Rp. 27.157.598.000,- yang tersebar di Kecamatan Jatiuwung sepanjang (66 meter), Kecamatan Pinang sepanjang (168 meter), Kecamatan Benda sepanjang (344 meter), Kecamatan Karang Tengah sepanjang (171 meter), Kecamatan Periuk sepanjang (979 meter), Kecamatan Cibodas sepanjang (35 meter), Kecamatan Cipondoh sepanjang (626 meter), Kecamatan Larangan sepanjang (108 meter), Kecamatan Ciledug sepanjang (262 meter), Kecamatan Neglasari sepanjang (97 meter), dan Kecamatan Karawaci sepanjang (66 meter).

4. Program pengendalian banjir melalui kegiatan :

- a. Pembangunan pusat-pusat pengendali banjir sebanyak 28 unit dengan anggaran Rp. 48.237.095.200,- yang tersebar di Kecamatan Periuk (9 unit), Kecamatan Larangan (2 unit), Kecamatan Karang Tengah (5 unit), Kecamatan Ciledug (4 unit), Kecamatan Tangerang (2 unit), Kecamatan Jatiuwung (1 unit).
- b. Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai sebanyak 26 lokasi dengan anggaran Rp. 5.240.637.000,- yang tersebar di Kecamatan Periuk (8 lokasi), Kecamatan Ciledug (1 lokasi), dan Kecamatan Karang tengah (1 lokasi).
- c. Pengeringan Kali sepanjang 36.000 meter dengan anggaran Rp 12.248.689.000,- yang tersebar di 13 Kecamatan.

Permasalahan Yang dihadapi



Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi untuk mengurangi luasan genangan dan banjir seperti:

1. Terdapat bangunan liar yang menempati sempadan sungai, sehingga menyulitkan ketika akan dilakukan pelebaran maupun normalisasi saluran sungai dan drainase.
2. Banyak masyarakat membuang sampah di sungai sehingga menyebabkan sedimentasi. Kondisi seperti ini banyak ditemui di sepanjang bantaran sungai kali cirarab di kecamatan periuk dan kali sabi di kecamatan cibodas.
3. Belum terintegrasi sistem saluran drainase saluran primer-sekunder dan tersier
4. Tidak terintegrasi saluran ini menyebabkan kesulitan ketika akan membangun saluran drainase yang baru
5. Curah hujan yang tinggi diatas curah hujan rencana (design)
6. Kurangnya sarana dan sistem drainase yang memadai sebagai pengganti lahan yang mengalami perubahan fungsi tersebut, terlebih apabila perubahan tersebut tidak disertai dengan analisa tentang dampak lingkungan
7. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal kebersihan dan pemeliharaan terhadap sarana drainase lingkungan yang menyebabkan sistem drainase lingkungan tidak dapat berfungsi
8. Berubahnya/beralihnya fungsi tata guna lahan/ahli fungsi lahan yang cepat baik di daerah hulu dan kawasan perkotaan, yang semula merupakan daerah resapan air menjadi bangunan,perumahan, industry/pabrik, pertokoan, pergudangan dan sebagainya. Kondisi ini mengakibatkan semakin berkurangnya areal yang berfungsi sebagai tempat penampungan air dan resapan air sebelum menuju saluran pembuangan.

Solusi Terhadap Permasalahan

1. Melakukan penertiban bangunan liar untuk menunjang ketersediaan lahan untuk pelebaran maupun normalisasi saluran sungai / drainase;
2. Melaksanakan sosialisasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah dibantaran sungai;
3. Menyusun Masterplan drainase dan melakukan pembangunan drainase perumahan, lingkungan dan makro yang terintegrasi;
4. Membangun sumur – sumur resapan untuk resapan air;



5. Mempertahakan daerah – daerah tangkapan air dan membangun bangunan penampung air berupa embung.

III.4.13 SASARAN 13

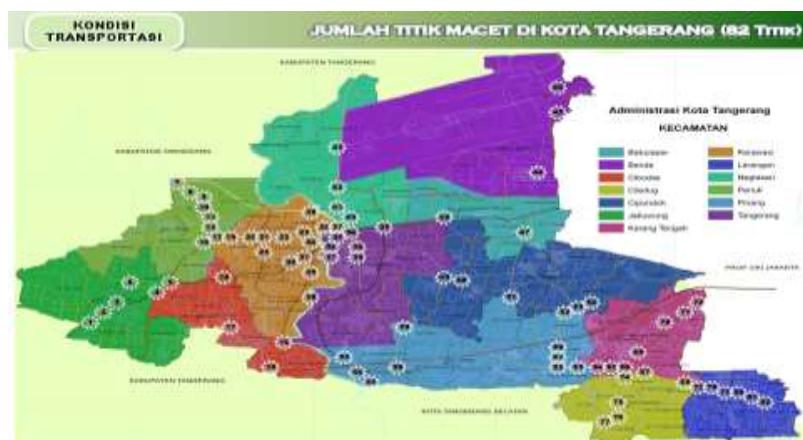
Terwujudnya pelayanan tansportasi perkotaan terpadu

Pencapaian sasaran 13 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				2018		
		2014	2015	2016	2017	Target	Realisasi	%
Persentase kemacetan yang tertangani	%	75,00	79,00	89,00	95,12	100,00	100,00	100,00

Kinerja Sasaran terwujudnya pelayanan transportasi perkotaan terpadu dicapai melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu prosentase jumlah titik kemacetan yang tertangani dengan target tahun 2018 sebesar 82 titik dan direalisasikan sebesar 82 titik atau dengan pencapaian 100 % dari target. Serta indikator kinerja jumlah koridor angkutan umum massal yang beroperasi dengan target tahun 2018 sebesar 2 koridor dan direalisasikan sebesar 2 koridor atau dengan pencapaian 100 %. Hal ini menunjukan adanya penanganan sebanyak 4 titik kemacetan tambahan dibanding tahun 2017 sehingga menjadi 82 titik kemacetan tertangani di tahun 2018, dan beroperasinya 2 koridor angkutan umum massal pada tahun 2018.

Gambar 3.18. Titik kemacetan tertangani di Kota Tangerang tahun 2018



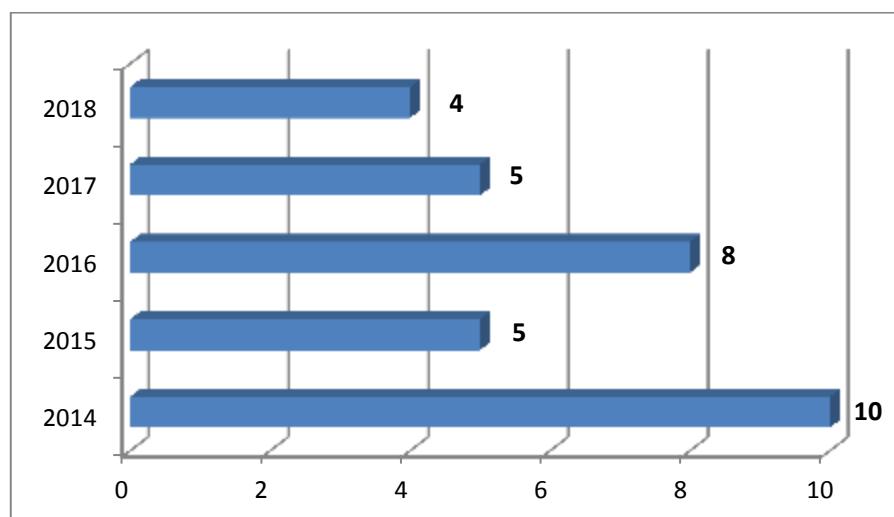
Sampai dengan tahun 2017 Dinas Perhubungan telah mampu menangani titik kemacetan sebanyak 78 titik kemacetan dari jumlah target sebanyak 82 titik kemacetan



di Kota Tangerang yang harus ditangani oleh Dinas Perhubungan periode waktu 2013-2018. Pada tahun 2018 Dinas Perhubungan mampu menangani 4 titik kemacetan yang terletak di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Benda sebanyak 1 (satu) titik, Kecamatan Pinang sebanyak 1 (satu) titik dan Kecamatan Cileduk sebanyak 1 (satu) titik. Sehingga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun Dinas Perhubungan mampu menyelesaikan 82 titik kemacetan sesuai dari target. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 3.40. Tabulasi Data Titik Kemacetan yang Ditangani sampai dengan Tahun 2018

NO.	TAHUN	JUMLAH TITIK MACET YANG TERTANGANI
1	2014	10
2	2015	5
3	2016	8
4	2017	5
5	2018	4



Tabel 3.41. Baseline data sampai dengan tahun 2013 jumlah titik kemacetan yang tertangani sudah mencapai 50 titik kemacetan

No.	2014	2015	2016	2017	2018
1	Simpang Telesonic	Simpang Nagrak – Kotabumi	Kelurahan Priuk	Simpang Manis	Simpang Jawa Pos
2	Simpang Gajah Tunggal	Simpang Cangkring	Simpang Kapling Pemda	Simpang M. Toha – Aria Wangsakara	Simpang Arah Alam Sutera
3	Simpang Pajajaran	Simpang M 1 – Bandara Soetta	Simpang Pasar Malabar	Simpang Duta Garden	Simpang Parung Serab



No.	2014	2015	2016	2017	2018
4	Simpang Prabu Siliwangi – Pasar Kemis	Simpang Cipadu	RS Annisa	Simpang Pondok Bahar	Simpang Jalan Gunung Jati
5	Simpang Cadas	Simpang Inpres – Puri Beta	Simpang Aria Santika – Jl. Subandi	Simpang Arah Modernland	
6	Simpang Kenaiban		Strada		
7	Simpang Cimone		Persilangan KA		
8	Situ Cipondoh		Akses Buana Gardenia		
9	Simpang Gondrong				
10	Simpang Ciledug				
Jumlah	10 Titik	5 Titik	8 Titik	5 Titik	4 Titik

Upaya yang telah dilakukan

Upaya yang dilakukan untuk menangani titik kemacetan dilakukan melalui kegiatan :

1. Pengoptimalan petugas pengendalian dalam pelaksanaan tugas pengaturan lalulintas sehari-hari.
2. Memenuhi kebutuhan penunjang pengendalian lalu lintas baik fasilitas penunjang pengendalian maupun kebutuhan penunjang personil.
3. Menggerakkan Tim Reaksi Cepat Pengurai Kemacetan.
4. Mengoptimalkan beroperasinya koridor angkutan umum massal, melalui kegiatan :
 - a. Melaksanakan sosialisasi BRT Kota Tangerang di wilayah-wilayah yang dilintasi oleh trayek BRT Kota Tangerang.
 - b. Membangun bus stop untuk BRT Kota Tangerang Koridor II.
 - c. Merubah sistem operasional pelayanan BRT Kota Tangerang dari sistem non investasi ke sistem investasi.

Permasalahan yang dihadapi



Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi untuk menangani titik kemacetan seperti:

1. Adanya Kerusakan-kerusakan pada Traffic Light akibat cuaca ataupun dikarenakan masa usia kemampuan alat atau komponennya.
2. Gangguan samping parkir kendaraan tidak sesuai tempatnya.
3. Sikap para pengguna kendaraan yang tidak menaati peraturan lalulintas.
4. Permasalahan dalam pelaksanaan beroperasinya koridor angkutan umum massal seperti:
 - a. Belum stabilnya Jam Layanan Pemberangkatan Bus BRT Kota Tangerang untuk meningkatkan Peminat Angkutan Umum Massal.
 - b. Kurangnya informasi masyarakat diwilayah yang dilintasi oleh BRT Kota Tangerang Koridor I dan II bahwasanya diwilayah tersebut sudah terdapat layanan angkutan umum massal dari Pemerintah Kota Tangerang

Solusi terhadap permasalahan

Jalan keluar yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah dengan kegiatan:

1. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada penyedia (investor) jasa operator BRT Kodridor II agar meningkatkan jadwal layanan BRT lebih baik lagi.
2. Meningkatkan koordinasi dengan OPD DPUPR terkait peningkatan pelayanan ruas jalan yang bertujuan untuk menjaga bahkan meningkatkan kecepatan rata-rata pada ruas jalan kota.
3. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk memberikan pengetahuan mengenai ketertiban dan keselamatan lalulintas dan selanjutnya juga mendorong pihak kepolisian agar dapat menertibkan bentuk bentuk pelanggaran ketertiban lalulintas.
4. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan struktur kewilayahan seperti kecamatan dan kelurahan yang wilayahnya dilintasi trayek BRT Kota Tangerang agar struktur kewilayahan dapat mendorong masyarakat di wilayah masing-masing menggunakan BRT Kota Tangerang dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.



5. Mendorong pelaku usaha bidang angkutan untuk dapat berpartisipasi terlibat langsung dalam pengelolaan operasional layanan BRT Kota Tangerang dengan sistem investasi.
6. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan gangguan samping dengan pihak Satpol PP dan Kepolisian untuk melaksanakan operasi penertiban parkir liar bahu jalan yang bukan peruntukannya sebagai tempat parkir.
7. Melaksanakan kegiatan kampanye ketertiban dan keselamatan lalulintas kepada masyarakat Kota Tangerang dan pengguna jalan lainnya.

III.4.14 SASARAN 14

Terwujudnya Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Yang Layak

Pencapaian sasaran 14 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.42. Capaian Kinerja Sasaran 14

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				2018		
		2014	2015	2016	2017	Target	Realisasi	%
Persentase rumah layak huni	%	98,38	98,40	98,80	99,42	99,43	99,43	100,00

Persentase rumah layak huni dihitung dengan membandingkan jumlah rumah atau hunian layak huni dengan jumlah rumah atau hunian yang tersedia. Rumah layak huni dapat dilihat dari aspek kesehatan (sanitasi, sirkulasi udara, pencahayaan), aspek kecukupan luas ruang, maupun kondisi kerusakannya. Penanganan rumah tidak layak huni merupakan prioritas dalam pembangunan perumahan di Kota Tangerang.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 476.814 unit rumah di Kota Tangerang (*Kotaku, 2018*), sedangkan jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 2.735 unit. Dengan demikian persentase rumah layak huni tahun 2018 adalah 99,43% atau realisasi kinerja mencapai 100,00%.



Tabel 3.43. Jumlah rumah dan jumlah rumah tidak layak huni perkecamatan tahun 2018

NO	KECAMATAN	JUMLAH BANGUNAN HUNIAN	JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
1	BATUCEPER	25.513	167
2	BENDA	24.248	166
3	CIBODAS	29.445	344
4	CILEDUG	42.336	132
5	CIPONDOH	48.824	175
6	JATIUWUNG	20.502	177
7	KARANG TENGAH	29.563	123
8	KARAWACI	55.154	426
9	LARANGAN	35.611	197
10	NEGLASARI	26.048	369
11	PERIUK	34.266	153
12	PINANG	53.607	146
13	TANGERANG	51.697	160
	JUMLAH	476.814	2.735

Sumber: Kotaku, 2018; Bid. Perkim, 2018

Luas kawasan kumuh, khususnya kumuh berat di Kota Tangerang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor 663/Kep.688-Bappeda/2016 tentang Penetapan Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Kumuh di Wilayah Kota Tangerang, luas kawasan kumuh berat tahun 2016 adalah 56,72 ha. Data eksisting melalui laporan hasil pemutakhiran data indikator bidang perumahan dan permukiman menunjukkan bahwa luas lingkungan kumuh (berat) di Kota Tangerang tahun 2017 seluas 38,07 ha sedangkan pada tahun 2018 menjadi 29,28 ha. Dengan luas kawasan permukiman di 13 (tigabelas) kecamatan adalah 7570,72 ha maka persentase luas kawasan kumuh dibandingkan luas kawasan permukiman mencapai 0,38%.

Tabel 3.44. Luas Kawasan Kumuh Berat Tahun 2016-2018

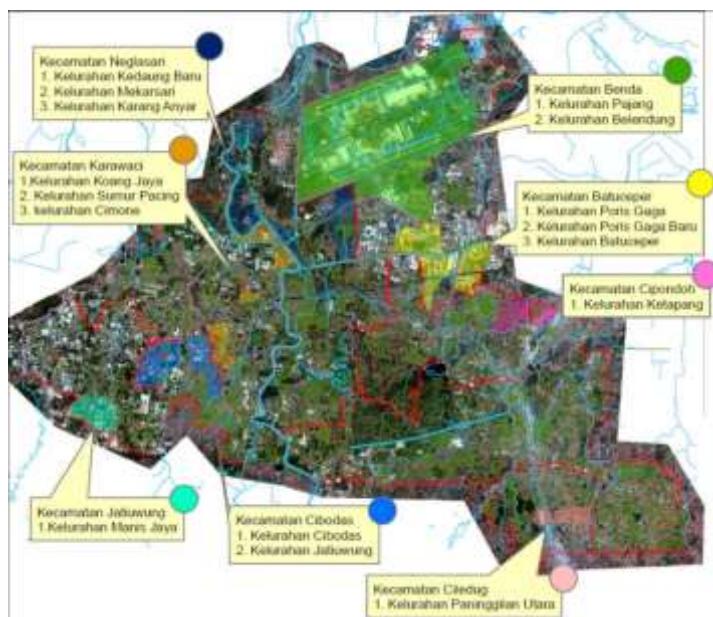
No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Kelurahan (Ha)	Luas Permukiman (Ha)	Luas Deliniasi Kumuh (Ha)			Prosentase Luas Kwsn Kumuh Terhadap Luas Kelurahan (%)		
					2016	2017	2018	2016	2017	2018
	Batuceper	Poris Gaga Baru	100,00	33,43	1,74	0,00	0,39	1,74	0,00	0,39
		Poris Gaga	121,79	64,83	6,30	0,00	1,00	5,17	0,00	0,82
		Batuceper	127,00	54,20	4,64	0,24	0,77	3,65	0,19	0,61



No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Kelurahan (Ha)	Luas Permukiman (Ha)	Luas Deliniasi Kumuh (Ha)			Prosentase Luas Kwsn Kumuh Terhadap Luas Kelurahan (%)		
					2016	2017	2018	2016	2017	2018
	Karawaci	Koang Jaya	67,00	20,90	4,76	0,00	1,31	7,10	0,00	1,96
	Karawaci	Sumur Pacing	53,30	21,06	2,96	2,96	2,50	5,55	5,55	4,69
		Cimone	110,00	59,30	2,28	2,28	3,00	2,07	2,07	2,73
	Ciledug	Pannggilan Utara	107,33	86,47	1,84	1,34	0,58	1,71	1,25	0,54
	Neglasari	Karang Anyar	209,71	51,99	1,74	1,74	4,15	0,83	0,83	1,98
		Mekarsari	134,20	43,70	5,95	5,74	1,31	4,43	4,28	0,98
		Kedaung Baru	113,50	36,00	2,90	2,90	1,50	2,56	2,56	1,32
	Cipondoh	Ketapang	180,00	85,93	7,40	7,10	2,12	4,11	3,94	1,18
	Cibodas	Cibodas	153,00	76,44	4,36	4,25	4,26	2,85	2,78	2,78
		Jatiuwung	110,00	42,76	3,51	3,24	3,94	3,19	2,95	3,58
	Jatiuwung	Manis Jaya	162,61	23,91	1,74	1,70	0,29	1,07	1,05	0,18
	Benda	Belendung	278,00	88,79	3,53	3,51	0,89	1,27	1,26	0,32
		Pajang	62,05	20,56	1,07	1,07	1,27	1,72	1,72	2,05
	JUMLAH		2.089,49	810,27	56,72	38,07	29,28	7,00	1,82	1,40

Sumber: data baseline 100-0-100, 2016;
Survey Updating Indikator Bidang Perkim, 2017; RP2KPKP, 2018

Gambar 3.19. Kawasan Kumuh Kota Tangerang



Upaya yang telah dilakukan



Untuk meningkatkan persentase rumah layak huni, pada tahun 2018 Dinas Perumahan dan Permukiman melaksanakan pembangunan 1.323 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan total anggaran mencapai Rp 26.841.689.000,-. Rumah yang mendapat bantuan rehabilitasi sebagian besar berada di wilayah Kecamatan Karawaci sebanyak 152 unit dan Kecamatan Neglasari sebanyak 150 unit.

Tabel 3.45. RTLH dibangun Tahun 2018

No.	Kecamatan	RTLH Dibangun (Unit)
1	Kecamatan Batuceper	70
2	Kecamatan Benda	113
3	Kecamatan Cibodas	93
4	Kecamatan Ciledug	76
5	Kecamatan Cipondoh	122
6	Kecamatan Jatiuwung	92
7	Kecamatan Karang Tengah	32
8	Kecamatan Karawaci	152
9	Kecamatan Larangan	114
10	Kecamatan Neglasari	150
11	Kecamatan Periuk	66
12	Kecamatan Pinang	145
13	Kecamatan Tangerang	98
JUMLAH		1.323

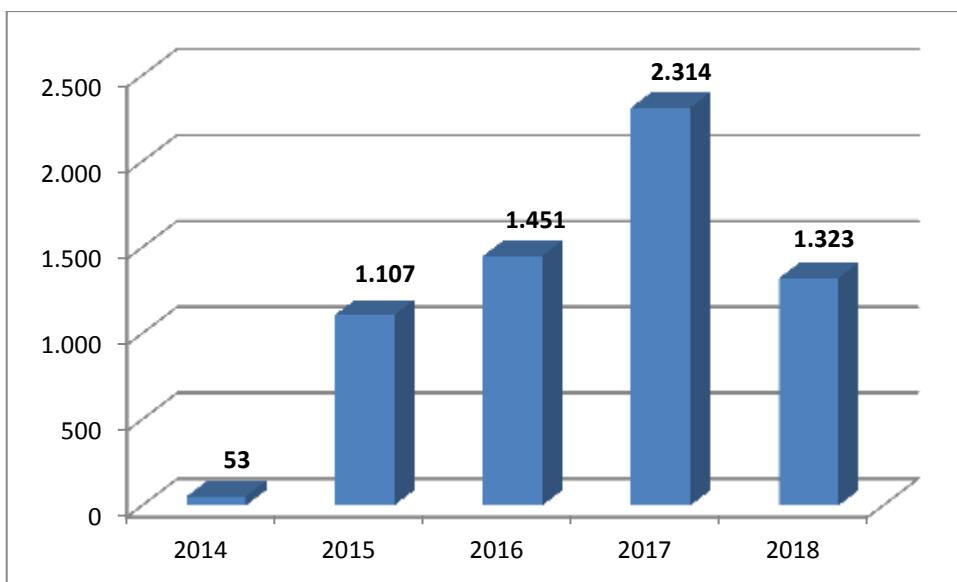
Sumber: Disperkim. 2018

Dengan demikian dalam periode 2014-2018 telah dibangun 6.248 unit RTLH dengan rincian pertahun adalah sebagai berikut:

Tahun	Rumah yang dibangun
2014	53
2015	1.107
2016	1.451
2017	2.314
2018	1.323
Jumlah	6.248

Gambar 3.20.

Jumlah RTLH dibangun per tahun 2014-2018



Sumber: Disperkim, 2018

Secara teknis pembangunan RTLH dilakukan dengan melibatkan kelompok masyarakat sebagai upaya pemberdayaan sekaligus guna meningkatkan rasa memiliki. Masyarakat yang mendapat bantuan pembangunan rumah tidak layak huni harus merupakan penduduk Kota Tangerang (ber KTP Kota Tangerang), tanah milik pribadi, tidak memiliki rumah di tempat lain, serta memiliki penghasilan di bawah upah minimum.

Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang untuk mengurangi Kawasan kumuh pada tahun 2018 antara lain dengan pembangunan jamban dan pembangunan saluran perpipaan air bersih bagi masyarakat miskin.

Permasalahan yang dihadapi

1. Masih terdapat Kawasan kumuh atau RTLH yang masih memerlukan penanganan dan intervensi dari pemerintah/pemerintah daerah. Namun ada kesulitan dalam pemutakhiran data dari aparat kelurahan atau kelompok masyarakat yang berkompeten, sehingga diperoleh data yang valid untuk sasaran penerima bantuan pembangunan rumah layak huni. Laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan masih terdapatnya masyarakat/keluarga berpenghasilan rendah turut perkontribusi terhadap kondisi rumah yang tidak layak dan masih terdapatnya lingkungan permukiman kumuh.



2. Dalam pelaksanaan kegiatan swakelola di lapangan terdapat pengelola (BKM) yang kinerjanya tidak maksimal sehingga pekerjaan fisik diselesaikan melewati tahun anggaran.

Solusi terhadap permasalahan

1. Dilakukan pendataan dan pembangunan rumah tidak layak huni secara bertahap, disepakati data yang dipakai dan secara periodik dilaksanakan pemutakhiran data. Pemerintah Kota Tangerang berkomitmen untuk terus memberikan bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masih memiliki rumah berkategori tidak layak huni, dengan memperkuat basis data dan melanjutkan pembangunan RTLH.
2. Pada tahun 2019 telah dianggarkan anggaran sebesar Rp 10.292.418.000,- untuk pelaksanaan pembangunan rumah tidak layak huni sebanyak 500 unit.
3. Mendorong fasilitator kelurahan pendamping BKM melalui Korkot Kotaku untuk meningkatkan pendampingan pada BKM sekaligus melibatkan unsur kecamatan dan kelurahan sebagai tim monitoring.
4. Memberikan sanksi kepada BKM bermasalah berupa pengurangan nilai kontrak atau penundaan kontrak kerja.

III.4.15 SASARAN 15

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Pencapaian sasaran 15 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.46. Capaian Kinerja Sasaran 15

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				2018		
		2014	2015	2016	2017	Target	Realisasi	%
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	(U, SB, B, C, K, SK, W)	W	W	W	SK	SK	SK	100,00

Kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu perhatian utama bagi Pemerintah Kota Tangerang ditengah meningkatnya faktor-faktor pengaruh yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan, baik sebagai dampak pertumbuhan



ekonomi maupun jumlah penduduk Kota Tangerang yang termasuk dalam kategori kota besar. Dalam perdebatan akan kualitas lingkungan hidup, satu hal yang sering sekali sulit untuk dijawab secara lugas berdasarkan data-data yang ada adalah apakah kualitas lingkungan hidup Kota Tangerang berada dalam kategori baik, sedang, atau buruk. Maka, untuk menjadi pedoman dalam menentukan kategori kualitas lingkungan hidup digunakanlah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mengukur Indeks Pencemaran Air (IPA), Indeks Pencemaran Udara (IPU), dan Indeks Tutupan Lahan (ITH).

Tujuan dari IKLH yaitu sebagai informasi bagi pengambil keputusan yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai alat untuk mengidentifikasi sumber masalah lingkungan hidup sehingga dapat diambil kebijakan untuk menentukan skala prioritas pembangunan lingkungan hidup, dan sebagai bahasa komunikasi yang menjadi penggerak bagi keterlibatan publik untuk ikut aktif menjaga kequalitas lingkungan hidup.

IKLH dihitung berdasarkan jumlah nilai dari 3 hasil pengukuran indeks yaitu Indeks Pencemaran Air (IPA) dengan bobot 30%, Indeks Pencemaran Udara (IPU) dengan bobot 30%, dan Indeks Tutupan Lahan (ITH) dengan bobot 40%. sebagaimana rumus berikut :

$$\text{IK} = (\text{IPA} \times 30\%) + (\text{IPU} \times 30\%) + (\text{ITH} \times 40\%)$$
$$\text{LH} + +$$

Keterangan :

IK	Indeks Kualitas lingkungan Hidup
IP	Indeks Pencemaran Air
IP	Indeks Pencemaran Udara
IT	Indeks Tutupan Lahan

Kategori IKLH :

Kategori IKLH	Nilai
Unggul	x > 90



Sangat Baik	$82 < x \leq 90$
Baik	$74 < x \leq 82$
Cukup	$66 \leq x \leq 74$
Kurang	$58 \leq x < 66$
Sangat Kurang	$50 \leq x < 58$
Waspada	$x < 50$

➤ *Indeks Pencemaran Air (IPA)*

Indeks Pencemaran Air (IPA) diperoleh dari data hasil uji laboratoriun sampel air sungai dan situ meliputi 3 parameter yaitu Fisika (suhu, zat padat tersuspensi, & zat oadat larut), kimia anorganik (BOD, COD, pH, Minyak, dan lain-lain), dan mikro biologi (Total Coliform). Hasil uji laboratorium dari 3 parameter tersebut kemudian dianalisis dengan perhitungan Indeks Pencemaran sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.115 tahun 2003 tentang pedoman penentuan status mutu air. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan. Indeks ini dinyatakan sebagai Indeks Pencemaran (IP) / Pollution Index (PI) yang digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran relatif terhadap parameter kualitas air yang diizinkan. Sample air sungai atau situ yang diambil untuk diuji, hasilnya dapat menggambarkan tingkat pencemaran yang terjadi jika hasil nilai Indeks Pencemaran (IP) nya berada pada interval berikut :

$0 \leq PIj \leq 1,0$	= memenuhi baku mutu (kondisi baik)
$1,0 < PIj \leq 5,0$	= cemar ringan
$5,0 < PIj \leq 10$	= cemar sedang
$PIj > 10$	= cemar berat

Indeks Pencemaran Air (IPA) tahun 2018 diukur dengan mengambil air di 9 (sembilan) lokasi sampel yaitu Sungai Cisadane, Sungai Mokevart, Sungai Angke, Sungai Sabi, Sungai Cicarab, Situ Cipondoh, Situ Gede, Situ Bulakan, dan Sungai Cangkring. Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap sampel air dari Sembilan lokasi tersebut, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.47. Hasil IPA Sungai Cisadane



Mutu Air	Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air	% pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
1	2	3	4	$5 = 3 \times 4$
Memenuhi		0%	70	-
Cemar Ringan	12	75%	50	37.50
Cemar Sedang	4	25%	30	7.50
Cemar Berat		0%	10	0.00
Total	16	100%		45.00

Tabel 3.48. Hasil IPA Sungai Mokevart

Mutu Air	Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air	% pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
1	2	3	4	$5 = 3 \times 4$
Memenuhi		0%	70	-
Cemar Ringan	12	100%	50	50
Cemar Sedang		0%	30	0
Cemar Berat		0%	10	0
Total	12	100%		50

Tabel 3.49. Hasil IPA Sungai Angke

Mutu Air	Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air	% pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
1	2	3	4	$5 = 3 \times 4$
Memenuhi		0%	70	-
Cemar Ringan	10	63%	50	31.25
Cemar Sedang	6	38%	30	11.25
Cemar Berat		0%	10	0.00
Total	16	100%		42.50

Tabel 3.50. Hasil IPA Sungai Sabi

Mutu Air	Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air	% pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
1	2	3	4	$5 = 3 \times 4$
Memenuhi		0%	70	-
Cemar Ringan	6	50%	50	25.00
Cemar Sedang	6	50%	30	15.00
Cemar Berat		0%	10	0.00
Total	12	100%		40.00

Tabel 3.51. Hasil IPA Sungai Cirarab

Mutu Air	Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air	% pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
1	2	3	4	$5 = 3 \times 4$
Memenuhi		0%	70	-
Cemar Ringan	1	10%	50	5.00



Cemar Sedang	9	90%	30	27.00
Cemar Berat		0%	10	0.00
Total	10	100%		32.00

Tabel 3.52. Hasil IPA Situ Cipondoh

Mutu Air	Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air	% pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
1	2	3	4	$5 = 3 \times 4$
Memenuhi	4	50%	70	35.00
Cemar Ringan	4	50%	50	25.00
Cemar Sedang		0%	30	0.00
Cemar Berat		0%	10	0.00
Total	8	100%		60.00

Tabel 3.53. Hasil IPA Situ Gede

Mutu Air	Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air	% pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
1	2	3	4	$5 = 3 \times 4$
Memenuhi	1	20%	70	14.00
Cemar Ringan	4	80%	50	40.00
Cemar Sedang		0%	30	0.00
Cemar Berat		0%	10	0.00
Total	5	100%		54.00

Tabel 3.54. Hasil IPA Situ Bulakan

Mutu Air	Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air	% pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
1	2	3	4	$5 = 3 \times 4$
Memenuhi		0%	70	-
Cemar Ringan	5	100%	50	50.00
Cemar Sedang		0%	30	0.00
Cemar Berat		0%	10	0.00
Total	5	100%		50.00

Tabel 3.55. Hasil IPA Situ Cangkring

Mutu Air	Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air	% pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
1	2	3	4	$5 = 3 \times 4$
Memenuhi		0%	70	-
Cemar Ringan	5	100%	50	50.00



Cemar Sedang		0%	30	0.00
Cemar Berat		0%	10	0.00
Total	5	100%		50.00

Tabel 3.56. Hasil Rekap IPA

Mutu Air	Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air	% pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
1	2	3	4	$5 = 3 \times 4$
Memenuhi	5	6%	70	3.90
Cemar Ringan	58	65%	50	32.58
Cemar Sedang	26	29%	30	8.76
Cemar Berat		0%	10	0.00
Total	89	100%		45.28

Dari perhitungan nilai IPA terhadap 9 (sembilan) sampel lokasi sebagaimana disajikan pada tabel 3.12 dapat disimpulkan bahwa Indeks Pencemaran Air (IPA) tahun 2018 sebesar 45,28. Nilai indeks tersebut menurun jika dibandingkan tahun 2017 dengan nilai IPA sebesar 49,55. Salah satu penyebab menurunnya nilai IPA tersebut adalah bertambahnya jumlah titik sampel dengan mutu air cemar sedang yang cukup signifikan.

➤ **Indeks Pencemaran Udara (IPU)**

Data kualitas udara di Kota Tangerang didapatkan dari hasil pemantauan di 13 (tiga belas) kecamatan yang mewakili 6 kawasan yaitu : Kawasan pelayanan umum, perdagangan dan jasa, perkantoran pemerintahan, perumahan & pemukiman, peruntukan bandara dan industri. Parameter yang digunakan dalam perhitungan Indeks Pencemaran Udara adalah konsentrasi NO₂ dan SO₂ dengan durasi pengukuran 24 jam. Parameter dan waktu pengukuran mengacu pada regulasi PP No.41 tahun 1999 tentang Baku Mutu Udara Ambient untuk memperoleh nilai perbandingan atau rasio nilai pencemaran NO₂ dan SO₂ terhadap nilai baku mutunya. NO₂ dan SO₂ adalah 2 parameter uji yang digunakan untuk menghitung Indeks Pencemaran Udara (IPU), Parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan



bakar yang mengandung sulfur lainnya. Hasil perhitungannya disajikan dalam tabel 3.13 berikut ini :

Tabel 3.57. Hasil Perhitungan Indeks Pencemaran Udara Tahun 2018

Parameter	Rerata pemantauan	Baku mutu	Index 2018
NO ₂	9.23 µg/Nm ³	40	0,23075
SO ₂	2.44 µg/Nm ³	20	0,122
Indeks Udara (Indeks Annual model EU-leu)			0,176375
Indeks Kualitas Udara (IKU)			95,75694

Berdasarkan hasil rata-rata pemantauan uji lapangan terhadap parameter NO₂ tahun 2018 diperoleh hasil 9.23µg/Nm³, lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 (6.5295µg/Nm³). Sedangkan parameter SO₂ tahun 2018 diperoleh hasil 2.44µg/Nm³ lebih rendah dari tahun 2017 (18.045µg/Nm³). Maka, perhitungan nilai indeks kualitas udara (IKU) dapat disimpulkan bahwa IKU tahun 2018 berada pada nilai 95,76. Nilai indeks tersebut lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2017 dengan nilai IKU 75.95. Secara umum hasil uji 2 parameter masih menunjukkan kondisi udara yang baik.

➤ **Indeks Tutupan Hutan (ITH)**

Tabel 3.58. HASIL PERHITUNGAN INDEKS TUTUPAN HUTAN (ITH) 2018

Luas Hutan/ lahan (Km ²)	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Luas Tutupan Hutan/Lahan	ITH
10.67	178.35	5.982618447	27.88454737

Indeks Tutupan Hutan (ITH) diukur dengan memperhitungkan luas ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah Kota Tangerang. Berdasarkan kegiatan Kajian Pencapaian Ruang Terbuka Hijau tahun 2018 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, diperoleh bahwa luas RTH publik dan privat di Kota Tangerang mencapai 10,67 Km² , sehingga jika dibandingkan dengan luas wilayah Kota Tangerang 178,35 Km² maka persentase RTH publik baru mencapai 5,98%. Dengan mengacu pada rumusan baku perhitungan ITH, maka ITH Kota Tangerang berada pada angka 27,885. Dengan rumus sebagai berikut :

- presentase luas tutupan lahan= luas lahan/luas wilayah



- untuk menghitung indek tutupan lahan dipakai rumus sebagai berikut 100-((84,3-presentase luas tutupan lahan)*(100-50)/84,3-30))

➤ **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Tangerang**

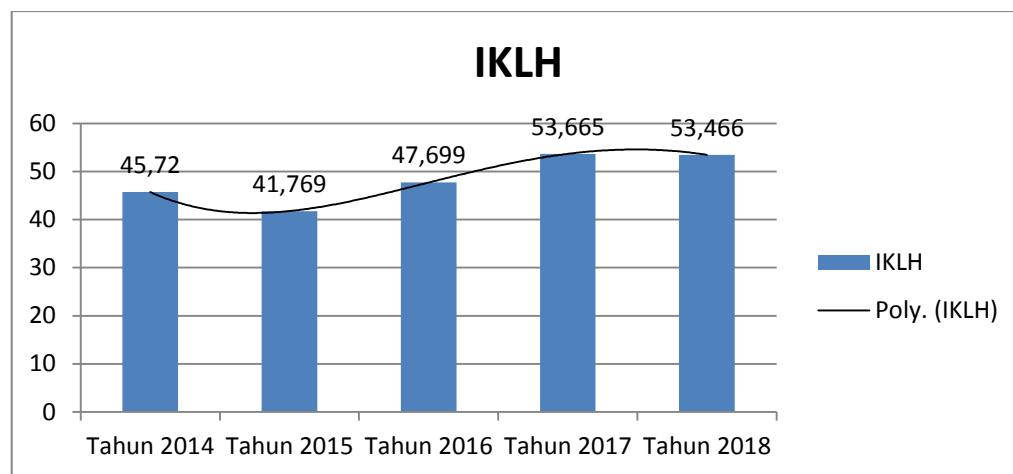
Dari perhitungan Indeks Pencemaran Air (IPA), Indeks Pencemaran Udara (IPU), dan Indeks Tutupan Hutan (ITH) tersebut maka dapat diambil kesimpulan nilai IKLH Kota Tangerang sebagai berikut:

Tabel 3.59. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Indikator	Nilai	Bobot	Hasil
1	Indeks Pencemaran Air	45,28	30%	13,584
2	Indeks Pencemaran Udara	95,76	30%	28,728
3	Indeks Tutupan Lahan	27,885	40%	11,154
	IKLH Kota Tangerang			53,466

Berdasarkan tabel 3.15 diatas, maka Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tangerang tahun 2018 sebesar **53,466** dan berada dalam kategori **“Sangat Kurang” (SK)**. Pencapaian tersebut telah sesuai dengan target RPJMD dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018 meskipun pencapaian tersebut harus lebih ditingkatkan karena hasil uji Indeks Pencemaran Air di beberapa titik lokasi terjadi peningkatan dalam kategori cemar sedang, Indeks Pencemaran Udara masih dalam kategori baik, dan Indeks Tutupan Lahan yang menurun. Jika membandingkan dengan hasil pengukuran IKLH 4 tahun kebelakang dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut :

Gambar 3.21. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Tahun 2014-2018



Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai IKLH dari tahun 2014 hingga 2016 masih dalam kategori status “Waspada” dengan nilai indeks dibawah 50, kemudian mengalami peningkatan menjadi kategori “Sangat Kurang” dengan nilai indeks 53,665 pada tahun 2017. Pada tahun 2018 nilai IKLH masih masuk dalam kategori “Sangat Kurang” walaupun terjadi sedikit penurunan menjadi 53,466 dibandingkan dengan tahun 2017 disebabkan turunnya Indeks Pencemaran Air dan Indeks Tutupan Lahan. Pencapaian tersebut harus lebih ditingkatkan untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang lebih tinggi yakni mencapai kategori “Unggul”.

Jika membandingkan IKLH Kota Tangerang dengan IKLH Provinsi dan IKLH Nasional dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.60. Perbandingan IKLH Kota Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2014 - 2018

IKLH Tahun	Kota Tangerang	Provinsi Banten	Nasional
Tahun 2014	45,72 (W)	43,67 (W)	63,42 (K)
Tahun 2015	41,76 (W)	55,36 (SK)	68,23 (C)
Tahun 2016	47,69 (W)	60,00 (K)	65,73 (K)
Tahun 2017	53,66 (SK)	51,58 (SK)	66,46 (C)
Tahun 2018	53,47 (SK)	49,18 (W)	65,14 (K)

Sumber : Laporan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, KLHK, 2018

Berdasarkan informasi tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai IKLH Kota Tangerang yang masuk kategori “Sangat Kurang (SK)” lebih tinggi daripada nilai IKLH Provinsi Banten dan lebih rendah dari nilai IKLH Nasional yang telah mencapai nilai di atas 60 atau masuk kategori “Kurang (K)”. Hal tersebut harus dipahami karena Kota



Tangerang tidak memiliki hutan primer dan hutan skunder yang menyumbang bobot 40% dalam perhitungan IKLH, sehingga nilai indeks tutupan lahan (ITH) yang relatif lebih rendah daripada Nasional menyebabkan nilai IKLH Kota Tangerang lebih rendah.

Upaya Yang Telah Dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas udara dan tutupan lahan melalui upaya sebagai berikut :
 - a. Mengurangi polusi udara melalui kegiatan Hari Bebas Kendaraan di 7 lokasi yaitu : Puri Beta I Kecamatan Larangan , Jalan Pinang Kunciran Kecamatan Pinang, Jalan Irigasi Sipon Kecamatan Cipondoh, Jalan M. Yamin Kecamatan Tangerang, Jalan Suryadharma Kecamatan Neglasari, Perum Kecamatan Cibodas, dan Kecamatan Karawaci.
 - b. Pengendalian Pencemaran Udara dengan diadakannya acara Fun Rally Eco-Driving.
 - c. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran Udara dengan tujuan untuk meningkatkan ketiaatan pelaku usaha/kegiatan dan masyarakat terhadap pengendalian pencemaran udara.
 - d. Meningkatkan penghijauan melalui kegiatan Peningkatan Penghijauan Kota yaitu menanam 1.500 pohon produktif.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk melakukan upaya pengelolaan dan perlindungan kondisi lingkungan hidup melalui upaya sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi Kampung Iklim dengan melakukan pembinaan kepada 2 RW yaitu Perum Pabuaran Tumpeng RW 07 dan Perum Tanah Tinggi RW 08 melalui kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup.
 - b. Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA, Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengendalian Pencemaran Udara, dan Pengelolaan limbah B3 dengan terlaksananya kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3.



3. Menangani pengaduan, penyelesaian sengketa, dan penegakkan hukum lingkungan hidup sebagai upaya untuk mencegah atau menghentikan pencemaran/perusakan yang berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup, melalui upaya sebagai berikut :
 - a. Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup. Selama tahun 2018 DLH telah menerima dan memproses 48 kasus lingkungan hidup yang diadukan oleh masyarakat.
 - b. Penanganan Kasus Lingkungan Hidup. Selama tahun 2018 DLH telah menyelesaikan 30 kasus lingkungan hidup.
4. Melakukan pemantauan kualitas air, udara, dan kebisingan untuk mengetahui tingkat pencemarannya melalui kegiatan :
 - a. Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Kondisi Ekologis dan Pemantauan Kualitas Air Tanah dan Air Situ di Sembilan lokasi sungai dan situ (Sungai Cisadane, Sungai Mokevert, Sungai Angke, Sungai Sabi, Sungai Cicarab, Situ Cipondoh, Situ Gede, Situ Bulakan, dan Sungai Cangkring), dan Pemantauan Kualitas Udara dan Kebisingan yang dilaksanakan di 13 (tiga belas) kecamatan yang mewakili 6 kawasan yaitu : Kawasan pelayanan umum, perdagangan dan jasa, perkantoran pemerintahan, perumahan & pemukiman, peruntukan bandara dan industri.
 - b. Meningkatkan pencapaian prestasi Adipura dan membina sekolah adiwiyata. Di tahun 2018 Pemerintah Kota Tangerang berhasil memperoleh penghargaan Adipura dan berhasil membina 1 sekolah Adiwiyata Mandiri yaitu SMPN 1 Tangerang dan 9 sekolah Adiwiyata Nasional yaitu SDN Tangerang 14, SDN Cikokol 2, SDN Pondok Makmur, SDN Pinang 3, SDN Tangerang 4, SDN Batu Ceper 1, SDN Gondrong 7, SDN Petir 3, SDN Sukasari 5. Pencapaian tersebut tentunya ikut andil dalam meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Kegiatan yang mendukung yaitu : Koordinasi penilaian kota sehat/adipura, Pengadaan Sarana Penunjang Penilaian Kota Sehat/Adipura (pengadaan alat biotor), dan Koordinasi Sekolah Adhiwiyata.

Permasalahan Yang Dihadapi

Masalah yang dihadapi dalam mewujudkan indikator sasaran yaitu :



1. Kualitas air secara umum masih tergolong baik, tetapi masih ditemukan nilai indeks pencemaran air di beberapa titik air sungai dan situ yang tercemar sedang. Hal tersebut disebabkan oleh masih ditemukannya sampah rumah tangga di saluran air dan limbah cair yang dihasilkan oleh rumah tangga, industri, rumah sakit, dan pusat perdagangan dan jasa yang masih melebihi Baku Mutu Lingkungan (BML).
2. Kualitas udara secara umum berada pada kondisi cukup baik, tetapi tahun 2018 ditemukan konsentrasi parameter NO₂ yang lebih tinggi dari tahun 2017 meskipun masih berada dalam batas wajar sebagaimana kualitas SO₂. Kandungan NO₂ yang meningkat tersebut perlu diwaspadai karena berdampak negatif terhadap lingkungan.
3. Luas ruang terbuka hijau yang perlu ditambah, karena hingga saat ini luas RTH adalah 10,67 Km². Luas harus ditambah guna meningkatkan nilai Indeks Tutupan Lahan, mengurangi polusi udara, dan meningkatkan kualitas udara.

Solusi Terhadap Permasalahan

Upaya yang akan dilakukan tahun 2019 antara lain :

1. Upaya meningkatkan Indeks Kualitas Air :
 - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak buang sampah di saluran air dan meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah dengan menambah jumlah TPST 3R dan tempat pembuangan sampah sementara untuk mengurangi jumlah sampah terbuang ke sungai.
2. Upaya meningkatkan Indeks Kualitas Udara dengan melaksanakan kegiatan hari bebas kendaraan setiap hari minggu.
3. Upaya meningkatkan Indeks Tutupan Lahan dengan menambah luas ruang terbuka hijau, adapun kegiatan yang sudah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup adalah melaksanakan kegiatan penanaman 900 pohon produktif dan 2.600 pohon berbuah pada event tahunan Hari Menanam Pohon.
4. Meningkatkan pengawasan melalui kegiatan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup.



Dari hasil evaluasi capaian kinerja Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2018 didapatkan nilai capaian kinerja pada tahun 2018 memperoleh predikat **Sangat Tinggi**, dengan **rata-rata seluruh capaian kinerja dari 15 sasaran adalah 112,40%**.

Pada Tahun 2018, pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan mencakup pencapaian 15 (lima belas) sasaran stratejik. Dari penilaian sendiri (*self assessment*) untuk seluruh indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dan mengacu pada skala ordinal di atas, maka capaian kinerja sasaran dalam Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.61. Rata-rata Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2018

No.	Sasaran	% Rata2 Capaian Kinerja Sasaran	Kriteria
1	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	111,98	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	100,00	Sangat Tinggi
3	Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	100,00	Sangat Tinggi
4	Terwujudnya peningkatan investasi dan kemudahan perijinan	100,30	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya kepariwisataan	270,91	Sangat Tinggi
6	Terwujudnya industri yang maju	94,78	Sangat Tinggi
7	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	104,02	Sangat Tinggi
8	Meningkatnya aksesibilitas kesehatan	100,00	Sangat Tinggi
9	Terwujudnya pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial	101,35	Sangat Tinggi
10	Terwujudnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja	101,46	Sangat Tinggi
11	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, kepoltikan dan hukum	100,00	Sangat Tinggi
12	Terwujudnya pengendalian banjir dan genangan	101,25	Sangat Tinggi
13	Terwujudnya pelayanan tansportasi perkotaan terpadu	100,00	Sangat Tinggi
14	Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak	100,00	Sangat Tinggi
15	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	100,00	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		112,40	Sangat Tinggi

III.5 REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin



dicapai Pemerintah Kota Tangerang penganggarannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang sebesar Rp4.820.305.919.996,22 dan direalisasikan sebesar Rp4.287.017.431.534,18 (88,94%). Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk pendanaan belanja tidak langsung sebesar Rp1.532.215.015.289,42 dan belanja langsung sebesar Rp3.288.090.904.706,80. Alokasi anggaran belanja langsung tersebut diperuntukan bagi pendanaan program dan kegiatan pada 43 SKPD yang meliputi 6 urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 5 Urusan Pilihan dan 6 Urusan Penunjang. Program dan kegiatan serta anggaran dialokasikan dalam 3 (tiga) kelompok yakni anggaran berdasarkan SKPD, anggaran berdasarkan urusan dan anggaran berdasarkan prioritas.

Alokasi belanja daerah pada Tahun Anggaran 2018 diprioritaskan pada pendanaan untuk:

1. Pelayanan sarana-prasarana dan pengendalian banjir (fasilitas dan utilitas umum) yang layak dan memadai;
2. Pelayanan pendidikan yang lengkap, berkualitas dan terjangkau;
3. Pelayanan kesehatan yang lengkap, berkualitas dan terjangkau;
4. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan pelayanan kesejahteraan sosial;
5. Pengetahuan dan kebudayaan, ekonomi kreatif, inovasi teknologi, serta daya saing masyarakat;
6. Kondusivitas iklim investasi daerah dan iklim usaha daerah
7. Ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat
8. Daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekologis (Sosial-Ekonomi-Lingkungan)
9. Tata kelola dan tata kerja birokrasi pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
10. Ketahanan pangan daerah;
11. Pengelolaan energi.

Anggaran dan realisasi belanja daerah yang tersusun atas belanja tidak langsung dan belanja langsung seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.62. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2018

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
---------------	---------------	----------------	---



Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I. Belanja Tidak Langsung	1.532.215.015.289,42	1.431.475.914.993,00	93,43
a. Belanja Pegawai	1.380.188.133.177,42	1.343.759.199.474,00	97,36
b. Belanja Hibah	87.858.625.000,00	86.286.025.000,00	98,21
a. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	1.593.417.030,00	1.399.545.792,00	87,83
b. Belanja Tidak Terduga	62.574.840.082,00	31.144.727,00	0,05
II. Belanja Langsung	3.288.090.904.706,80	2.855.541.516.541,18	86,84
a. Belanja Pegawai	82.163.018.410,00	58.211.546.895,00	70,85
b. Belanja Barang dan Jasa	1.906.750.333.893,93	1.798.891.127.384,18	94,34
c. Belanja Modal	1.299.177.552.402,87	998.438.842.262,00	76,85
J u m l a h	4.820.305.919.996,22	4.287.017.431.534,18	88,94

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2019

Untuk Tahun 2018 anggaran belanja langsung mencakup 68,21% dari total anggaran belanja daerah. Sedangkan untuk realisasi belanja daerah sebesar Rp4.287.017.431.534,18 (88,94%) berada di bawah target realisasi sebesar 100% dengan capaian realisasi terendah adalah belanja langsung sebesar 86,84%.

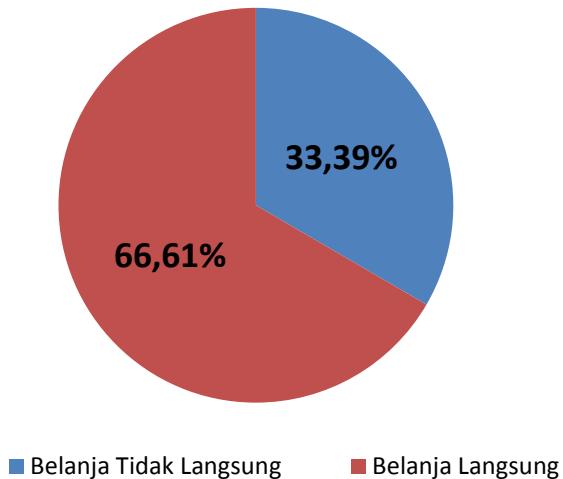
Anggaran Belanja Langsung merupakan bagian dari APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018 dengan komposisi belanja APBD Kota Tangerang, sebagai berikut :

Tabel 3.63. Komposisi Belanja Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018
(Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No.	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Komposisi	
				Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	Belanja Tidak Langsung	1.532.215.015.289,42	1.431.475.914.993,00	31,79	33,39
2	Belanja Langsung	3.288.090.904.706,80	2.855.541.516.541,18	68,21	66,61
	Jumlah	4.820.305.919.996,22	4.287.017.431.534,18	100,00	100,00

Sumber: BPKD, 2019

Gambar 3.22. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018



Alokasi anggaran Belanja Langsung apabila dilihat berdasarkan urusan yang ditangani oleh Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.64. Alokasi dan Realisasi Anggaran berdasarkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2018

No	Urusan	Jml Program	Jml Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
I	Wajib	194	1.491	2.896.603.381.915,78	2.502.224.077.777,18
A	Wajib Pelayanan Dasar	79	908	2.046.969.521.308,00	1.884.527.110.541,18
1	Pendidikan	7	429	678.485.864.116,00	645.984.526.224,18
2	Kesehatan	21	220	475.948.250.089,00	411.629.512.132,00
3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	17	67	650.628.907.103,00	597.235.837.604,00
4	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	10	47	122.040.805.110,00	113.898.507.877,00
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	11	74	70.086.451.320,00	67.481.251.313,00
6	Sosial	13	71	49.779.243.570,00	48.297.475.391,00
B	Wajib Non Pelayanan	115	583	849.633.860.607,78	617.696.967.236,00



No	Urusan	Jml Program	Jml Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	Dasar				
7	Tenaga Kerja	8	36	11.437.254.121,00	10.703.271.604,00
8	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	9	29	6.500.597.500,00	6.115.476.391,00
9	Pangan	5	33	7.467.952.975,00	7.006.846.659,00
10	Pertanahan	7	23	279.061.617.326,78	102.863.890.478,00
11	Lingkungan Hidup	10	64	216.255.268.502,00	200.969.829.312,00
12	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3	37	18.185.424.190,00	16.919.650.603,00
13	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1	6	6.420.809.000,00	6.389.788.000,00
14	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	8	22	7.069.507.400,00	4.654.347.318,00
15	Perhubungan	11	57	166.254.921.125,00	140.773.144.311,00
16	Komunikasi Dan Informasi	8	72	43.129.533.590,00	39.982.591.810,00
17	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	8	34	11.667.954.814,00	10.832.210.327,00
18	Penanaman Modal	7	34	8.882.065.720,00	8.250.504.942,00
19	Kepemudaan Dan Olah Raga	12	48	48.330.953.612,00	44.047.108.516,00
20	Statistik	1	4	1.415.650.000,00	1.352.202.000,00
21	Persandian	1	4	493.262.500,00	449.005.000,00
22	Kebudayaan	8	26	9.982.328.071,00	9.340.857.069,00
23	Perpustakaan	4	39	6.396.168.861,00	6.365.401.596,00
24	Kearsipan	4	15	682.591.300,00	680.841.300,00
II	Pilihan	24	66	22.964.187.398,00	21.994.267.412,00
1	Kelautan Dan Perikanan	1	3	346.307.100,00	316.816.020,00
2	Pariwisata	3	12	4.673.521.655,00	4.354.589.800,00



No	Urusan	Jml Program	Jml Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
3	Pertanian	6	11	1.911.132.265,00	1.798.169.928,00
4	Perdagangan	5	12	8.565.329.883,00	8.487.879.836,00
5	Perindustrian	9	28	7.467.896.495,00	7.036.811.828,00
III	Penunjang Urusan	51	373	368.523.335.393,02	331.347.171.352,00
1	Perencanaan	12	89	18.914.587.229,02	18.513.644.519,00
2	Keuangan	5	67	27.057.750.589,00	24.020.412.942,00
3	Kepegawaian	7	47	17.355.721.175,00	14.719.266.315,00
4	Pendidikan Dan Pelatihan	1	1	2.352.950.000,00	2.352.950.000,00
5	Sekretariat Daerah	9	78	84.507.933.254,00	76.675.874.034,00
6	Sekretariat DPRD	6	34	102.262.283.440,00	84.252.493.404,00
7	Pengawasan	6	24	5.624.327.860,00	5.105.616.909,00
8	Kecamatan	5	33	110.447.781.846,00	105.706.913.229,00
JUMLAH		269	1.930	3.288.090.904.706,80	2.855.565.516.541,18

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2019

Permasalahan

Dalam rangka pengelolaan belanja daerah masih terdapat permasalahan yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2018, adalah sebagai berikut:

1. Adanya program-program lanjutan strategis, terutama program dan kegiatan fisik dengan nilai anggaran yang cukup besar, sehingga berpengaruh terhadap keseluruhan rencana alokasi anggaran belanja;
2. Banyaknya alternatif atau usulan program menurut bidang pembangunan yang perlu dilaksanakan;
3. Kebutuhan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Dinas/Badan/Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

Solusi

Adapun solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut:



1. Menerapkan strategi yang lebih mengutamakan pada pencapaian sasaran program pembangunan dimana alokasinya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;
2. Penanganan masalah-masalah khusus yang perlu segera ditangani serta menampung aspirasi masyarakat yang mendesak dan membutuhkan perhatian lebih dari Pemerintah Daerah.

III.6 PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Dalam melaksanakan amanahnya Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Pemerintah Kota Tangerang telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai. Berikut Prestasi dan penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kota Tangerang selama tahun 2018.

No.	Tanggal	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tempat
1	21 Februari 2018	Penghargaan dengan Kategori Media Center Aktif Kontribusi Berita Kota/Kabupaten se-Indonesia	Menteri Komunikasi dan Informatika	The Margo Hotel
2	29 Maret 2018	Lima Penghargaan pada Public Relations (PR) Indonesia Award 2018, yaitu; Media Cetak Internal (Majalah LIVE), Aplikasi (Aplikasi Tangerang LIVE), Program Digital Public Relation (Aplikasi Laksamana), Departemen Public Relations, Terpopuler di Media Kategori Kota	Public Relation Indonesia	Surabaya
3	10 April 2018	Terbaik Pertama Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah se-Provinsi Banten di Tahun 2018	Gubernur Banten	Serang, Banten
4	25 April 2018	Penghargaan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha atas Jasa dan Prestasi Tinggi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Presiden RI	Kementerian Dalam negeri, Jakarta



No.	Tanggal	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tempat
5	25 April 2018	Kinerja terbaik yang dinilai dari Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2017 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2016 yang disampaikan oleh para kepala daerah.	Menteri Dalam Negeri	Hotel Sultan, Senayan, Jakarta
6	03 Mei 2018	Indonesia Smart Nation Awards 2018 pada kategori "Smart Branding"	Kementerian Pariwisata RI	Indonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai (BSD)
7	23 Mei 2018	Kabupaten dan Kota yang telah mendukung program JKN-KIS.	Menteri Dalam Negeri	Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta
8	28 Mei 2018	Meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keselas kali berturut - turut Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Kantor Perwakilan BPK Banten, Jalan Palka No.1, Serang, Banten,
9	23 Juli 2018	Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Pratama	Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dyandra convention center, Surabaya
10	27 Agustus 2018	Lomba Kesehatan Nasional Tenaga Kesehatan Tingkat (Nakes) Nasional	Menteri Kesehatan	
11	30 Agustus 2018	Penghargaan Kepala Daerah Inovatif (KDI)	Media Indonesia	Anjungan City of Makasar, Kota Makasar Sulawesi Selatan
12	09 September 2018	Aplikasi E-Plesiran Raih Penghargaan Smart City Nasional	Menteri Komunikasi dan Informatika	



No.	Tanggal	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tempat
13	17 September 2018	Penghargaan Adipura Kencana yang Kedua Kali	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	
14	07 Oktober 2018	Penghargaan Indonesia Smart Nation Award (ISNA)	Menteri Komunikasi dan Informatika	
15	17 Oktober 2018	Penghargaan Smart City sebagai Badan Publik dengan kategori "Informatif" di Provinsi Banten	Gubernur Banten	Serang, Banten
16	24 Oktober 2018	Pembina Program Kampung Iklim dan Program Kampung Iklim Tingkat Utama	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta
17	25 Oktober 2018	Juara 1 Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) tingkat Propinsi Banten serta penghargaan Upakarti Utama 3 tingkat nasional		
18	23 Nopember 2018	Kampung Bekelir berhasil raih gelar juara ajang Anugerah Pesona Indonesia (API)	Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia	Ballroom Hotel Sahid Sudirman, Jakarta
19	27 Nopember 2018	RSUD Kota Tangerang Raih Penghargaan Kategori Pelayanan Publik terbaik	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Republik Indonesia	
20	05 Desember 2018	Juara terbaik 1 kategori Pelayanan Informasi Melalui Internet (Website) dan juara 3 terbaik kategori Media Sosial.	Kemenkominfo	



No.	Tanggal	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tempat
21	06 Desember 2018	TOP Leader on IT Leadership 2018, TOP IT on RSUD Apps Development 2018, TOP IT on Public Services Application 2018, TOP Digital Transformation Readiness 2018	Majalah yang bergerak di bidang teknologi komputerisasi IT Works	The Sultan Hotel
22	11 Desember 2018	Penghargaan Kota Peduli HAM	Menteri Hukum dan HAM RI	Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta
23	13 Desember 2018	Penghargaan Kategori Excellent City pada Pilar Ke-3 yaitu Kendaraan yang Berkeselamatan di acara Penganugerahan IRS 2018	Menteri Perhubungan	Hotel JW Marriott, Jakarta Pusat
24	19 Desember 2018	Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Ketiga Kalinya	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Selatan no VI Jakarta Pusat

BAB IV. PENUTUP

Hasil pengukuran indikator kinerja Tahun 2018 terhadap 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat digambarkan bahwa 8 indikator capaiannya melebihi target (44,44%), 9 indikator capaiannya sesuai target (50,00%), dan 1 indikator belum mencapai target (5,56%). Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, rata-rata capaian kinerja indikator Tahun 2018 adalah sebesar 112,40%, atau kategori Sangat Tinggi. Hal ini mengindikasikan keberhasilan pencapaian target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Tangerang 2014-2018.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari keterlibatan pihak-pihak yang terkait, termasuk dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam pencapaian Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah pada indikator nilai SAKIP Kota Tangerang yang telah mencapai nilai B. Penilaian ini menunjukkan adanya perbaikan pada tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja. Untuk itu, prinsip efisiensi harus sudah dimulai dengan memperbaiki pola pemanfaatan anggaran sejak pertama kali merencanakan program/ kegiatan yang berorientasi pada hasil.

Untuk lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja di Kota Tangerang, perlu melanjutkan penyempurnaan pada kualitas IKU di seluruh Perangkat Daerah dan menjabarkan kinerja (*Cascade Down*) dari level Walikota sampai ke individu pegawai.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tangerang yang menggambarkan Capaian Kinerja tiap-tiap Sasaran pada Tahun 2018 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Tangerang.

RENCANA STRATEGIS KOTA TANGERANG 2014 - 2018

Misi 1: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan professional

No.	Sasaran	Indikator Sasaran		Realisasi		Target		
		Uraian	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.1.1	Terwujudnya penataan pertanahan	1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	77,15	80,01	83,00	85,99
		2	Persentase kasus tanah pemda/negara yang diselesaikan	% per tahun	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1.2	Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1	Persentase penerbitan kartu keluarga	%	75,56	78,34	90,36	95,06
		2	Persentase penerbitan kartu tanda penduduk	%	95,68	75,09	99,76	99,88
		3	Persentase penerbitan kutipan akta kelahiran	%	18,85	48,11	72,15	84,40
		4	Persentase penerbitan kutipan akta kematian	%	77,35	69,54	90,36	95,06
		5	Persentase Pasangan Suami-Isteri Ber-Akta Nikah	%	15,24	36,49	66,47	86,19
1.1.3	Terwujudnya sistem dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Poin	2,92	2,86	2,90	2,96
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada SKPD pelayanan Publik	Poin	63,50	78,76	80,45	80,45
		3	Persentase Raperda yang disetujui DPRD	%	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1.4	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	1	Jumlah pendapatan daerah	Rp. Triliun	3,02	3,38	3,15	3,63
		2	Jumlah pendapatan asli daerah (PAD)	Rp. Triliun	1,26	1,47	1,44	1,63
		3	Persentase pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah	%	41,70	43,50	45,70	45,00

No.	Sasaran	Indikator Sasaran			Realisasi		Target		
		Uraian	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	
1.1.5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	1	Persentase Hasil temuan yang ditindak lanjuti	%	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
		2	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP/ WDP/ TMP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		3	Nilai evaluasi AKIP pemerintah daerah	A, BB, B, CC, C, D	CC	CC	CC	CC	B
		4	Persentase SKPD yang memiliki nilai "B" hasil evaluasi SAKIP	%			60,00	80,00	100,00
1.1.6	Terwujudnya aparatur yang profesional	1	Persentase Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) diatas 75	%			85,00	85,00	87,00
		2	Jumlah Pegawai yang terkena hukuman disiplin	Orang	18	16	6	6	6
1.1.7	Terwujudnya statistik dan persandian yang berkualitas	1	Persentase publikasi data statistik daerah berbasis website	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2	Persentase penggunaan persandian untuk pengamanan aplikasi	%			60,00	31,10	71,00
1.1.8	Terwujudnya perencanaan serta penelitian dan pengembangan pembangunan yang berkualitas	1	Persentase output kegiatan yang tercapai	%	74,47	89,34	91,05	92,00	93,00
		2	Persentase indikator sasaran yang tercapai	%	78,48	80,72	93,26	96,70	97,80
		3	Persentase Keselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		4	Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		5	Persentase Keselarasan Renja SKPD dan RKPD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		6	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir (RKPD)	%	54,50	60,14	64,00	65,90	68,89

No.	Sasaran	Indikator Sasaran			Realisasi		Target		
		Uraian		Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
		7	Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan strategis dalam perencanaan pembangunan	% per tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1.9	Terwujudnya kearsipan yang berkualitas	1	Percentase SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku	%	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
1.2.1	Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	1	Percentase penyediaan aplikasi penjaminan online	%			5,41	54,10	100,00
		2	Percentase integrasi aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah	%	28,28	45,52	51,00	81,72	100,00

Misi 2: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi

No.	Sasaran	Indikator Sasaran			Realisasi		Target		
		Uraian		Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
2.1.1	Terwujudnya keberdayaan UMKM dan Koperasi sebagai pendukung perekonomian	1	Jumlah UMKM yang melakukan kegiatan usaha	Unit	10.079	10.281	10.553	10.600	10.700
		2	Percentase koperasi yang melakukan kegiatan usaha	%	63,70	68,10	66,30	68,00	69,00
2.1.2	Terwujudnya peningkatan investasi dan kemudahan perijinan	1	Jumlah penanaman modal (investasi)	Rp. Triliun	4,28	5,07	5,58	6,13	6,75
		2	Percentase perizinan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.3	Terwujudnya ketahanan pangan yang memadai dan berkualitas	1	Jumlah Cadangan Pangan	Ton			100,00	184,67	284,67
		2	Produksi padi	Kw	64.613	42.669	36.870	48.170	47.210
		3	Produksi sayuran	Kw	209.380	214.883	213.946	224.880	224.880
		4	Produksi Buah-buahan	Kw	48.395	20.668	62.253	75.195	78.943

No.	Sasaran	Indikator Sasaran		Realisasi		Target		
		Uraian	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
5		Produksi tanaman bio farmaka	kg	11.878	8.802	6.394	6.000	6.000
		Produksi Daging	Ton	49.909	66.071	26.389	26.916	27.454
2.1.4	Meningkatnya kepariwisataan	1 Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	381.265	337.678	34.612	354.773	363.642
		2 Rata-rata lama kunjungan wisatawan (Rata-rata lama menginap di hotel)	Hari	1,33	1,55	1,75	1,95	2,15
2.1.5	Terwujudnya perdagangan yang berkualitas serta peningkatan perlindungan konsumen	1 Persentase Alat Ukur yang terstandar	%		2,27	46,20	65,00	
		2 Persentase pasar tradisional yang bersih	%	93,55	96,77	96,77	96,88	100,00
2.1.6	Terwujudnya industri yang maju	1 Persentase industri yang memiliki standar	%	36,35	45,72	52,72	59,72	66,72
		2 Nilai PDRB sektor industri (ADHK)	Rp Milyar	34.468,97	35.638,73	37.460,57	38.931,05	40.967,26
		3 Persentase IKM memiliki produk sertifikasi halal	%	11,66	13,41	15,28	16,58	17,88

Misi 3: Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi

No.	Sasaran	Indikator Sasaran		Realisasi		Target		
		Uraian	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
3.1.1	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	1 Indeks pendidikan	Point	69,71	69,83	70,04	70,25	70,45
		2 Harapan lama sekolah	Tahun	12,86	12,90	12,94	12,99	13,03
		3 Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,20	10,20	10,23	10,25	10,28
		4 Angka melek huruf penduduk usia >15 tahun	(%)	98,50	98,51	98,74	98,77	98,80

No.	Sasaran	Indikator Sasaran			Realisasi		Target		
		Uraian		Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
3.1.2	Meningkatnya aksesibilitas kesehatan	1	Indeks kesehatan	Point	78,60	78,91	78,98	79,04	79,11
		2	Angka harapan hidup	Tahun	71,09	71,29	71,33	71,38	71,42
		3	Jumlah Kematian Ibu	Orang	13	20	19	5	4
		4	Jumlah Kematian Bayi	Orang	132	120	87	78	64
		5	Prevalensi Penyakit (Cakupan penemuan dan penanganan pasien baru Tuberkolosis)	%	45,62	54,87	65,02	70,00	75,02
		6	Presentase balita gizi buruk (BB/TB)	%	0,12	0,16	0,10	0,09	0,08
3.1.3	Terwujudnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1	Indeks pembangunan gender	Point	93,90	94,03	94,15	94,27	94,39
		2	Indeks pemberdayaan gender	Point	71,40	71,90	72,40	72,90	73,40
		3	Jumlah kekerasan terhadap anak	Orang	64	73	76	74	72
3.1.4	Terwujudnya keluarga sejahtera melalui keluarga berencana	1	Persentase pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif	%	73,02	77,91	74,42	76,52	77,64
		2	Persentase posyandu yang melaksanakan kegiatan sebulan sekali	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.1.5	Terwujudnya pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial	1	Persentase penurunan PMKS	%	3,36	3,71	3,70	3,11	2,97
		2	Persentase Penanganan PMKS	%	16,67	40,00	60,00	80,00	100,00
3.1.6	Terwujudnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,81	8,01	7,84	7,70	7,52
		2	Jumlah lowongan kerja	Orang	13.290	14.312	15.902	16.312	17.312
3.1.7	Terwujudnya peningkatan pengelolaan dan pelestarian kebudayaan daerah	1	Persentase pelestarian cagar budaya daerah	%	56,25	66,67	81,25	93,75	100,00
		2	Jumlah pagelaran budaya kota.	Kegiatan	8	12	16	17	18

No.	Sasaran	Indikator Sasaran			Realisasi		Target		
		Uraian		Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
3.1.8	Terwujudnya kepemudaan dan keolahragaan yang mandiri dan berprestasi	1	Persentase organisasi pemuda yang memiliki sertifikat standar mutu organisasi kepemudaan	%	0,00	36,36	66,67	100,00	100,00
		2	Persentase organisasi olahraga yang memiliki sertifikat standar mutu organisasi keolahragaan	%	0,00	25,00	50,00	75,00	100,00
		3	Jumlah atlet berprestasi tingkat Provinsi	orang	281	93	109	85	367
3.1.9	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, kepolitikan dan hukum	1	Persentase penyelesaian konflik Suku, Agama, Ras dan Adat (SARA)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2	Persentase penyelesaian penegakan perda	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.1.10	Terwujudnya peningkatan keberdayaan masyarakat	1	Persentase kelompok masyarakat aktif	%	26,96	42,02	62,52	81,26	100,00
3.1.11	Terwujudnya peningkatan kesadaran dan kegemaran membaca masyarakat	1	Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah	Orang	9.047	11.488	28.744	31.619	46.970

Misi 4: Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas

No.	Sasaran	Indikator Sasaran			Realisasi		Target		
		Uraian		Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
4.1.1	Terwujudnya pengendalian banjir dan genangan	1	Luas genangan dan banjir	Ha	245	240	235	230	225

No.	Sasaran	Indikator Sasaran			Realisasi		Target		
		Uraian		Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
4.2.1	Terwujudnya jaringan jalan dan sarana pendukungnya yang mantap	1	Persentase kondisi jalan kota yang mantap	%	99,79	99,79	99,87	99,93	99,96
		2	Persentase keterhubungan pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat produksi di wilayah kota	%	92,21	95,64	96,26	99,49	100,00
4.2.2	Terwujudnya pelayanan transportasi perkotaan terpadu	1	Persentase kemacetan yang tertangani	%	75,00	79,00	89,00	93,00	100,00
		2	Jumlah koridor angkutan umum masal yang beroperasi	Koridor	0	0	1	1	2

Misi 5: Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman

No.	Sasaran	Indikator Sasaran			Realisasi		Target		
		Uraian		Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
5.1.1	Terwujudnya peningkatan penanggulangan bencana	1	Persentase penanggulan bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2	Jumlah penanganan korban bencana	Orang	8.058	6.715	5.839	4.963	3.971
5.1.2	Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak	1	Backlog rumah	%	5,25	5,18	4,93	2,26	1,98
		2	Persentase rumah layak huni	%	98,38	98,40	98,80	99,42	99,43
		3	Luas lingkungan permukiman kumuh	Ha	358,29	350,32	339,87	54,87	38,21
		4	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih	%	58,09	64,60	97,90	98,01	98,13
		5	Persentase penduduk yang terlayani jaringan air limbah	%	32,00	38,30	44,20	48,97	50,75

No.	Sasaran	Indikator Sasaran			Realisasi		Target		
		Uraian		Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
5.1.3	Terwujudnya penataan ruang wilayah yang berkualitas	1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.1.4	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	U,SB,B,C,K,SK,W	W	W	W	SK	SK
		2	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	56,87	56,88	57,02	57,04	57,10
		3	Persentase pengurangan sampah di perkotaan	%	18,98	19,64	20,23	20,27	20,46

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018

Misi 1 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan professional

No.	Sasaran	Indikator Sasaran			Target
		Uraian		Satuan	
1.1.1	Terwujudnya penataan pertanahan	1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	88,97
		2	Persentase kasus tanah pemda/negara yang diselesaikan	% per tahun	100,00
1.1.2	Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1	Persentase penerbitan kartu keluarga	%	100,00
		2	Persentase penerbitan kartu tanda penduduk	%	100,00
		3	Persentase penerbitan kutipan akta kelahiran	%	100,00
		4	Persentase penerbitan kutipan akta kematian	%	100,00
		5	Persentase Pasangan Suami-Isteri Ber-Akta Nikah	%	100,00
1.1.3	Terwujudnya sistem dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Poin	3,00
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada SKPD pelayanan Publik	Poin	82,63
		3	Persentase Raperda yang disetujui DPRD	%	100,00
1.1.4	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	1	Jumlah pendapatan daerah	Rp. Triliun	3.718
		2	Jumlah pendapatan asli daerah (PAD)	Rp. Triliun	1,67
		3	Persentase pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah	%	44,84
1.1.5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	1	Persentase Hasil temuan yang ditindak lanjuti	%	100,00
		2	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP/ WDP/ TMP	WTP
		3	Nilai evaluasi AKIP pemerintah daerah	A, BB, B, CC, C, D	B
		4	Persentase SKPD yang memiliki nilai "B" hasil evaluasi SAKIP	%	100,00
1.1.6	Terwujudnya aparatur yang profesional	1	Persentase Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) diatas 75	%	87,00

No.	Sasaran	Indikator Sasaran			Target
		Uraian		Satuan	
		2	Jumlah Pegawai yang terkena hukuman disiplin	Orang	6
1.1.7	Terwujudnya statistik dan persandian yang berkualitas	1	Persentase publikasi data statistik daerah berbasis website	%	100,00
		2	Persentase penggunaan persandian untuk pengamanan aplikasi	%	100,00
1.1.8	Terwujudnya perencanaan serta penelitian dan pengembangan pembangunan yang berkualitas	1	Persentase output kegiatan yang tercapai	%	93,00
		2	Persentase indikator sasaran yang tercapai	%	97,80
		3	Persentase Keselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD	%	100,00
		4	Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	%	100,00
		5	Persentase Keselarasan Renja SKPD dan RKPD	%	100,00
		6	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir (RKPD)	%	68,89
		7	Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan strategis dalam perencanaan pembangunan	% per tahun	100,00
1.1.9	Terwujudnya kearsipan yang berkualitas	1	Persentase SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku	%	100,00
1.2.1	Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	1	Persentase penyediaan aplikasi perijinan online	%	100,00
		2	Persentase integrasi aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah	%	100,00

Misi 2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi

No.	Sasaran	Indikator Sasaran			Target
		Uraian		Satuan	
2.1.1	Terwujudnya keberdayaan UMKM dan Koperasi sebagai pendukung perekonomian	1	Jumlah UMKM yang melakukan kegiatan usaha	Unit	10.700
		2	Persentase koperasi yang melakukan kegiatan usaha	%	69,00
2.1.2	Terwujudnya peningkatan investasi dan kemudahan perijinan	1	Jumlah penanaman modal (investasi)	Rp. Triliun	6,75
		2	Persentase perizinan tepat waktu	%	100,00

No.	Sasaran	Indikator Sasaran			Target
		Uraian	Satuan		
2.1.3	Terwujudnya ketahanan pangan yang memadai dan berkualitas	1	Jumlah Cadangan Pangan	Ton	284,67
		2	Produksi padi	Kw	47.210,00
		3	Produksi sayuran	Kw	224.880,00
		4	Produksi Buah-buahan	Kw	78.943,00
		5	Produksi tanaman bio farmaka	kg	6.000,00
		6	Produksi Daging	Ton	27.454
2.1.4	Meningkatnya kepariwisataan	1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	363.642
		2	Rata-rata lama kunjungan wisatawan (Rata-rata lama menginap di hotel)	Hari	2,15
2.1.5	Terwujudnya perdagangan yang berkualitas serta peningkatan perlindungan konsumen	1	Persentase Alat Ukur yang terstandar	%	65,00
		2	Persentase pasar tradisional yang bersih	%	100,00
2.1.6	Terwujudnya industri yang maju	1	Persentase industri yang memiliki standar	%	66,72
		2	Nilai PDRB sektor industri (ADHK)	Rp Miliar	40.967,26
		3	Persentase IKM memiliki produk sertifikasi halal	%	17,88

Misi 3 : Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi

No.	Sasaran	Indikator Sasaran			Target
		Uraian	Satuan		
3.1.1	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	1	Indeks pendidikan	Point	70,45
		2	Harapan lama sekolah	Tahun	13,03
		3	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,28
		4	Angka melek huruf penduduk usia >15 tahun	(%)	98,80
3.1.2	Meningkatnya aksesibilitas kesehatan	1	Indeks kesehatan	Point	79,11
		2	Angka harapan hidup	Tahun	71,42
		3	Jumlah Kematian Ibu	Orang	4
		4	Jumlah Kematian Bayi	Orang	64
		5	Prevalensi Penyakit (Cakupan penemuan dan penanganan pasien baru Tuberkolosis)	%	75,02
		6	Presentase balita gizi buruk (BB/TB)	%	0,08

No.	Sasaran	Indikator Sasaran			Target
		Uraian		Satuan	
3.1.3	Terwujudnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1	Indeks pembangunan gender	Point	94,39
		2	Indeks pemberdayaan gender	Point	73,40
		3	Jumlah kekerasan terhadap anak	Orang	72
3.1.4	Terwujudnya keluarga sejahtera melalui keluarga berencana	1	Persentase pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif	%	77,64
		2	Persentase posyandu yang melaksanakan kegiatan sebulan sekali	%	100,00
3.1.5	Terwujudnya pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial	1	Persentase penurunan PMKS	%	2,97
		2	Persentase Penanganan PMKS	%	100,00
3.1.6	Terwujudnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,52
		2	Jumlah lowongan kerja	Orang	17.312
3.1.7	Terwujudnya peningkatan pengelolaan dan pelestarian kebudayaan daerah	1	Persentase pelestarian cagar budaya daerah	%	100,00
		2	Jumlah pagelaran budaya kota.	Kegiatan	18
3.1.8	Terwujudnya kepemudaan dan keolahragaan yang mandiri dan berprestasi	1	Persentase organisasi pemuda yang memiliki sertifikat standar mutu organisasi kepemudaan	%	100,00
		2	Persentase organisasi olahraga yang memiliki sertifikat standar mutu organisasi keolahragaan	%	100,00
		3	Jumlah atlet berprestasi tingkat Provinsi	orang	367
3.1.9	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, kepoltikan dan hukum	1	Persentase penyelesaian konflik Suku, Agama, Ras dan Adat (SARA)	%	100,00
		2	Persentase penyelesaian penegakan perda	%	100,00
3.1.10	Terwujudnya peningkatan keberdayaan masyarakat	1	Persentase kelompok masyarakat aktif	%	100,00
3.1.11	Terwujudnya peningkatan kesadaran dan kegemaran membaca masyarakat	1	Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah	Orang	33.780

Misi 4 : Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas

No.	Sasaran	Indikator Sasaran			Target
		Uraian	Satuan		
4.1.1	Terwujudnya pengendalian banjir dan genangan	1 Luas genangan dan banjir	Ha	225	
4.2.1	Terwujudnya jaringan jalan dan sarana pendukungnya yang mantap	1 Persentase kondisi jalan kota yang mantap	%	99,96	
		2 Persentase keterhubungan pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat produksi di wilayah kota	%	100,00	
4.2.2	Terwujudnya pelayanan transportasi perkotaan terpadu	1 Persentase kemacetan yang tertangani	%	100,00	
		2 Jumlah koridor angkutan umum masal yang beroperasi	Koridor	2	

Misi 5 : Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman

No.	Sasaran	Indikator Sasaran			Target
		Uraian	Satuan		
5.1.1	Terwujudnya peningkatan penanggulangan bencana	1 Persentase penanggulan bencana	%	100,00	
		2 Jumlah penanganan korban bencana	Orang	3.971	
5.1.2	Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak	1 Persentase Ketersediaan Rumah	%	97,74	
		2 Persentase rumah layak huni	%	99,43	
		3 Luas lingkungan permukiman kumuh	Ha	38,21	
		4 Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih	%	98,13	
		5 Persentase penduduk yang terlayani jaringan air limbah	%	50,75	
5.1.3	Terwujudnya penataan ruang wilayah yang berkualitas	1 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	100,00	
5.1.4	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	U,SB,B,C,K,SK,W	SK	
		2 Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	55,97	
		3 Persentase pengurangan sampah di perkotaan	%	15,50	

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KOTA TANGERANG

Misi 1: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Akuntabel, Dan Transparan Didukung Dengan Struktur Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten, Dan Professional

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
1	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Jumlah pendapatan asli daerah (PAD)	Rp. Triliun	Jumlah pendapatan asli daerah (PAD) yang diterima oleh Pemerintah Kota Tangerang.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan Badan Pendapatan Daerah (BPD)	Jumlah pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP/ WDP/ TMP	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
		Nilai evaluasi AKIP pemerintah daerah	A, BB, B, CC, C, D	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kota Tangerang	Bappeda	Nilai Evaluasi AKIP Kota Tangerang diukur sesuai dengan Permenpan No. 25/2012 tentang Pedoman atas Implementasi SAKIP serta perubahannya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
3	Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	Persentase integrasi aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah	%	Jumlah sistem informasi dan aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah terintegrasi dibagi Jumlah sistem informasi dan aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang ada	Dinas Komunikasi dan Informatika	Integrasi sistem merupakan proses membangun suatu kesatuan sistem informasi dari komponen-komponen perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan yang berbeda

Misi 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berdaya Saing Tinggi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
4	Terwujudnya peningkatan investasi dan kemudahan perijinan	Jumlah penanaman modal (investasi)	Rp. Triliun	Jumlah nilai penanaman modal (investasi) PMA dan PMDN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kota Tangerang
		Persentase perizinan tepat waktu	%	Jumlah perijinan yang diterbitkan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku dibagi Jumlah permohonan perijinan yang memenuhi syarat lengkap sesuai peraturan berlaku	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) menargetkan seluruh pelayanan izin sesuai waktu sehingga target yang harus dicapai adalah 100%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
5	Meningkatnya kepariwisataan	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Tangerang	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kunjungan Wisatawan terdiri dari Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara
		Rata-rata lama kunjungan wisatawan (Rata-rata lama menginap di hotel)	Hari	Jumlah lamanya hari tamu yang menginap di hotel (hari) dibagi Jumlah tamu yang menginap di hotel (orang)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Untuk mengetahui berapa lama seorang tamu menginap di suatu akomodasi pada suatu waktu tertentu
6	Terwujudnya industri yang maju	Nilai PDRB sektor industri (ADHK)	Rp. Milyar	Nilai PDRB Atas Harga Konstan 2010 pada sektor industri pengolahan	BPS, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sektor industri pengolahan merupakan lapangan usaha terbesar yang berperan dalam perekonomian Kota Tangerang.

Misi 3: Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
7	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	Indeks pendidikan	Point	Indeks pendidikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	BPS, Dinas Pendidikan	Indeks Pendidikan atau Indeks Pengetahuan adalah penggabungan dua indikator pendidikan, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
8	Meningkatnya aksesibilitas kesehatan	Indeks kesehatan	Point	Indeks Kesehatan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	BPS, Dinas Kesehatan	Indeks Kesehatan atau Indeks harapan hidup didapat dari angka harapan hidup, digunakan untuk mengukur pembangunan di bidang kesehatan. Meningkatnya angka harapan hidup dapat berarti adanya perbaikan pembangunan di bidang kesehatan
9	Terwujudnya pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial	Persentase penurunan PMKS	%	Jumlah PMKS tahun n dikurang Jumlah PMKS tahun n-1 dibagi Jumlah PMKS tahun n-1 kali 100 persen	Dinas Sosial	Berdasarkan Permensos RI No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
10	Terwujudnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	Jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan dibagi jumlah angkatan kerja kali 100 persen	BPS, Dinas Ketenagakerjaan	Angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan adalah mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah berkerja, atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja
11	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, kepoltikan dan hukum	Persentase penyelesaian konflik Suku, Agama, Ras dan Adat (SARA)	%	Jumlah penyelesaian konflik SARA yang difasilitasi dibagi Jumlah konflik SARA yang terjadi	Kantor Kesbang dan Politik Dalam Negeri	

Misi 4: Meningkatkan Pembangunan Sarana Perkotaan Yang Memadai Dan Berkualitas

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
12	Terwujudnya pengendalian banjir dan genangan	Luas genangan dan Banjir	Ha	Luas genangan dan banjir di wilayah Kota Tangerang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanganan banjir sampai tuntas sehingga luas genangan dan banjir di wilayah Kota Tangerang akan berkurang
13	Terwujudnya pelayanan tansportasi perkotaan terpadu	Persentase kemacetan yang tertangani	%	Jumlah titik kemacetan yang ditangani dibagi jumlah titik kemacetan di ruas jalan Kota Tangerang kali 100 persen	Dinas Perhubungan	Semakin banyak titik kemacetan yang tertangani maka kondisi lalu lintas semakin lancar

Misi 5: Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan Yang Bersih, Sehat, Dan Nyaman

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
14	Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak	Persentase rumah layak huni	%	Jumlah rumah layak huni dibagi Total jumlah rumah yang ada	Dinas Perumahan dan Permukiman	Permendagri 54 Tahun 2010
15	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	(U, SB, B, C, K, SK, W)	Nilai indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Dinas Lingkungan Hidup	ukuran utama untuk Sasaran Pokok Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019 dan RPJMD Kota Tangerang 2014-2018

PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018

Misi 1 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan professional

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Jumlah pendapatan asli daerah (PAD)	Rp. Triliun	1,67
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP/ WDP/ TMP	WTP
		Nilai evaluasi AKIP pemerintah daerah	A, BB, B, CC, C, D	B
3	Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	Persentase integrasi aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah	%	100,00

Misi 2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
4	Terwujudnya peningkatan investasi dan kemudahan perijinan	Jumlah penanaman modal (investasi)	Rp. Triliun	6,75
		Persentase perizinan tepat waktu	%	100,00
5	Meningkatnya kepariwisataan	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	363.642
		Rata-rata lama kunjungan wisatawan (Rata-rata lama menginap di hotel)	Hari	2,15
6	Terwujudnya industri yang maju	Nilai PDRB sektor industri (ADHK)	Rp Milyar	40.967,26

Misi 3 : Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
7	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	Indeks pendidikan	Point	70,45
8	Meningkatnya aksesibilitas kesehatan	Indeks kesehatan	Point	79,11
9	Terwujudnya pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial	Persentase penurunan PMKS	%	2,97
10	Terwujudnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,52
11	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, kepolitikan dan hukum	Persentase penyelesaian konflik Suku, Agama, Ras dan Adat (SARA)	%	100,00

Misi 4 : Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
12	Terwujudnya pengendalian banjir dan genangan	Luas genangan dan Banjir	Ha	225
13	Terwujudnya pelayanan tansportasi perkotaan terpadu	Persentase kemacetan yang tertangani	%	100,00

Misi 5 : Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
14	Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak	Persentase rumah layak huni	%	99,43
15	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	(U, SB, B, C, K, SK, W)	SK

PENCAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

KOTA TANGERANG TAHUN 2018

Misi 1 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan professional

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				2018		
				2014	2015	2016	2017	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Jumlah pendapatan asli daerah (PAD)	Rp. Triliun	1,26	1,47	1,59	1,86	1,67	1,87	111,98
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP/ WDP/ TMP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00
		Nilai evaluasi AKIP pemerintah daerah	A, BB, B, CC, C, D	CC	CC	CC	B	B	B	100,00
3	Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	Persentase integrasi aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah	%	28,28	45,52	71,00	86,67	100,00	100,00	100,00

Misi 2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				2018		
				2014	2015	2016	2017	Target	Realisasi	%
4	Terwujudnya peningkatan investasi dan kemudahan perijinan	Jumlah penanaman modal (investasi)	Rp. Triliun	4,28	5,07	6,86	7,68	6,75	6,79	100,59
		Persentase perizinan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Meningkatnya kepariwisataan	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	478.715	500.493	536.963	1.088.700	363.642	1.598.150	439,48
		Rata-rata lama kunjungan wisatawan (Rata-rata lama menginap di hotel)	Hari	1,33	1,55	1,80	1,96	2,15	2,20	102,33
6	Terwujudnya industri yang maju	Nilai PDRB sektor industri (ADHK)	Rp Milyar	34.007,79	35.049,96	36.045,90	37.385,84	40.967,26	38.830,48	94,78

Misi 3 : Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				2018		
				2014	2015	2016	2017	Target	Realisasi	%
7	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	Indeks pendidikan	Point	69,71	69,80	71,52	71,63	70,45	73,28	104,02
8	Meningkatnya aksesibilitas kesehatan	Indeks kesehatan	Point	78,60	78,85	78,98	79,05	79,11	79,11	100,00
9	Terwujudnya pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial	Persentase penurunan PMKS	%	3,36	3,71	3,90	3,11	2,97	2,93	101,35
10	Terwujudnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,81	8,01	7,00	7,16	7,52	7,41	101,46
11	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, kepoltikan dan hukum	Persentase penyelesaian konflik Suku, Agama, Ras dan Adat (SARA)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Misi 4 : Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				2018		
				2014	2015	2016	2017	Target	Realisasi	%
12	Terwujudnya pengendalian banjir dan genangan	Luas genangan dan Banjir	Ha	245	240	235	230	225	222,18	101,25
13	Terwujudnya pelayanan transportasi perkotaan terpadu	Persentase kemacetan yang tertangani	%	75,00	79,00	89,00	95,12	100,00	100,00	100,00

Misi 5 : Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				2018		
				2014	2015	2016	2017	Target	Realisasi	%
14	Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni	Persentase rumah layak huni	%	98,38	98,40	98,80	99,42	99,43	99,43	100,00
15	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	(U, SB, B, C, K, SK, W)	W	W	W	SK	SK	SK	100,00